



**BERITA DAERAH
KABUPATEN NIAS**

NOMOR : 316

SERI : E

**PERATURAN BUPATI NIAS
NOMOR 23 TAHUN 2023**

TENTANG

**ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH
KABUPATEN NIAS TAHUN 2023-2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS,

- Menimbang : a. bahwa dampak reformasi birokrasi dalam mendukung capaian sasaran pembangunan nasional dan daya saing Indonesia dalam kancah internasional belum optimal sehingga diperlukan penajaman hubungan sebab akibat dan penyelarasan kondisi yang akan dicapai pada level dampak dengan level fokus pelaksanaan reformasi birokrasi;
- b. bahwa dalam penajaman hubungan sebab akibat dan penyelarasan kondisi diperlukan perubahan substansi terkait tujuan dan sasaran reformasi birokrasi, kegiatan reformasi birokrasi yang berdampak, fokus pelaksanaan reformasi birokrasi, dan penajaman indikator reformasi birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 diamanatkan bahwa pemerintah daerah yang telah menyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 menyesuaikan dengan *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Nias Tahun 2023-2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang-Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 NomoR 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan, Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Manajemen Perubahan;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 441);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 233);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nias Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2016 Nomor 2 Seri E);

18. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2021 Nomor 24 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nias Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2021 Nomor 26 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NIAS TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2023-2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nias.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Nias.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nias.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Nias dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Nias.
6. Reformasi Birokrasi adalah upaya untuk melakukan perbaikan kinerja birokrasi, dengan meningkatkan kualitas, efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas pada seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma, dan meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.
7. Reformasi Birokrasi Tematik adalah strategi baru dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi 2023–2024 yang memiliki waktu pelaksanaan hingga Tahun 2024.
8. *Grand Design* Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2025.
9. *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Nias Tahun 2023-2024.
10. Agen Perubahan (*Agent of Change*) adalah individu atau organisasi yang bertugas mempengaruhi target/sasaran perubahan agar dapat mengambil keputusan sesuai dengan arah yang dikehendaknya.

11. *Role model* adalah individu yang bisa dijadikan contoh dalam prestasi kerjanya, pola pikirnya (*mind set*) dan budaya kerjanya (*culture set*) dalam proses perubahan.
12. Rencana Aksi adalah langkah-langkah rinci yang diambil untuk mencapai tujuan jangka panjang atau jangka pendek.
13. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
14. Tema adalah pokok pikiran, ide, atau gagasan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik, yaitu pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, serta percepatan prioritas aktual, peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan pengendalian inflasi.
15. *Leading institution* merupakan kementerian/lembaga yang memiliki peran, kewenangan, dan tanggung jawab untuk merumuskan kebijakan inovatif, menerjemahkan kebijakan makro terkait indikator, mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan, melakukan monitoring dan evaluasi kemajuan pelaksanaannya, serta menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Tim Reformasi Birokrasi Nasional dalam pelaksanaan reformasi birokrasi *general*.
16. *Leading sector* merupakan kementerian/lembaga yang memiliki peran, kewenangan, dan tanggung jawab untuk menjadi koordinator dalam pelaksanaan tema yang ditetapkan dalam reformasi birokrasi tematik.
17. Level Makro adalah untuk memastikan Reformasi Birokrasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui penetapan arah kebijakan Reformasi Birokrasi, penetapan kebijakan prioritas Reformasi Birokrasi, serta penyempurnaan regulasi nasional yang terkait dengan upaya pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
18. Level Meso adalah untuk memastikan berbagai arahan kebijakan Reformasi Birokrasi level makro yang ditetapkan oleh Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional (TRBN) diterjemahkan ke dalam kegiatan-kegiatan utama yang efektif mencapai tujuan dan sasaran strategis Reformasi Birokrasi.
19. Level Mikro adalah level yang mengutamakan Prioritas Nasional dan dimensi Prioritas Instansional. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi level mikro yang didasari Prioritas Nasional berarti pelaksanaan Reformasi Birokrasi mikro harus sesuai dan selaras dengan seluruh kebijakan nasional terkait Reformasi Birokrasi yang telah ditetapkan dalam kebijakan di level makro dan meso yang bersifat *mandatory*. Sedangkan pelaksanaan yang didasari pada dimensi Prioritas Instansional adalah pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk mengakomodir kebutuhan untuk pemecahan masalah tata kelola internal kementerian/lembaga /pemerintah daerah yang masih menjadi kendala dalam penyediaan pelayanan publik yang berkualitas dan peningkatan kinerja yang berkelanjutan.
20. Monitoring adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan program kegiatan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan atau akan timbul untuk diambil tindakan sedini mungkin.

21. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Nias Tahun 2023-2024 merupakan bentuk operasionalisasi *Grand Design* Reformasi Birokrasi dan rencana rinci Reformasi Birokrasi selama tahun 2023-2024;
- (2) *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Nias Tahun 2023-2024 digunakan sebagai acuan bagi pemerintah daerah dan Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di internal instansi serta menjalankan program Mikro.

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah untuk menciptakan birokrasi Pemerintah Kabupaten Nias yang bersih, akuntabel dan kapabel sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dengan karakteristik adaptif, berintegritas, mempunyai kinerja tinggi, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

BAB III

PENAJAMAN *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI

Pasal 4

Penajaman *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Nias Tahun 2023–2024 yakni :

- a) Substansi tujuan, sasaran, dan indikator keberhasilan Reformasi Birokrasi dalam *Road Map*.
- b) Sasaran program pembangunan bersifat lintas sektor dan lintas Instansi Pemerintah (*cross cutting issue*).
- c) Pengelolaan Reformasi Birokrasi yang fokus untuk percepatan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Reformasi Birokrasi.
- d) Kolaborasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang cenderung silo (*fragmented*)

Pasal 5

Tujuan penajaman terhadap *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Nias Tahun 2023–2024 adalah :

- (a) Mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran strategis Reformasi Birokrasi
- (b) Mendapatkan *Road Map* Reformasi Birokrasi yang lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan.

- (c) Mendapatkan *Road Map* Reformasi Birokrasi yang mampu menciptakan integrasi dan orkestrasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang sinergis dalam pemerintahan.

BAB IV

FOKUS PENAJAMAN *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2023–2024

Pasal 6

Fokus penajaman *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Nias adalah :

1. Penajaman terhadap Tujuan, Sasaran, dan Indikator
2. Penajaman terhadap Kegiatan Utama
3. Penajaman terhadap Fokus Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
4. Penajaman terhadap Ukuran Keberhasilan atau Indikator Reformasi Birokrasi
5. Target Kinerja Reformasi Birokrasi samapai dengan Tahun 2024

BAB V

TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR REFORMASI BIROKRASI

Pasal 7

- (1) Tujuan Reformasi Birokrasi adalah Birokrasi yang Bersih, Efektif dan Berdaya Saing mendorong Pembangunan Nasional dan Pelayanan Publik.
- (2) Sasaran Reformasi Birokrasi terdiri dari :
 - a. Sasaran Reformasi Birokrasi General; dan
 - b. Sasaran Reformasi Birokrasi Tematik.
- (3) Sasaran Reformasi Birokrasi General sebagaimana pada angka (2) huruf a, adalah terdiri dari :
 - a. Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Efektif, Lincah dan Kolaboratif; dan
 - b. Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional.
- (4) Sasaran Reformasi Birokrasi Tematik sebagaimana pada angka (2) huruf b, adalah terdiri dari :
 - a. Nasional : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Hasil pada 4 Tema Prioritas Reformasi Birokrasi Tematik; dan
 - b. Instansional : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Hasil Penanganan Tema yang dipilih.

Pasal 8

- (a) Indikator sasaran reformasi sebagai mana pada pasal 7 angka (3) huruf a, terdiri dari :
1. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
 2. Capaian Akuntabilitas Kinerja; dan
 3. Capaian Akuntabilitas Keuangan.

- (b) Indikator Sasaran reformasi sebagai mana pada pasal 7 angka (3) huruf b, terdiri dari :
1. Nilai Survei Penilaian Integritas;
 2. Nilai *Employer Branding*;
 3. Indeks BerAKHLAK; dan
 4. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat.
- (c) Indikator Sasaran reformasi sebagai mana pada pasal 7 angka (4), adalah Capaian Kinerja Reformasi Birokrasi Tematik.

BAB VI

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PELAKSANAAN REORMASI BIROKRASI GENERAL TAHUN 2023–2024

Pasal 9

Arah kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi General adalah Terciptanya Birokrasi yang Bersih, Efektif dan Berdaya Saing Mendorong Pembangunan Nasional dan Pelayanan Publik.

Pasal 10

Strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah :

1. Strategi Level Makro
2. Strategi Level Meso
3. Strategi Level Mikro

Pasal 11

Strategi Level Makro terdiri atas :

1. Mendorong Percepatan Digitalisasi Birokrasi;
2. Melaksanakan Reformasi Birokrasi Tematik untuk mendorong percepatan penyelesaian isu nasional, khususnya terkait dengan pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi dan administrasi pemerintah.

Pasal 12

Strategi Level Meso terdiri dari :

- a. Percepatan Transformasi Organisasi Berbasis Kinerja dan *Agile*;
- b. Percepatan Transformasi Jabatan Fungsional;
- c. Percepatan Transformasi *Squad Model*;
- d. Percepatan Implementasi SPBE melalui Pembangunan *SuperApps*-Layanan Digital Pemerintah Terintegrasi;
- e. Percepatan Implementasi Manajemen Talenta dan Mobilitas Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara;
- f. Penguatan Kerja Kolaboratif (*collaborative working*) berbasis kinerja melalui SAKP Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP);
- g. Pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) dan *MPP Digital Services*;
- h. Penguatan Pengawasan dengan *four line of defense*;
- i. Penguatan Kebijakan Publik berbasis bukti dengan *Big Data* dan *Artificial Intelligent*.

Pasal 13

Strategi Level Mikro terdiri dari :

1. Menetapkan *Road Map* Reformasi Birokrasi;
2. Menyusun Rencana Aksi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
3. Mengelola pelaksanaan rencana aksi;
4. Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi; serta
5. Menetapkan Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) yang akan menjadi masukan penyusunan rencana aksi tahun berikutnya.

BAB VII

STRATEGI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI TEMATIK TAHUN 2023–2024

Pasal 14

Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik Tahun 2023–2024 dilaksanakan melalui tema sebagai berikut :

1. Pengentasan Kemiskinan
2. Peningkatan Investasi
3. Digitalisasi Administrasi Pemerintahan
4. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN); dan
5. Pengendalian Inflasi.

BAB VIII

PEDOMAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Pasal 15

- (1) *Leading institution* merupakan kementerian/lembaga yang memiliki peran, kewenangan, dan tanggung jawab untuk merumuskan kebijakan inovatif, menerjemahkan kebijakan makro terkait indikator, mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan, melakukan monitoring dan evaluasi kemajuan pelaksanaannya, serta menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Tim Reformasi Birokrasi Nasional dalam pelaksanaan reformasi birokrasi *general*.
- (2) *Leading sector* merupakan kementerian/lembaga yang memiliki peran, kewenangan, dan tanggung jawab untuk menjadi koordinator dalam pelaksanaan tema yang ditetapkan dalam reformasi birokrasi tematik.
- (3) Setiap *leading institution* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terlibat langsung pada kegiatan utama dalam level meso wajib menyampaikan laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atas pelaksanaan kegiatan utama kepada Ketua Tim Reformasi Birokrasi Nasional.
- (4) Setiap *leading sector* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaksanakan rencana aksi reformasi birokrasi tematik dan menyampaikan laporan atas capaian rencana aksi secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Ketua Tim Reformasi Birokrasi Nasional.

Pasal 16

1. *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Nias merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman dalam upaya percepatan pencapaian sasaran reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Nias Tahun 2023-2024 yang diselaraskan dalam penyusunan dokumen dan penganggaran daerah.
2. *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Nias Tahun 2023-2024 sebagaimana dimaksud pada huruf (a) disusun dalam dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Nias Tahun 2023-2024, dituangkan dalam Rencana Program/Kegiatan Percepatan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias.
- (2) Rencana Program/Kegiatan Percepatan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah /Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Tahun 2023-2024 ditetapkan oleh Bupati setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Nias.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati Nias ini mulai berlaku, Perangkat Daerah wajib :

1. Menyusun Modul Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik berdasarkan Inovasi yang dilaksanakan perangkat daerah dengan memuat Rencana Kerja Pelaksanaan Reformasi Perangkat Daerah melalui Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Nias ini, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah Peraturan Bupati Nias ini diundangkan;
2. Membuat Laporan Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi baik general maupun tematik Perangkat Daerah secara berkala (triwulan) dan disampaikan kepada Bupati Nias melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Nias c.q Bagian Organisasi Sekretariat Daerah kabupaten Nias;
3. Modul Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik sebagaimana pada ayat 1 disusun sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini; dan

4. Laporan Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana pada ayat 2 disusun sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

1. Peraturan Bupati Nias Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Nias; dan
 2. Peraturan Bupati Nias Nomor 21 Tahun 2022 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Nias Tahun 2022-2024 (Berita Daerah Kabupaten Nias Tahun 2022 Nomor 260 seri E);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias.

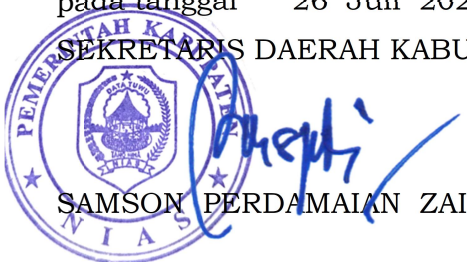
Ditetapkan di Gido
pada tanggal 26 Juli 2023
BUPATI NIAS,

ttd

YAATULO GULO

Diundangkan di Gido
pada tanggal 26 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,



SAMSON PERDAMAIAN ZAI

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2023 NOMOR : 316 SERI : E

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI NIAS

NOMOR : 23 TAHUN 2023

TANGGAL : 26 JULI 2023

TENTANG : ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN NIAS
TAHUN 2023-2024

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH
KABUPATEN NIAS TAHUN 2023-2024

RINGKASAN EKSEKUTIF

Reformasi Birokrasi merupakan sebuah kebutuhan di tengah dinamika kompleksitas global yang menyebabkan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. Tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan melalui reformasi birokrasi yang berkualitas pada akhirnya adalah untuk mempercepat tercapainya Pembangunan Nasional. Dengan kata lain, reformasi birokrasi merupakan sebuah instrumen alat (*tools*) dalam rangka percepatan pencapaian prioritas kerja Presiden dan Pembangunan Nasional. Reformasi Birokrasi menjadi salah satu dari lima agenda prioritas Pembangunan Nasional yang menjadi fokus dari pemerintahan. Arahan Presiden tentang reformasi birokrasi berkaitan dengan tiga hal utama, yaitu mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil, birokrasi yang mampu menjamin agar manfaat kebijakan itu dirasakan oleh masyarakat (*making delivered*), serta birokrasi yang lincah dan cepat (*agile bureaucracy*). Arahan Presiden tersebut dapat terwujud apabila ada upaya perbaikan dalam tata kelola pemerintahan yang menyentuh akar permasalahan, tidak hanya menjadi agenda rutin tanpa memberikan daya ungkit yang konkret.

Perubahan *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 Nasional mengarahkan pelaksanaan reformasi birokrasi ke dalam dua fokus "*double track*", yaitu fokus penyelesaian isu hulu yang disebut dengan reformasi birokrasi General, serta fokus penyelesaian isu hilir yang disebut dengan reformasi birokrasi Tematik. Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah tahapan yang paling penting dan menentukan arah pelaksanaan reformasi birokrasi setiap Instansi Pemerintah. *Road Map* yang telah disusun digunakan sebagai panduan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

Hasil yang diharapkan dari Reformasi Birokrasi adalah terciptanya pemerintahan bersih, akuntabel, dan kapabel, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktek Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) sebagaimana tercermin dalam tiga sasaran hasil utama program Reformasi Birokrasi. Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Nias terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Perubahan *mindset* dan *culture set* harus terus didorong agar birokrasi mampu menunjukkan performa/kinerjanya dengan asas yang akan dikedepankan adalah Fokus dan Prioritas. Fokus berarti bahwa upaya Reformasi Birokrasi akan dilakukan secara fokus pada akar masalah tata kelola pemerintahan. Prioritas berarti setiap instansi akan memilih prioritas perbaikan tata kelola pemerintahan sesuai dengan karakteristik sumber daya dan tantangan yang dihadapi.

Kebijakan yang tertera dalam *Road Map* ini bersifat sebagai panduan umum dalam rangka menyediakan sebuah indikator yang minimum perlu dicapai oleh setiap perangkat daerah. Aspek ini menjadi pertimbangan mengingat kemampuan masing-masing perangkat daerah tidak sama sehingga perlu penyesuaian target capaian Reformasi Birokrasi. Lebih dari itu, sinkronisasi kebijakan, kontekstualisasi bagi kebutuhan pengguna, pengelolaan pengetahuan berbasis *virtue* yang mapan, serta pengarusutamaan inovasi merupakan komponen resep perubahan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Nias Tahun 2023-2024 ini terdapat indikator yang telah disinkronkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nias Tahun 2021-2026. Informasi lain yang harus dijelaskan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah tahapan atau aktivitas-aktivitas yang harus dilakukan untuk setiap program dan kegiatan, target capaian/hasil, pelaksana, penanggungjawab, dukungan yang dibutuhkan, dan anggaran yang diperlukan (disederhanakan).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, tujuan Reformasi Birokrasi adalah Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong Pembangunan Nasional dan Pelayanan Publik. Sedangkan sasaran Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut :



Reformasi Birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah prasyarat utama pembangunan nasional. Kualitas tata kelola pemerintahan akan sangat mempengaruhi pelaksanaan program-program pembangunan nasional. Semakin baik tata kelola pemerintahan suatu negara, semakin cepat pula perputaran roda pembangunan nasional.

Reformasi Birokrasi Tematik merupakan upaya dan sarana untuk mengurai dan menjawab atau mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintahan (*debottlenecking*) yang menjadi isu strategis dan prioritas pembangunan nasional secara kolaboratif. Konsep Reformasi Birokrasi Tematik, diharapkan dapat mendorong percepatan Reformasi Birokrasi yang kolaboratif dan efektif mengungkit capaian kinerja prioritas pembangunan sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara luas. Melalui Reformasi Birokrasi Tematik, pemerintah dapat memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan dengan berbagai pelaksanaan program-kegiatan yang sifatnya *problem solving-debottlenecking* dalam tata kelola pemerintah. Sasaran Reformasi Birokrasi Tematik adalah sebagai berikut :

SASARAN REFORMASI BIROKRASI TEMATIK

NASIONAL

Meningkatnya kualitas tata kelola dan hasil pada 4 tema prioritas reformasi birokrasi tematik (empat fokus dalam RB tematik, yakni birokrasi untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, serta program aktual prioritas Presiden dan Wakil Presiden.)

INSTANSIONAL

Meningkatnya kualitas tata kelola dan hasil penanganan tema yang dipilih.

Dalam rangka memastikan pengelolaan Reformasi Birokrasi yang efektif, pemerintah perlu untuk menetapkan perencanaan dan tata kelola Reformasi Birokrasi dalam sebuah dokumen perencanaan yang dapat dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pihak dan *stakeholder* yang berkepentingan. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025. Lebih lanjut tujuan, sasaran dan indikator dalam pelaksanaan Reformasi birokrasi dapat dijabarkan pada tabel berikut ini :

TUJUAN	GENERAL /TEMATIK	SASARAN	INDIKATOR
[1]	[2]	[3]	[4]
Birokrasi yang Bersih, Efektif dan Berdaya Saing mendorong Pembangunan Nasional dan Pelayanan Publik	General	Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Efektif, Lincah dan Kolaboratif	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
			Capaian Akuntabilitas Kinerja
			Capaian Akuntabilitas Keuangan
		Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional	Nilai Survei Penilaian Integritas
			Nilai <i>Employer Branding</i>
			Indeks BerAKHLAK
			Nilai Survei Kepuasan Masyarakat
	Tematik	Nasional : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Hasil pada 4 Tema Prioritas Reformasi Birokrasi Tematik	Capaian Kinerja Reformasi Birokrasi Tematik
		Instansional : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Hasil Penanganan Tema yang dipilih	

Untuk mewujudkan sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi, maka langkah dan tahapan pelaksanaan reformasi Birokrasi di Kabupaten Nias pada tahun 2023-2024 baik pada tingkat makro dan tingkat mikro mengacu pada *Grand Design* Reformasi Birokrasi. Setiap tahapan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dimaksudkan untuk memberikan dampak penguatan pada langkah berikutnya. Tema pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Nias dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut :

TEMA	SASARAN TEMATIK	INDIKATOR	BASE LINE 2022	TARGET		SUMBER DATA / PELAKSANA
				2023	2024	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
Penanggulangan Kemiskinan	Meningkatnya Produktivitas Komoditi Masyarakat	Nilai Tukar Petani (NTP)	100,1	100,2	100,3	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Nias
	Meningkatnya Perekonomian Masyarakat	Pengeluaran Per-Kapita	607.627	608.220	608.813	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Nias
	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,45	3,40	3,35	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan serta Ketenagakerjaan Kabupaten Nias
	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Indeks Pendidikan	0,568	0,586	0,604	Dinas Pendidikan Kabupaten Nias
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	0,7655	0,7657	0,7658	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nias
	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Wilayah	Persentase Wilayah Terisolir yang Terentaskan	86,47	87,06	87,65	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Nias
		Persentase Infrastruktur Jalan Kabupaten Status Mantap	36,66	37,50	38,33	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Nias
	Meningkatnya Keberadaan Ruang Kota dan Lingkungan Hidup Kota yang Nyaman dan Berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	46,93	46,93	46,93	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perhubungan Serta Lingkungan Hidup Kabupaten Nias
Peningkatan Investasi	Meningkatnya Investasi	Realisasi Investasi PMDN/PMA	22,15	22,5	23,5	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias
		Persentase Kegiatan Promosi Penanaman Modal	20	40	60	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias
		Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	100	100	100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias
Digitalisasi Pemerintahan	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Indeks SPBE	2,02	2,50	2,75	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias
		Nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Nias	B	BB	BB	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah kabupaten Nias
		Persentase Layanan	12	15	17	Dinas Komunikasi dan

TEMA	SASARAN TEMATIK	INDIKATOR	BASE LINE 2022	TARGET		SUMBER DATA / PELAKSANA
				2023	2024	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		Publik yang Diselenggarakan Secara <i>Online</i> dan Terintegrasi				Informatika Kabupaten Nias
		Opini BPK Terhadap Hasil Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP	WTP	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias
	Meningkatnya Kualitas Aparatur yang Berintegritas Tinggi, Produktif, dan Melayani secara Prima dalam Rangka Peningkatan Kepercayaan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,44	81,81	82,18	Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nias
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN)	Meningkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN)	Fasilitasi Pelaksanaan Sertifikasi dan Pengawasan serta Pengendalian Penerapan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)	50	55	60	Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Nias
Pengendalian Inflasi	Terkendalinya Inflasi	Indeks Harga Konsumen (IHK)	70	80	90	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan Serta Ketenagakerjaan Kabupaten Nias Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Nias

Selanjutnya, target Kegiatan Utama digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Nias. Penetapan Target ini perlu memperhatikan target minimal *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional. Hal-hal minimal yang perlu ada adalah:

1. Kegiatan Utama diambil berdasarkan hasil identifikasi Prioritas Kegiatan Utama
2. Terdapat indikator Kegiatan Utama yang terukur dan relevan
3. Terdapat target tahunan yang terukur dan optimis
4. Koordinator adalah unit/satuan kerja yang memiliki fungsi untuk mengawal dan mengkoordinir Kegiatan Utama
5. Pelaksana adalah unit/satuan kerja yang perlu melaksanakan Kegiatan Utama
6. Kegiatan Utama Inisiatif adalah yang berorientasi hasil (*bukan output*) dan memiliki *leverage* (percepatan) terhadap pencapaian Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi

KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	BASE LINE (2022)	TARGET TAHUNAN		PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PELAKSANA	
			2023	2024	KOORDINATOR	PELAKSANA
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
Sasaran 1: Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincih, Kolaboratif, dan Akuntabel						
Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi) / Transformasi Organisasi Berbasis Kinerja dan Agile	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi	50%	55%	65%	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Nias	Seluruh Perangkat Daerah/Unit Kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias
Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan Model Fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat Implementasi Sistem Kerja Baru dengan Model Fleksibel bagi Pegawai	80%	90%	100%	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Nias	Seluruh Perangkat Daerah/Unit Kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias
Pelaksanaan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Nasional	Indeks SPBE *)	Nilai 2,02	Nilai 2,50	Nilai 2,75	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias	Seluruh Perangkat Daerah/Unit Kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias
Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Nias	Predikat B	Predikat BB	Predikat BB	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Nias	Seluruh Perangkat Daerah/Unit Kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias
Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital	Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi	30%	70%	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias	Seluruh Perangkat Daerah/Unit Kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias
Pembangunan Zona Integritas di Unit Kerja	Indeks Survei Penilaian Integritas (SPI)	Nilai 74,5	Nilai 80	Nilai 90	Inspektorat Daerah Kabupaten Nias	Seluruh Perangkat Daerah/Unit Kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias
Penguatan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP	Level II	Level III	Level III	Inspektorat Daerah Kabupaten Nias	Seluruh Perangkat Daerah/Unit Kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias
Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Persentase Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	90	95	100	Inspektorat Daerah Kabupaten Nias	Seluruh Perangkat Daerah/Unit Kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias
Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Tingkat Implementasi Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	95%	97%	100%	Inspektorat Daerah Kabupaten Nias	Seluruh Perangkat Daerah/Unit Kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias
Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik *)	Nilai 85,05	Nilai 90	Nilai 95	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Nias	Seluruh Perangkat Daerah/Unit Kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias Ombudsman RI
Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan *)	Indeks Reformasi Hukum	Nilai 50,05	Nilai 60	Nilai 70	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nias	Seluruh Perangkat Daerah/Unit Kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias
Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti yang Sah dan Pertanggungjawaban Nasional	90%	95%	100%	Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Nias	Seluruh Perangkat Daerah/Unit Kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias
Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	90%	100%	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias	Seluruh Perangkat Daerah/Unit Kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias
Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa *)	Nilai 24,30	Nilai 50	Nilai 70	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Nias	Seluruh Perangkat Daerah/Unit Kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias
Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini BPK Atas Hasil Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP	WTP	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias	Seluruh Perangkat Daerah/Unit Kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias
Sasaran 2: Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional						
Penataan Jabatan Fungsional	Tertatanya Jabatan Fungsional	100%	100%	100%	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Nias	Seluruh Perangkat Daerah/Unit Kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias
Penguatan Manajemen Talenta ASN	Profesionalitas ASN	42,81%	60%	70%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nias	Seluruh Perangkat Daerah/Unit Kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias
Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	Kinerja Organisasi	6,27	8	10	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nias	Seluruh Perangkat Daerah/Unit Kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias

KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	BASE LINE (2022)	TARGET TAHUNAN		PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PELAKSANA	
			2023	2024	KOORDINATOR	PELAKSANA
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
Penguatan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit	Nilai 259,5	Nilai 285	Nilai 300	Nias Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nias	Seluruh Perangkat Daerah/Unit Kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias
Pelaksanaan <i>Core Values</i> ASN	Tingkat Implementasi Pelaksanaan <i>Core Values</i> ASN	90%	95%	100%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nias	Seluruh Perangkat Daerah/Unit Kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias
Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Kualitas Pelayanan Publik	Nilai 8,99	Nilai 10	Nilai 15	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Nias	Seluruh Perangkat Daerah/Unit Kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias

Langkah awal dalam kerangka pembangunan Reformasi Birokrasi Tematik adalah menetapkan tema yang akan dijadikan sebagai fokus Reformasi Birokrasi Tematik pada tahun berjalan. Instansi pemerintah diberikan keleluasaan untuk memilih satu atau lebih dari empat tema yang akan diangkat sebagai fokus Reformasi Birokrasi Tematik. Dalam menetapkan tema, instansi pemerintah perlu berangkat dari *evidence* berupa data yang kuat dan relevan (*evidence based policy*). Data merupakan komponen penting pada tahap ini karena data tersebut akan ditransformasikan menjadi informasi yang dapat digunakan sebagai dasar penetapan tema. Data yang digunakan dapat berupa data primer maupun sekunder, baik dari internal maupun eksternal instansi pemerintah.

Metode yang digunakan adalah melalui evaluasi terhadap kinerja diinginkan yang dibandingkan dengan kinerja *existing*. Setelah melakukan identifikasi terhadap kinerja yang diinginkan dengan kinerja *existing* yang ada, maka selanjutnya adalah memperhatikan *gap* yang muncul dari kedua kinerja/kondisi tersebut. Keberhasilan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik tidak terlepas dari kemampuan instansi pemerintah dalam mengenali adanya permasalahan kesenjangan antara kinerja yang sudah ada dengan kinerja yang akan dicapai dalam Reformasi Birokrasi Tematik. Reformasi Birokrasi Tematik merupakan strategi baru dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020–2024 yang memiliki waktu pelaksanaan hingga tahun 2024. Dengan waktu yang terbatas, ditetapkan beberapa ketentuan sebagai berikut:



Reformasi Birokrasi Tematik merupakan strategi baru dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020–2024. Dengan waktu yang terbatas, ditetapkan tema pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik Nasional yaitu:

1. Reformasi Birokrasi Penanggulangan Kemiskinan

Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan multi-sektor. Tantangan yang dihadapi dalam penanggulangan kemiskinan adalah besarnya anggaran terkait penanggulangan kemiskinan belum memberikan dampak signifikan pada besaran penurunan kemiskinan. Berbagai program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan selama ini belum menjangkau target yang tepat. Dengan adanya target kemiskinan 7% pada 2024 dan target kemiskinan ekstrem menjadi 0% pada 2024, maka diperlukan kolaborasi dan sinergi program penanggulangan kemiskinan terkait dengan data, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan kondisi internal dan eksternal.

2. Reformasi Birokrasi Peningkatan Investasi

Investasi menjadi katalisator pada Pembangunan Nasional serta mendukung pencapaian nilai positif dalam Produk Domestik Bruto (PDB). Seiring dengan kenaikan investasi, maka PDB pun akan meningkat, begitu pun sebaliknya. Berbagai tantangan dalam peningkatan investasi masih dihadapi. Reformasi Birokrasi Tematik peningkatan investasi ini berperan dalam mewujudkan kondisi iklim investasi yang kondusif sehingga memiliki daya saing masuknya investasi dengan memperkuat penerapan *omnibus law* dan meningkatkan indeks daya saing (*competitiveness index*). Reformasi Birokrasi mengintervensi dan memperbaiki aspek tata kelola peningkatan investasi melalui perbaikan proses bisnis, perbaikan data, perbaikan regulasi/kebijakan, reformulasi program/kegiatan sehingga lebih tepat sasaran.

3. Reformasi Birokrasi Digitalisasi Administrasi Pemerintahan

Perubahan lingkungan global yang tidak terprediksi dan berciri VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity*) menuntut birokrasi bekerja secara *agile, adaptive* dan cepat. Selain tuntutan global, kesadaran masyarakat akan pentingnya percepatan dan kemudahan pelayanan publik menjadi perhatian utama masyarakat. Peningkatan Digital Kultur diartikan sebagai pencapaian birokrasi yang memiliki *mindset* baru bahwa prioritas kerja adalah pada hasil (*outcome*), mekanisme kerja dapat dilakukan secara fleksibel dalam konteks ruang dan waktu, serta jangkauan kolaborasi yang menembus sekat-sekat organisasi maupun hierarki. Digital Kultur tersebut dapat berjalan dengan difasilitasi platform "*smart ASN*" yang sedang dibangun oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sedangkan Digital Kompetensi diartikan untuk pencapaian peningkatan pengetahuan dan *skill* yang baru agar tetap berfungsi di tengah disrupsi teknologi dan iklim digital yang bercirikan VUCA.

4. Reformasi Birokrasi Percepatan Prioritas Aktual Presiden

Reformasi Birokrasi Percepatan Prioritas Aktual Presiden berfokus pada penguatan tata kelola birokrasi merespons dan mengawal hal-hal mendesak sesuai arahan Presiden, sehingga dapat memitigasi risiko yang berdampak serius pada masyarakat. Percepatan prioritas aktual Presiden bersifat dinamis dan bias berubah setiap tahunnya menyesuaikan dengan arahan Presiden. Adapun prioritas dan aktual Presiden yang harus segera direspon pada tahun 2023 yaitu:

a. Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri (PDN)

Reformasi Birokrasi diarahkan untuk mendorong penggunaan anggaran pemerintah yang efektif (tepat sasaran), efisiensi, serta memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan barang, jasa, dan modal pemerintah. Strategi yang digunakan salah satunya adalah dengan mendominasi *e-katalog* pengadaan barang/jasa dengan produk buatan dalam negeri.

b. Pengendalian Inflasi

Reformasi Birokrasi berfokus pada upaya dan inovasi pemerintah dalam menekan dan mengendalikan laju inflasi daerah. Inflasi merupakan indikator makro perekonomian yang menggambarkan kondisi ekonomi yang dapat dikatakan kurang sehat. Hal ini dikarenakan kenaikan harga-harga barang secara umum berimplikasi pada menurunnya kemampuan daya beli masyarakat. Kemampuan pemerintah untuk menjaga stabilitas harga yang dilakukan dengan memperkuat koordinasi lintas sektor, serta bekerja sama antar daerah dalam menjaga stabilitas pasokan kebutuhan pokok, menjadi salah satu keberhasilan Reformasi Birokrasi.

Dalam rangka terwujudnya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi, maka langkah dan tahapan pelaksanaan reformasi Birokrasi di Kabupaten Nias pada tahun 2023-2024 baik pada tingkat makro dan tingkat mikro mengacu pada *Grand Design* Reformasi Birokrasi. Setiap tahapan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dimaksudkan untuk memberikan dampak penguatan pada langkah berikutnya. Penentuan Tema pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Nias dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut:

NO	TEMA	KONDISI EKSISTING	TARGET	KESESUAIAN PRIORITAS RPJMD	KEPARAHAN MASALAH	DAMPAK TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	POTENSI YANG DIMILIKI	PERCEPATAN KINERJA	NILAI TOTAL
				SKALA 1 – 10 1 = SANGAT TIDAK SESUAI, 10 = SANGAT SESUAI					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1.	Penanggulangan Kemiskinan	16%	16,35%	10	10	10	10	10	50
2.	Digitalisasi Pemerintahan	-	-	8	9	10	10	10	47
3.	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN)	-	-	7	8	10	9	9	43
4.	Peningkatan Investasi	49%	22,50%	8	7	9	9	8	41
5.	Pengendalian Inflasi	-	-	8	7	10	7	8	40

Dari hasil form Penetapan Tema Reformasi Birokrasi Tematik Pemerintah Kabupaten Nias, maka yang menjadi tema dan fokus yang dilaksanakan pada tahun 2023-2024 adalah sebagai berikut :

1. Panggulangan Kemiskinan
2. Digitalisasi Pemerintahan
3. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN)
4. Peningkatan Investasi
5. Pengendalian Inflasi



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Reformasi Birokrasi merupakan kebutuhan instansi pemerintah di tengah dinamika kompleksitas dan tantangan birokrasi yang semakin meningkat. Seiring tingginya tuntutan publik terhadap layanan pemerintah, maka meningkat pula ekspektasi publik terhadap perubahan tata kelola pemerintahan. Arahan Presiden tentang RB berkaitan dengan tiga hal utama, yaitu mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil, birokrasi yang mampu menjamin agar manfaat kebijakan itu dirasakan oleh masyarakat, serta birokrasi yang lincah dan cepat. Tujuan mewujudkan reformasi birokrasi yang berkualitas pada akhirnya diharapkan bermuara pada akselerasi pencapaian Pembangunan Nasional.

Dalam rangka memastikan pengelolaan Reformasi Birokrasi yang efektif, pemerintah perlu untuk menetapkan perencanaan dan tata kelola Reformasi Birokrasi dalam sebuah dokumen perencanaan yang dapat dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pihak dan stakeholder yang berkepentingan. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang terbagi dalam tiga periode *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional, yaitu *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014, 2015-2019, dan 2020-2024. *Road Map* disusun untuk membantu menjabarkan visi misi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Presiden dan Wakil Presiden terpilih tentang Reformasi Birokrasi, sehingga dapat menjadi acuan bagi kementerian/ lembaga/pemerintah daerah dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi secara berkelanjutan pada masing-masing kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah.

Pada akhir periode *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010, upaya reformasi diharapkan telah menghasilkan birokrasi yang berkelas dunia. Semakin berkualitas tata kelola pemerintahan (*governance*), semakin baik pula hasil pembangunan (*development outcomes*). Hal tersebut dapat dilihat dari hasil pembangunan nyata yang manfaatnya dirasakan oleh masyarakat seperti pro pengurangan kemiskinan, pro lapangan pekerjaan, dan berbagai hasil nyata yang bermuara pada kesejahteraan rakyat. Namun, walaupun pelaksanaan Reformasi Birokrasi telah memasuki periode *Road Map* terakhir *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025, hasil yang ditunjukkan masih belum optimal. Beberapa upaya Reformasi Birokrasi masih berfokus pada proses dan belum sepenuhnya berfokus pada manfaat yang secara langsung dirasakan masyarakat.

Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi ini dilakukan untuk menjawab kendala eksisting berupa:

1. Adanya perubahan terhadap *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 Nasional.

Perubahan tersebut memiliki fokus penajaman tujuan dan sasaran, penajaman kegiatan utama yang fokus dan berdampak, fokus pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dan penajaman indikator Reformasi Birokrasi. Pemerintah Kabupaten Nias dimandatkan untuk segera menindaklanjuti perubahan tersebut dan belum memiliki pedoman dalam pelaksanaannya.

2. Masih adanya tata kelola pada Pemerintah Kabupaten Nias yang belum memiliki kualitas tinggi dan memberikan manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat.
Kualitas tata kelola pada Pemerintah Kabupaten Nias yang belum baik dapat menghambat pencapaian dampak Reformasi Birokrasi yang diharapkan dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan.
3. Pemahaman masing-masing perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias dalam pembangunan Reformasi Birokrasi belum seragam.
Persepsi yang berbeda antar perangkat daerah/unit kerja menyebabkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang berbeda-beda.
4. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi masih dilakukan parsial dan belum berfokus pada isu strategis nasional maupun arah Pembangunan Nasional.
Implementasi Reformasi Birokrasi cenderung berjalan masing-masing sehingga belum efektif mendorong hasil pembangunan Reformasi Birokrasi yang diharapkan secara nasional. Program Reformasi Birokrasi tidak mencerminkan upaya yang konkret dan fokus untuk mendorong tercapainya isu strategis nasional dan arah pembangunan nasional.

Secara umum pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dibagi ke dalam dua tingkatan, yaitu Nasional dan Instansional. Pada tingkat Nasional, pelaksanaan Reformasi Birokrasi terdiri atas level makro dan meso. Tingkat pelaksanaan makro mencakup penetapan arah kebijakan Reformasi Birokrasi secara Nasional serta monitoring dan evaluasi pencapaian program-program Reformasi Birokrasi pada level meso dan mikro. Tingkat pelaksanaan meso mencakup pelaksanaan kebijakan Reformasi Birokrasi oleh instansi yang ditetapkan sebagai *leading institution*. Instansi tersebut bertanggung jawab dalam perumusan kebijakan-kebijakan inovatif, menerjemahkan kebijakan makro, mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan tersebut, melakukan monitoring dan evaluasi kemajuan pelaksanaannya, serta menyampaikan laporan hasil evaluasi tersebut.



Adapun tingkatan Instansional, atau disebut juga dengan tingkat pelaksanaan mikro, mencakup implementasi kebijakan/program Reformasi Birokrasi yang telah ditetapkan pada tingkat makro dan meso di masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah serta program inovasi Reformasi Birokrasi yang diperlukan masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah untuk mengakselerasi capaian tujuan dan sasaran strategis Reformasi Birokrasi.

A. STRATEGI LEVEL MAKRO

Strategi level makro adalah arah kebijakan Reformasi Birokrasi 2020–2024 yang telah tertulis dalam Tujuan Reformasi Birokrasi 2020–2024 yaitu Terciptanya Birokrasi yang Bersih, Efektif dan Berdaya Saing Mendorong Pembangunan Nasional dan Pelayanan Publik. Untuk mempercepat terwujudnya profil birokrasi tersebut, maka strategi Reformasi Birokrasi diarahkan kepada dua hal, yaitu:

- 1) Mendorong Percepatan Digitalisasi Birokrasi; serta
- 2) Melaksanakan Reformasi Birokrasi Tematik untuk mendorong percepatan penyelesaian isu nasional, khususnya terkait dengan pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi dan administrasi pemerintah.

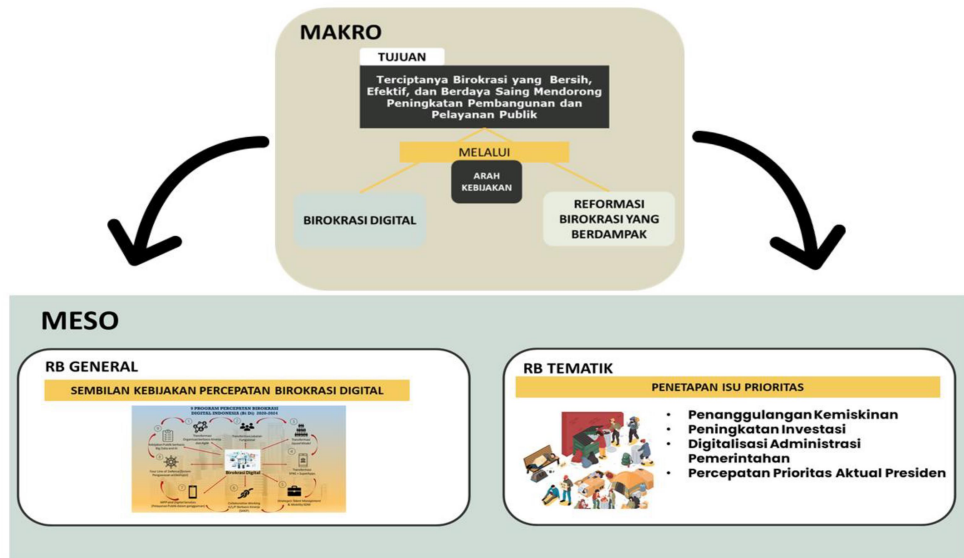
Birokrasi digital diyakini sebagai strategi paling cepat untuk menciptakan pemerintahan yang lebih lincah, responsif, dan adaptif sehingga mampu mendorong percepatan berbagai program pembangunan nasional, meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih cepat dan mudah, serta menekan terjadinya penyimpangan yang sangat mungkin terjadi apabila dilakukan secara manual tanpa teknologi. Adapun penetapan pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, dan administrasi pemerintah sebagai tema yang diangkat dalam Reformasi Birokrasi Tematik dilakukan dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi nasional pasca Pandemi COVID-19.

B. STRATEGI LEVEL MESO

Strategi pada level meso dilaksanakan untuk memastikan berbagai arahan kebijakan Reformasi Birokrasi level makro yang ditetapkan oleh Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional (TRBN) diterjemahkan ke dalam kegiatan-kegiatan utama yang efektif mencapai tujuan dan sasaran strategis Reformasi Birokrasi.

Sebagaimana arah kebijakan Reformasi Birokrasi Nasional 2020–2024 adalah untuk mempercepat terciptanya birokrasi digital dan mempercepat dampak pelaksanaan Reformasi Birokrasi, maka terdapat dua strategi utama untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut. Pertama, untuk mempercepat terciptanya birokrasi digital maka ditetapkan kebijakan percepatan dalam Reformasi Birokrasi General; kedua, untuk mempercepat dampak pelaksanaan Reformasi Birokrasi maka ditetapkan isu prioritas nasional dalam Reformasi Birokrasi Tematik. Pada Kebijakan percepatan terdapat sembilan kebijakan birokrasi digital yang ditujukan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih lincah, responsif, dan adaptif.

Arah Kebijakan Reformasi Birokrasi Nasional



Terdapat sembilan kebijakan birokrasi digital yang ditetapkan menjadi strategi utama, yaitu:

- 1) Percepatan Transformasi Organisasi Berbasis Kinerja dan *Agile*. Sasaran dari kebijakan ini adalah “Terimplementasikannya Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi”. Melalui implementasi sistem kerja baru, birokrasi yang sangat hierarkis dan mengandalkan struktur yang sangat rigid diharapkan berubah menjadi organisasi yang lebih lincah. Transformasi ini dilakukan dengan memangkas struktur organisasi menjadi dua tingkat (*layer*) serta menghilangkan sekat-sekat yang menghambat koordinasi antar instansi.
- 2) Percepatan Transformasi Jabatan Fungsional. Sasaran dari kebijakan ini adalah “Terwujudnya Percepatan Transformasi Jabatan Fungsional”. Kebijakan ini dilakukan untuk membangun kompetensi pada jabatan fungsional (JF) dan membangun mekanisme kerja pasca penyederhanaan birokrasi. Transformasi Jabatan Fungsional ditujukan agar Jabatan Fungsional lebih berorientasi kepada kinerja output yang mendukung mekanisme kerja *agile organization* yang lebih kolaboratif, fleksibel, dan dinamis baik di dalam satu instansi maupun antar instansi pemerintah untuk memindahkan orientasi ASN dari otoritas dan komando kepada fungsi dan kinerja serta kolaborasi.
- 3) Percepatan Transformasi *Squad Model*. Sasaran dari kebijakan ini adalah “Terimplementasikannya kebijakan sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN”. Melalui sistem kerja baru yang berbasis *squad team*, organisasi diarahkan menjadi organisasi berbasis kinerja, karena seorang ASN dapat bekerja lintas departemen, bahkan lintas instansi sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

- 4) Percepatan Implementasi SPBE melalui Pembangunan *SuperApps*-Layanan Digital Pemerintah Terintegrasi. Sasaran dari kebijakan ini adalah “Terimplementasinya Kebijakan Arsitektur SPBE Nasional” yang menjadi kerangka dasar dalam melakukan keterpaduan layanan digital pemerintah. Untuk mendukung sasaran ini perlu dilakukan transformasi organisasi yang didukung dengan digitalisasi manajemen ASN, hal ini dilakukan agar manajemen kepegawaian dan manajemen kinerja antar instansi dapat terkoneksi satu sama lain. Mengingat masalah yang saat ini terjadi adalah sistem informasi kepegawaian masih tersebar di beberapa kementerian/lembaga, data belum terintegrasi, pemanfaatan data, dan informasi kepegawaian untuk perumusan kebijakan masih minim, dan kapasitas SDM pengelola kepegawaian belum optimal. Untuk itu, keterpaduan dalam pengelolaan manajemen kepegawaian dan manajemen kinerja yang tentunya memerlukan bagi pakai data dan informasi, aplikasi, maupun infrastruktur pendukung yang nantinya dapat berguna sebagai basis data dalam pengelolaan ASN secara nasional melalui sebuah *SuperApps*. Selain itu *SuperApps* tentunya perlu juga dibangun untuk memenuhi kebutuhan sistem informasi dalam rangka kebutuhan keterpaduan layanan digital lainnya, dimana seluruh sistem elektronik di pemerintahan perlu dipetakan dan disatukan sesuai dengan klasifikasi referensinya untuk dimanfaatkan menjadi satu sistem berbagi pakai terintegrasi.
- 5) Percepatan Implementasi Manajemen Talenta dan Mobilitas SDM ASN. Sasaran dari kebijakan ini adalah “Terselenggaranya Manajemen Talenta ASN yang Efektif dan Efisien”. Kebijakan ini dilakukan untuk mendukung mekanisme kerja *agile* yang dapat dilakukan dengan kebijakan talenta dan karir, melalui strategi akuisisi talenta, strategi klasifikasi talenta, penyiapan *talent pool*, strategi mobilitas talenta, strategi pengembangan talenta, strategi retensi talenta dan strategi suksesi yang baik.
- 6) Penguatan Kerja Kolaboratif (*collaborative working*) berbasis kinerja melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sasaran dari kebijakan ini adalah “Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Informasi Kinerja yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah”. Kebijakan ini dilakukan untuk memperkuat sinergitas dan kolaborasi antar lembaga agar pencapaian sasaran Reformasi Birokrasi dapat lebih terasa dampaknya pada pencapaian tujuan/sasaran pembangunan nasional. Melalui SAKIP, setiap kementerian/ lembaga/pemerintah daerah dapat dipastikan dan diukur kontribusi akuntabilitas kinerjanya secara terukur sesuai peran masing-masing dalam pencapaian target-target kinerja prioritas pemerintah yang telah ditetapkan dalam RPJMN/RPJMD, RKP/RKPD. Tiap-tiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang terkait harus saling berkolaborasi dalam pencapaian tujuan/sasaran pembangunan sesuai tugas dan fungsinya sejak fase perencanaan, fase pelaksanaan, dan monitoring dan evaluasi.

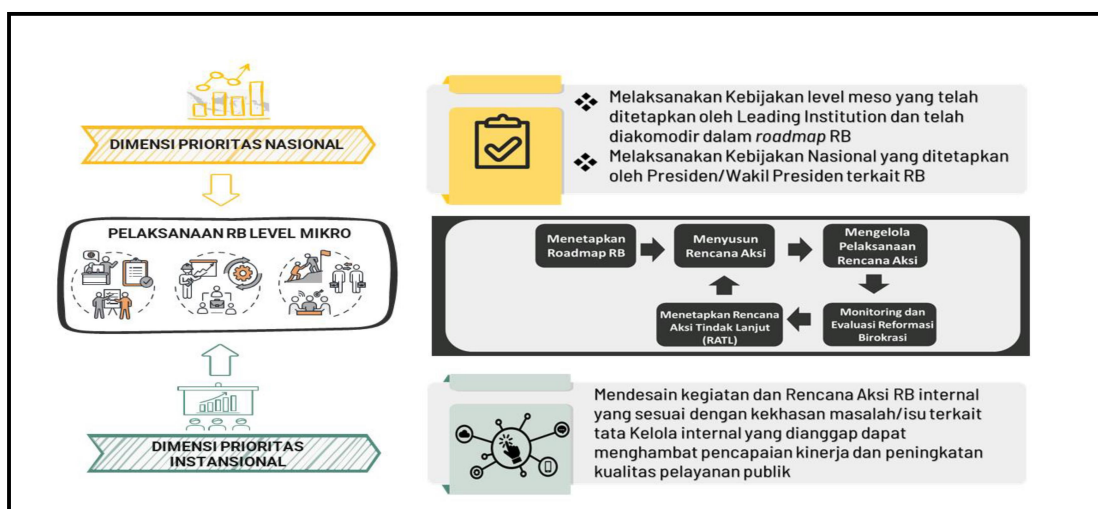
- 7) Pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP) dan MPP *Digital Services*. Kebijakan ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik menjadi lebih prima, cepat, dan efisien melalui penggunaan teknologi informasi yang murah dan mudah diakses oleh masyarakat. Sasaran dari kebijakan ini adalah “Terbangunnya Pelayanan Publik Digital (*Digital Services*)”, yaitu berbagai layanan yang bisa diakses masyarakat melalui dunia digital, sehingga dapat meningkatkan efisiensi waktu, biaya, efektivitas kerja dan transparansi bagi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan swasta.
- 8) Penguatan Pengawasan dengan *four line of defense*. Sasaran dari kebijakan ini adalah “Meningkatnya Kualitas Pengawasan” yang dilakukan oleh berbagai unsur, yaitu pengawasan manajerial secara berjenjang oleh internal instansi, pengawasan fungsional oleh internal dan eksternal instansi, pengawasan oleh masyarakat melalui pengaduan masyarakat, serta optimalisasi tindak lanjut hasil pengawasan untuk perbaikan berkelanjutan. Keempat unsur ini perlu kolaborasi dengan baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan monev tindak lanjut hasil pengawasan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang terintegrasi. Sehingga pelaksanaan dan hasil pengawasan dapat lebih efektif, efisien, dan berdampak pada percepatan pencapaian tujuan, sasaran pembangunan dan instansi serta penurunan praktek penyalahgunaan wewenang, korupsi, kolusi, nepotisme (KKN). Selama ini hasil pengawasan tidak dijadikan bahan untuk perbaikan kebijakan, tata kelola dan kualitas kebijakan (*double loop learning*) secara berkelanjutan (*continuous improvement*). Untuk mencapai birokrasi digital sistem pengawasan perlu diperkuat dengan sinergi dan kolaborasi antar organisasi didukung dengan aparat yang profesional (*internal audit capability model*) dan independensi aparat (*clear flow of authority*), serta menggunakan sistem informasi manajemen pengawasan yang terintegrasi antar instansi pengawasan yang terkait, sehingga sistem pengawasan mampu menjadi peringatan dini (*Early Warning System*) adanya praktik penyalahgunaan wewenang, korupsi, kolusi, nepotisme (KKN).
- 9) Penguatan Kebijakan Publik berbasis bukti dengan *Big Data* dan *Artificial Intelligent*, muara dari pemanfaatan teknologi atau SuperApps adalah penyediaan data secara real time dan mutakhir yang dapat digunakan sebagai basis pengambilan keputusan serta penyusunan kebijakan publik berbasis kecerdasan buatan. Sasaran dari kebijakan ini adalah “Meningkatnya Kualitas Kebijakan dan Regulasi”, yaitu setiap kebijakan publik dan regulasi yang akan diterbitkan oleh instansi harus berdasarkan pada bukti dari sumber data relevan dan valid sehingga kualitas kebijakan yang akan diterbitkan dan diimplementasikan menjadi lebih efektif karena dapat menjadi solusi dalam setiap isu strategis yang menjadi latar belakang terbitnya kebijakan dan regulasi. Dalam upaya mewujudkan sasaran ini diperlukan peningkatan kualitas data dan informasi pemerintah sehingga tentunya diperlukan penguatan sistem statistik nasional, baik dalam penyelenggaraan statistik dasar maupun statistik sektoral.

Selain sembilan kebijakan birokrasi digital tersebut, terdapat kebijakan percepatan lain yang perlu dipastikan keberlanjutannya. Kebijakan-kebijakan percepatan ini diupayakan agar dapat berjalan secara bersamaan sehingga fokus sasaran strategis Reformasi Birokrasi dapat tercapai secara keseluruhan, sesuai dengan fokus arahan dan sasaran *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 setelah penajaman. Hasil Serta *Output* yang diharapkan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2022-2024 Level Meso”. Selanjutnya, pelaksanaan setiap kegiatan utama dilakukan oleh kementerian/lembaga yang menjadi *leading institution*. *Leading institution* adalah kementerian/ lembaga yang memiliki peran, kewenangan, dan tanggung jawab menetapkan kebijakan dan standar pada area-area yang terkait dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Lebih lanjut, kementerian/ lembaga yang memiliki peran sebagai *leading institution* dalam mengawal area yang terkait Reformasi Birokrasi dijelaskan pada bagian selanjutnya.

C. STRATEGI LEVEL MIKRO

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada level mikro harus didasari pada dua dimensi, yaitu dimensi Prioritas Nasional dan dimensi Prioritas Instansional. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi level mikro yang didasari Prioritas Nasional berarti pelaksanaan Reformasi Birokrasi mikro harus sesuai dan selaras dengan seluruh kebijakan nasional terkait Reformasi Birokrasi yang telah ditetapkan dalam kebijakan di level makro dan meso yang bersifat *mandatory*. Sedangkan pelaksanaan yang didasari pada dimensi Prioritas Instansional adalah pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk mengakomodir kebutuhan untuk pemecahan masalah tata kelola internal kementerian/ lembaga/pemerintah daerah yang masih menjadi kendala dalam penyediaan pelayanan publik yang berkualitas dan peningkatan kinerja yang berkelanjutan. Strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi level mikro akan dimonitor dan dievaluasi serta menjadi bagian dari evaluasi Reformasi Birokrasi. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi level mikro dapat diilustrasikan dalam gambar berikut:

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Level Mikro



Terdapat lima tahapan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada level mikro yaitu:

- 1) Menetapkan *Road Map* Reformasi Birokrasi;
- 2) Menyusun rencana aksi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- 3) Mengelola pelaksanaan rencana aksi;
- 4) Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi; serta
- 5) Menetapkan Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) yang akan menjadi masukkan penyusunan rencana aksi tahun berikutnya.

Tahap pertama, yaitu menetapkan *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah tahapan yang paling penting dan menentukan arah pelaksanaan Reformasi Birokrasi setiap kementerian/lembaga/ pemerintah daerah. Hal-hal minimal yang perlu ditetapkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah antara lain:

- 1) Isu strategis terkait tata kelola pemerintah baik Nasional maupun Instansional;
- 2) Capaian Reformasi Birokrasi Instansional;
- 3) Tujuan dan sasaran strategis Reformasi Birokrasi Instansional;
- 4) Strategi dan program Reformasi Birokrasi Instansional baik general maupun tematik; serta
- 5) Manajemen/pengelolaan Reformasi Birokrasi Instansional.

Bagi pemerintah daerah yang telah memiliki *Road Map* Reformasi Birokrasi, perlu menyesuaikan dengan *Road Map* Reformasi Birokrasi setelah penajaman ini. Kemudian untuk memastikan kebijakan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi dapat dilaksanakan, maka kementerian/ lembaga/pemerintah daerah perlu menyelaraskan *Road Map* Reformasi Birokrasi dengan rencana jangka menengah (RPJM/Renstra) dan memastikan kebijakan yang ditetapkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi mendapatkan alokasi pembiayaan.

Tahap kedua, yaitu menyusun rencana aksi adalah tahapan untuk mengoperasionalkan strategi dan program yang telah ditetapkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi instansi. Rencana aksi minimal berisi:

- 1) Rincian kegiatan;
- 2) Indikator *output* dari rincian kegiatan;
- 3) Target;
- 4) Waktu pelaksanaan; serta
- 5) Penanggung jawab.

Tahap ketiga, yaitu mengelola pelaksanaan rencana aksi, yaitu pelaksanaan dan pemantauan pelaksanaan rencana aksi. Setelah rencana aksi disusun dan penanggung jawab kegiatan ditetapkan, maka Tim atau Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Internal *Strategic Transformation Unit* (STU) perlu memastikan pelaksanaannya melalui monitoring secara berkala. Pelaksanaan rencana aksi dilakukan dan menjadi tanggung jawab unit/perangkat daerah terkait serta dikoordinasikan oleh Tim atau Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Internal yang menangani hal tersebut.

Tahap keempat, yaitu monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi yang dilakukan untuk:

- 1). Memantau keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan Mengukur ketercapaian target pada indikator sasaran dan tujuan Reformasi Birokrasi serta indikator lain yang terkait Reformasi Birokrasi;

- 2). Menilai keberhasilan/efektivitas rencana aksi;
- 3). Menilai kualitas pengelolaan Reformasi Birokrasi internal. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi dilakukan secara berkala minimal setiap 6 (enam) bulan, yang dilakukan secara internal oleh masing-masing kementerian/ lembaga/pemerintah daerah.

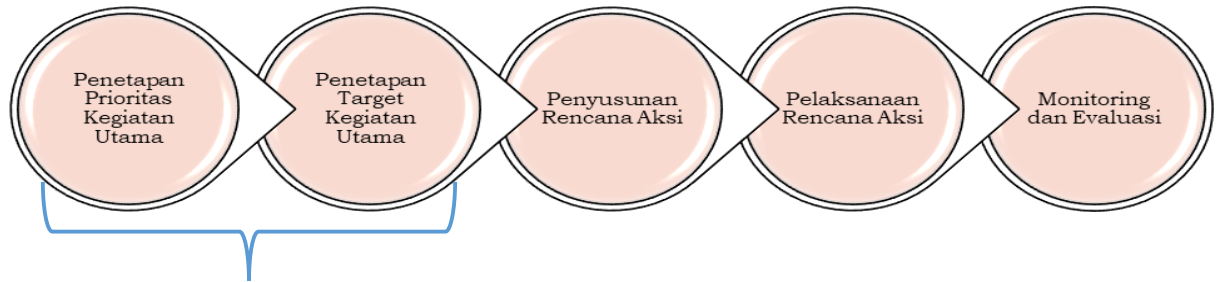
Tahap kelima, yaitu melakukan tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan sebelumnya. Pada tahap ini kementerian/lembaga/pemerintah daerah telah mendapatkan gambaran keberhasilan maupun ketidakberhasilan Reformasi Birokrasi dan telah mengidentifikasi hal-hal yang perlu segera disempurnakan serta melakukan tindak lanjut perbaikan.

Pembangunan Reformasi Birokrasi General berfokus pada perbaikan sistem dan tata kelola internal pada instansi pemerintah. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General diharapkan agar fokus dan percepatan sasaran strategis Reformasi Birokrasi dapat tercapai secara keseluruhan, sesuai dengan fokus arahan dan sasaran *Road Map* Reformasi Birokrasi setelah penajaman. Untuk mewujudkan hal tersebut di level mikro, terdapat beberapa tahapan dalam Pembangunan Reformasi Birokrasi General, dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi internal. Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi, dengan tahapan sebagai berikut :

1. Penetapan Prioritas Kegiatan Utama.
 Sesuai dengan *Road Map* Reformasi Birokrasi, Pemerintah Kabupaten Nias (level mikro) melaksanakan Reformasi Birokrasi dalam dua dimensi, yaitu:
 - a. Dimensi Prioritas Nasional yang telah ditetapkan oleh level makro dan meso berupa Kegiatan Utama dan telah ditetapkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional, serta bersifat *mandatory*.
 - b. Dimensi Instansional merupakan Kegiatan Utama inisiatif Pemerintah Kabupaten Nias (di luar dari Kegiatan Utama *mandatory*) yang dapat memiliki *leverage* (percepatan) terhadap pencapaian Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi.
2. Penetapan Target Kegiatan Utama.
 Target Kegiatan Utama digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Nias. Penetapan Target ini perlu memperhatikan target minimal *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional.

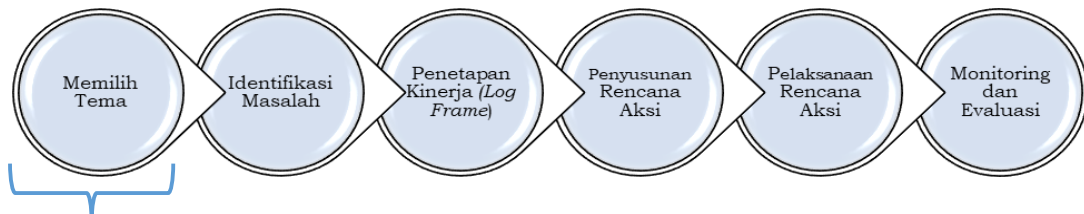
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada level mikro mengacu pada kebijakan Reformasi Birokrasi yang telah ditetapkan di level makro dan meso. Hal ini telah tergambar pada *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 dengan penajaman yang mengarahkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi ke dalam dua fokus, yaitu Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik. Modul Pembangunan Reformasi Birokrasi ini akan menjadi panduan dalam Pembangunan Reformasi Birokrasi di level mikro yang mencakup Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik. Secara ringkas terdapat beberapa tahapan dalam Pembangunan Reformasi Birokrasi Mikro, baik Reformasi Birokrasi General maupun Reformasi Birokrasi Tematik. Tahapan tersebut dapat diilustrasikan dalam gambar berikut:

TAHAPAN PEMBANGUNAN REFORMASI BIROKRASI GENERAL



Penyusunan *Road Map*
Reformasi Birokrasi

TAHAPAN PEMBANGUNAN REFORMASI BIROKRASI TEMATIK



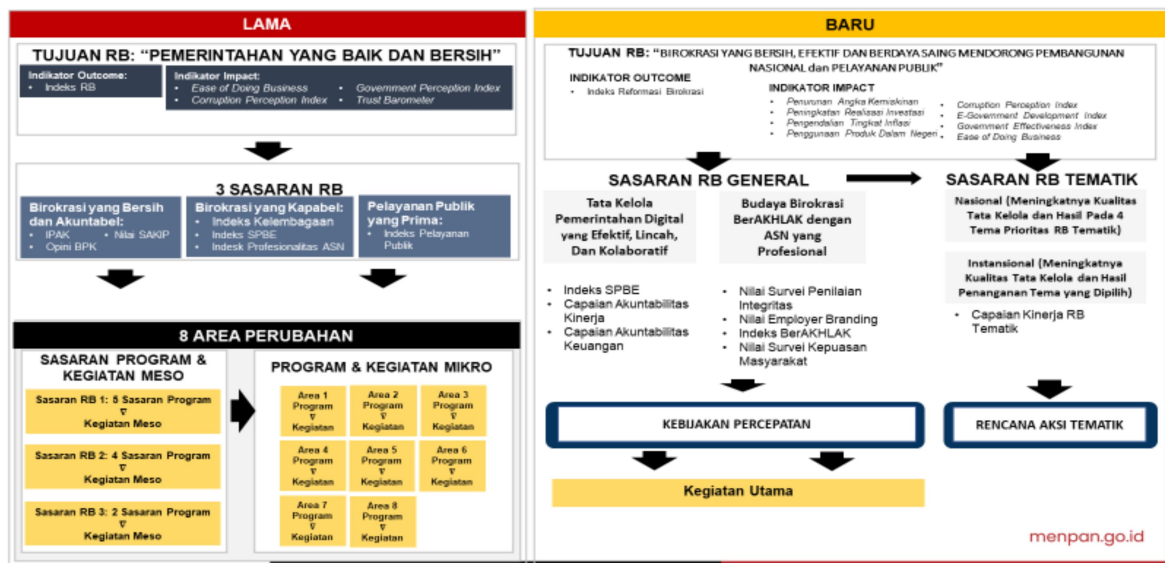
Penyusunan *Road Map*
Reformasi Birokrasi

1.2. PENAJAMAN *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI

Hasil evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi masih menunjukkan adanya *gap* antara kondisi capaian terkini dengan kondisi yang diharapkan pada akhir tahun 2025. *Gap* tersebut dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi perencanaan dan sisi pelaksanaan. Pada sisi perencanaan, konteks *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020, belum optimal mengakselerasi tata kelola pemerintahan yang mendorong percepatan pencapaian pembangunan nasional maupun daya saing global. Pada sisi pelaksanaannya, pengelolaan Reformasi Birokrasi di level nasional maupun instansional belum secara optimal dirasakan masyarakat, misalnya terkait kinerja konkret bagi masyarakat, pelayanan publik, dan pengurangan praktek Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN). Perencanaan dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi juga masih dilakukan secara parsial oleh masing-masing Instansi Pemerintah sehingga belum berfokus pada isu strategis nasional serta arah Pembangunan Nasional. Sehingga dengan kondisi tersebut perlu dilakukan penajaman terhadap *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024. Penajaman *Road Map* ini juga untuk membantu mempercepat pencapaian sasaran pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 tentang Reformasi Birokrasi.

Gambaran fokus penajaman tujuan, sasaran, dan indikator dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 setelah penajaman dibandingkan dengan *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebelum penajaman diilustrasikan dalam gambar berikut:

Perbandingan Kerangka Pelaksanaan Reformasi Birokrasi



Sumber: Kementerian PAN & Reformasi Birokrasi RI

Secara khusus, aspek utama yang perlu ditajamkan dari *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2023–2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Substansi tujuan, sasaran, dan indikator keberhasilan Reformasi Birokrasi dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional belum sepenuhnya mampu menjawab isu strategis nasional dan internasional terkait dengan pembangunan nasional, daya saing pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan isu-isu strategis yang perlu dijawab dengan akselerasi Reformasi Birokrasi.
- 2) Sasaran program pembangunan bersifat lintas sektor dan lintas Instansi Pemerintah (*cross cutting issue*), sehingga memerlukan strategi Reformasi Birokrasi untuk mengorkestrasi percepatan pencapaian sasaran lintas sektor dan instansi. Kebijakan-kebijakan Reformasi Birokrasi diharapkan menjadi kebijakan kunci yang paling berkontribusi terhadap sasaran strategis dan tujuan Reformasi Birokrasi.
- 3) Pengelolaan Reformasi Birokrasi yang fokus untuk percepatan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Reformasi Birokrasi dengan penyelesaian terhadap akar masalah melalui perbaikan sistem dan manajemen internal, serta isu prioritas antara lain kemiskinan dan investasi.
- 4) Kolaborasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang cenderung silo (*fragmented*) khususnya antara instansi pengampu indeks dapat berdampak pada pengukuran Reformasi Birokrasi yang tidak efektif, sehingga dibutuhkan indikator Reformasi Birokrasi yang paling relevan dan signifikan untuk mengukur keberhasilan Reformasi Birokrasi, sehingga diperlukan penyederhanaan, sinergi dan integrasi antar indikator kinerja yang sejenis.

Pada hakikatnya, *Road Map* Reformasi Birokrasi harus mampu menjabarkan visi, misi, dan prioritas pembangunan nasional dan mampu menjawab isu strategis dalam tata kelola pemerintahan yang menghambat pencapaian kebijakan prioritas nasional. Mengacu pada beberapa permasalahan yang telah dijabarkan sebelumnya, maka perlu dilakukan penajaman terhadap *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2020–2024 dengan tujuan, yaitu:

- 1) Mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran strategis Reformasi Birokrasi
Penajaman *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020–2024 bertujuan untuk mengakselerasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi sehingga tujuan dan sasaran strategis Reformasi Birokrasi dapat dirasakan secara signifikan oleh masyarakat. Capaian Reformasi Birokrasi pada dua periode *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebelum penajaman menunjukkan bahwa upaya perbaikan tata kelola telah meningkat di kementerian/lembaga/pemerintah daerah, namun upaya tersebut belum signifikan dirasakan oleh masyarakat dan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berkelas dunia. Selama ini pelaksanaan Reformasi Birokrasi masih berfokus pada upaya untuk melakukan perbaikan internal masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah, selain itu *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebelum penajaman disusun sebelum munculnya pandemi dan belum mengakomodir tujuan utama *Road Map* pada *Grand Design*. Melalui penajaman *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 ini, dapat fokus pada perbaikan internal serta berdampak untuk mengungkit pencapaian agenda Pembangunan Nasional.
- 2) Mendapatkan *Road Map* Reformasi Birokrasi yang lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan.
Penajaman bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, adaptif, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi tidak hanya berfokus pada menyelesaikan permasalahan umum dalam tata kelola pemerintahan, namun juga untuk merespon permasalahan yang nyata terjadi di lapangan. Berbagai perubahan lingkungan strategis dalam skala nasional maupun global juga harus menjadi dasar dalam menetapkan arah kebijakan Reformasi Birokrasi. Kebijakan Reformasi Birokrasi perlu disesuaikan dengan kebutuhan birokrasi menghadapi kondisi lingkungan yang disruptif, tidak terprediksi, tidak menentu, dan berpengaruh terhadap tatanan kehidupan masyarakat.
- 3) Mendapatkan *Road Map* Reformasi Birokrasi yang mampu menciptakan integrasi dan orkestrasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang sinergis dalam pemerintahan.
Penajaman *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020–2024 dilakukan untuk mengurangi silo (*fragmented*) antar Instansi Pemerintah. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi memerlukan kolaborasi yang baik dari seluruh pihak yang terkait, baik dari unsur pemerintah maupun luar pemerintah. Kementerian/lembaga yang menjadi koordinator pengampu (*leading institution*) pelaksanaan Reformasi Birokrasi juga perlu didorong untuk mewujudkan ukuran-ukuran yang lebih logis, holistik, berorientasi hasil, serta tidak duplikasi. Berkaitan dengan hal tersebut, melalui penajaman *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020–2024, seluruh Instansi Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan sinergitas untuk mendorong pencapaian tujuan Pembangunan Nasional.

1.3 PENAJAMAN TERHADAP TUJUAN, SASARAN, DAN INDIKATOR

Umpan balik dari berbagai pihak atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi selama beberapa tahun terakhir adalah bahwa upaya Reformasi Birokrasi yang telah dilakukan belum berdampak langsung pada perbaikan berbagai capaian indikator nasional dan internasional baik yang terkait dengan Pembangunan Nasional, daya saing pemerintahan, maupun pemberantasan korupsi. Salah satu hal yang dianggap berkontribusi pada kondisi tersebut adalah karena tujuan maupun sasaran strategis Reformasi Birokrasi tidak secara langsung dikaitkan dengan berbagai indikator terkait. Meskipun pada *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebelum penajaman, indikator-indikator tata kelola pemerintahan telah ditetapkan menjadi indikator tujuan Reformasi Birokrasi, namun program dan upaya yang dilakukan tidak mencerminkan upaya yang konkret dan fokus untuk mencapai indikator tersebut. Atas dasar hal tersebut, maka salah satu fokus dalam penajaman *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 ini adalah mempertajam tujuan, sasaran, dan indikatornya agar lebih relevan dan berdampak terhadap Pembangunan Nasional, serta lebih mencerminkan penyelesaian atas berbagai isu dan permasalahan khas birokrasi Indonesia.

Secara umum, tujuan dan sasaran akan diarahkan untuk menjawab isu tata Kelola pemerintahan yang belum berkontribusi signifikan dalam capaian Pembangunan Nasional, masih adanya tindak pidana korupsi yang terjadi, kualitas pelayanan publik yang belum prima, serta ketertinggalan dengan birokrasi negara lain. Strategi yang akan digunakan untuk menjawab isu tersebut adalah dengan mendorong terciptanya birokrasi digital yang lincah, kolaboratif dan akuntabel, didukung dengan budaya birokrasi yang berorientasi kinerja dan pelayanan, serta individu ASN yang lebih profesional.

1.3.1. Tujuan Reformasi Birokrasi

Tujuan yang terdapat pada *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebelum penajaman adalah “Pemerintahan yang baik dan bersih”, sedangkan tujuan dari *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 setelah penajaman adalah “Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik”. Tujuan Reformasi Birokrasi harus diarahkan untuk dapat menjawab isu utama Reformasi Birokrasi yang berkembang beberapa tahun terakhir. Isu tersebut adalah terkait dampak dan kontribusi Reformasi Birokrasi pada Pembangunan Nasional, peningkatan kualitas pelayanan publik, penciptaan pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan daya saing Indonesia dibanding dengan negara lainnya.

1.3.2. Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi

Berkaitan dengan sasaran, pada *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebelum penajaman terdapat tiga sasaran strategis Reformasi Birokrasi, yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan pelayanan publik yang prima. Pada *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 setelah penajaman, sasaran strategis Reformasi Birokrasi disederhanakan menjadi dua aspek yaitu, aspek *hard element* adalah bagian dari kerangka logis Reformasi Birokrasi yang merupakan berbagai perangkat yang terkait dengan akuntabilitas, kelembagaan, tatalaksana, cara kerja, strategi, serta sistem dan regulasi dalam pemerintahan dan aspek *soft element* berbagai perangkat yang terkait dengan budaya dan sumber daya manusia. Adapun sasaran strategis Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut.

- 1) Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif sebagai aspek *hard element*. Sasaran ini berkaitan dengan tata kelola pemerintahan (*governance*) yang mampu mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya melalui penciptaan hasil/dampak yang nyata bagi masyarakat dan pembangunan nasional, dengan kemampuan untuk selalu bersinergi dan cepat beradaptasi dalam merespon perubahan lingkungan strategis yang berciri VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity*). Strategi utama untuk menciptakan tata kelola pemerintahan ini adalah dengan menjadikan teknologi informasi dan komunikasi sebagai instrumen utama dalam proses internal tata Kelola pemerintah yang baik dan penyediaan pelayanan publik yang berkualitas.
- 2) Terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional sebagai aspek *soft element*. Sasaran ini berkaitan dengan budaya birokrasi yang mengedepankan nilai orientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, kompeten, loyal, adaptif, dan kolaboratif dalam pelaksanaan tugas menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas dan mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional, serta diisi dengan ASN yang memiliki komitmen, kemampuan, motivasi, perilaku, kinerja dan daya saing yang tinggi.

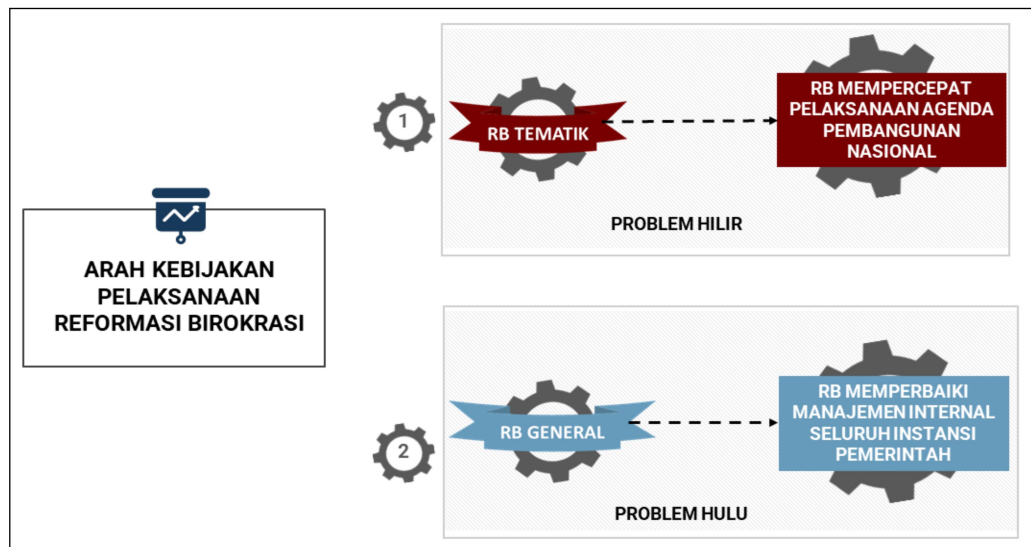
1.4. PENAJAMAN TERHADAP KEGIATAN UTAMA

Pada *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebelum penajaman, kegiatan yang dilakukan diarahkan pada perbaikan berbagai aspek pemerintahan yang dikenal dengan delapan area perubahan. Delapan area perubahan ini meliputi Manajemen Perubahan, Deregulasi Kebijakan, Penataan Organisasi, Penataan Tata laksana, Penataan SDM Aparatur, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Pada *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020–2024 setelah penajaman, kegiatan Reformasi Birokrasi tidak akan dikaitkan dengan delapan area perubahan melainkan akan berfokus pada pelaksanaan Kegiatan Percepatan (*acceleration*). Kegiatan percepatan adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya birokrasi digital serta kegiatan-kegiatan Reformasi Birokrasi lain yang sudah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya yang perlu dipastikan keberlanjutannya.

1.5. PENAJAMAN TERHADAP FOKUS PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Ekspektasi Presiden, masyarakat, dan dunia usaha atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah menciptakan hasil/dampak yang dapat dirasakan secara nyata, cepat, dan tepat menyentuh isu/permasalahan faktual. Reformasi Birokrasi juga diharapkan tidak hanya mempercepat penyelesaian isu hulu, yaitu masalah-masalah tata kelola pemerintahan yang terjadi di internal birokrasi, namun juga isu hilir yaitu masalah-masalah yang muncul di masyarakat dan terkait dengan agenda prioritas Pembangunan Nasional. Atas dasar hal tersebut, *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020–2024 setelah penajaman mengarahkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi ke dalam dua fokus yang disebut dengan “*double track*”, yaitu fokus penyelesaian isu hulu yang disebut dengan Reformasi Birokrasi General, serta fokus penyelesaian isu hilir yang disebut dengan Reformasi Birokrasi Tematik.

Double Track Fokus
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi



Sumber: Kementerian PAN & Reformasi Birokrasi RI

1.6. PENAJAMAN TERHADAP UKURAN KEBERHASILAN ATAU INDIKATOR REFORMASI BIROKRASI

Penajaman terhadap ukuran keberhasilan atau indikator Reformasi Birokrasi dilakukan dengan menetapkan ukuran keberhasilan yang relevan untuk menggambarkan tujuan dan sasaran strategis Reformasi Birokrasi serta menyinergikan beberapa indikator yang beririsan.

Untuk menunjukkan efektivitas Reformasi Birokrasi dalam mengungkit Pembangunan Nasional dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, maka ditentukanlah indikator tujuan yang berkualitas dampak (*impact*) yaitu terkait peningkatan capaian beberapa indikator Pembangunan Nasional dan daya saing global, dan indikator sasaran yang berkualitas hasil (*outcomes*) yaitu terkait hasil (*outcomes*) dari perbaikan tata kelola pemerintahan (*governance*) pada tingkat *intermediate outcomes* dan *immediate outcomes* pada aspek-aspek kunci birokrasi. Indikator yang digunakan merupakan ukuran yang dianggap paling reliabel dan relevan untuk mengukur tingkat implementasi dan hasil, bukan sekedar mengukur pemenuhan dan aspek administratif semata. Penajaman indikator juga dilakukan dengan mendorong sinergi, integrasi, dan penyederhanaan berbagai ukuran keberhasilan untuk menghindari adanya duplikasi pengukuran pada lebih dari satu ukuran keberhasilan dan mendorong ukuran yang berkualitas hasil, bukan proses yang rigid. Sehingga Indikator Reformasi Birokrasi dapat memenuhi indikator yang *specific, measurable, achievable, relevant, and time-bound* (SMART) dan berorientasi pada hasil (*outcome*).

Beberapa permasalahan terkait implementasi indikator Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut:

- 1) Belum terdapat peta keterkaitan antar komponen indikator indeks;
- 2) Masih terdapat redudansi atau duplikasi antar komponen indikator indeks;
- 3) Komponen indikator indeks masih banyak berfokus pada proses yang rigid;

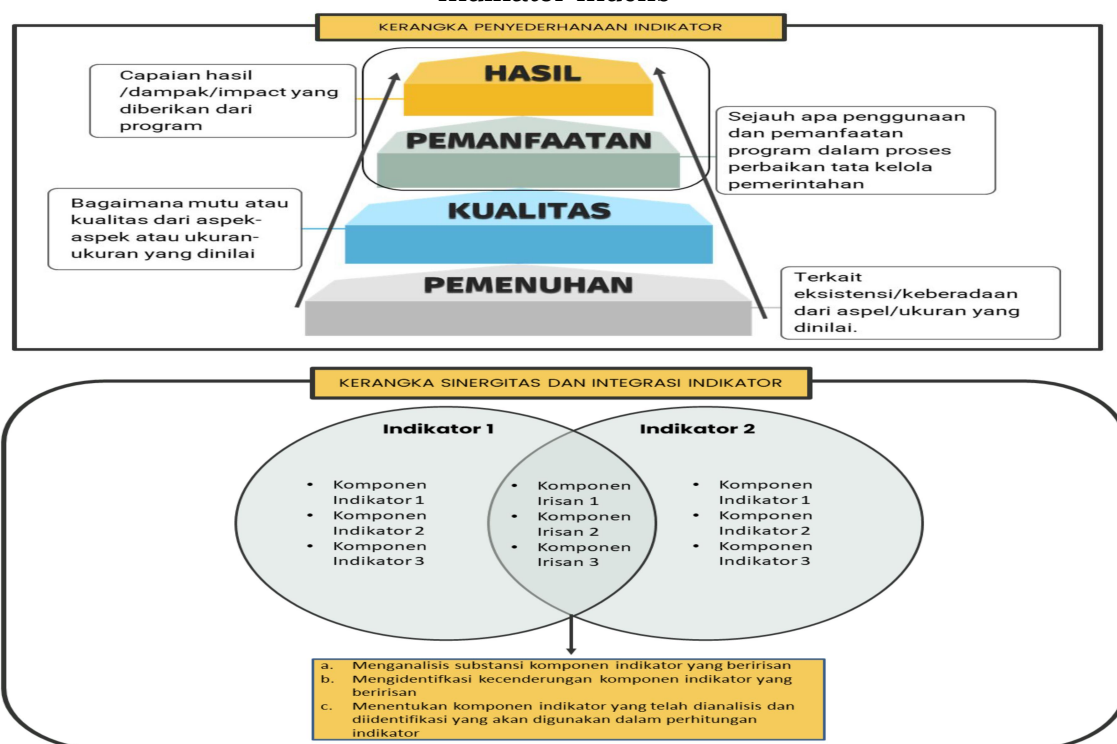
- 4) Metode pengumpulan data indikator indeks kepada masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah menggunakan metode *self-assessment* dengan aplikasi masing-masing yang waktunya bersamaan;
- 5) Metode penyampaian informasi hasil kepada masing-masing instansi yang dinilai belum terstandar.

Sinergi, integrasi, dan penyederhanaan indikator dilakukan dengan menganalisis komponen-komponen indikator indeks antara lain terkait beberapa hal, yaitu:

- 1) Relevansinya dengan hasil yang akan diukur,
- 2) Tidak fokus pada proses tetapi pada hasil,
- 3) Penyederhanaan pengukuran,
- 4) Sinergi/integrasi komponen yang memiliki kesamaan atau irisan.

Pelaksanaan penyederhanaan, sinergi, dan integrasi dilakukan oleh kementerian/lembaga pengampu indikator dengan melibatkan Kementerian PANReformasi Birokrasi. Pola sinergi, integrasi, dan penyederhanaan dapat diilustrasikan dalam gambar berikut:

Pola Sinergitas, Integrasi, dan Penyederhanaan Indikator Indeks



Sumber: Kementerian PAN & Reformasi Birokrasi RI

Berbagai indeks yang digunakan untuk mengukur keberhasilan Reformasi Birokrasi pada tingkat meso dan mikro dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020–2024 sebelum dan setelah penajaman terlihat dalam tabel berikut ini :

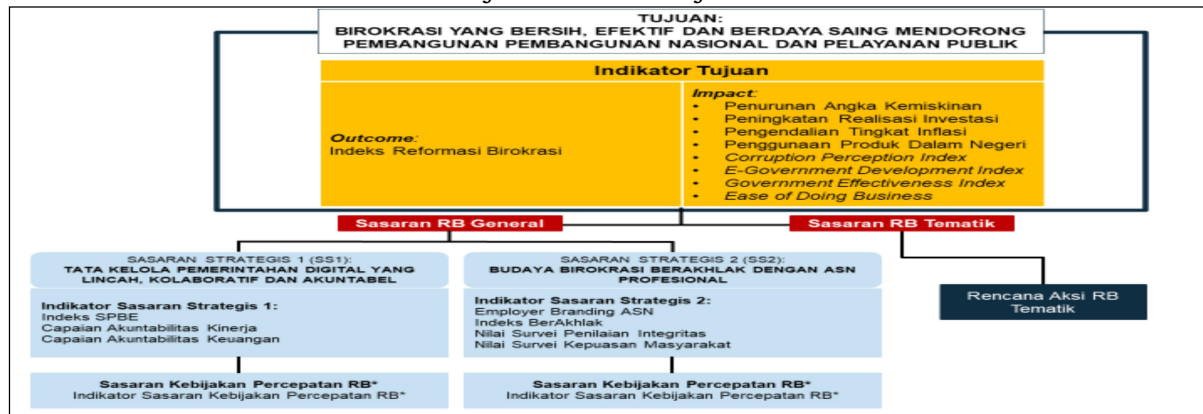
Penggunaan Indikator Hasil Antara *Road Map* Reformasi Birokrasi
sebelum penajaman pada *Road Map* Reformasi Birokrasi
setelah penajaman

Area Perubahan	Indikator Hasil Antara Dalam <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi sebelum penajaman	Kondisi sampai 2021	Dalam <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi 2020-2024 setelah Penajaman
[1]	[2]	[3]	[4]
Manajemen Perubahan	1. Indeks Kepemimpinan Perubahan	Belum tersedia	Indikator 1 tidak dilanjutkan
Penataan Peraturan Perundangan/ Deregulasi Kebijakan	2. Indeks Reformasi Hukum 3. Indeks Kualitas Kebijakan	Sudah tersedia	Indikator 2 dan 3 dilanjutkan, disinergikan, dan disederhanakan, untuk mengukur
Penataan Organisasi/ Kelembagaan	4. Indeks Kelembagaan	Belum tersedia	isinergikan dengan Indikator 5
Penataan Tatalaksana	5. Indeks SPBE 6. Indeks Pengawasan Kearsipan 7. Indeks Pengelolaan Keuangan 8. Indeks Pengelolaan Aset 9. Indeks Pemerintahan Daerah	Indikator 5 s.d 8 sudah tersedia Indikator 9 belum tersedia	Indikator 5 dilanjutkan Indikator 6 s.d 8 dilanjutkan, disederhanakan dan disinergikan ke dengan Indikator 5 Indikator 9 tidak dilanjutkan
Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Penguatan Akuntabilitas	10. Indeks Profesionalitas ASN 11. Indeks Sistem Merit 12. Indeks Tata Kelola Manajemen ASN	Indikator 10 s.d 12 sudah tersedia	Indikator 10 s.d 12 diintegrasikan ke dalam Indikator 11
Penguatan Akuntabilitas	13. Nilai SAKIP 14. Indeks Perencanaan Pembangunan	Indikator 13 sudah tersedia Indikator 14 sudah tersedia	Indikator 13 dan 14 dilanjutkan, disinergikan, disederhanakan
Pengawasan	15. Maturitas SPIP 16. Kapabilitas APIP (IACM) 17. Opini BPK 18. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang & Jasa 19. Indeks Persepsi Anti Korupsi	Indikator 15–19 sudah tersedia	Indikator 15 dilanjutkan, disinergikan dengan Indikator 13 dan 14 Indikator 16 diintegrasikan dengan Indikator 15 Indikator 17 dilanjutkan dan ditambah tindak lanjut rekomendasi hasil audit Indikator 18 dilanjutkan, disederhanakan, disinergikan Indikator 5 Indikator 19 digantikan dengan Nilai hasil Survei Penilaian Integritas
Pelayanan Publik	20. Indeks Pelayanan Publik 21. Tingkat Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik 22. Survei Kepuasan Masyarakat	Indikator 20–22 sudah tersedia	Indikator 20 dan 21 dilanjutkan, disinergikan Indikator 22 dilanjutkan, disempurnakan

Sumber: Kementerian PAN & Reformasi Birokrasi RI

Hal penting lainnya adalah memastikan adanya peta keterhubungan antar indikator dengan kondisi hasil Reformasi Birokrasi yang akan diukur. Oleh karena itu, harus dibangun kerangka logis indikator kinerja Reformasi Birokrasi dengan mengacu pada kerangka logis hasil Reformasi Birokrasi, yang meliputi: Tujuan, Sasaran strategis, Sasaran kebijakan, dan keluaran (*output*) kegiatan utama dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Kerangka Logis Indikator Kinerja setelah Penajaman



Sumber: Kementerian PAN & Reformasi Birokrasi RI

1.7. ISU STRATEGIS REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2020–2024

Reformasi Birokrasi menghadapi beberapa permasalahan, tantangan, dan peluang pada tingkat hulu maupun hilir yang harus segera direspon serta diantisipasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang dicita-citakan pada tahun 2024. Isu-isu strategis tersebut akan mempengaruhi konstruksi penajaman *Road Map* Reformasi Birokrasi.

1.7.1. Isu Strategis di Tingkat Hulu

Isu strategis tingkat hulu merupakan masalah-masalah yang terjadi di dalam birokrasi yang bersumber pada tata kelola pemerintahan. Isu strategis tingkat hulu umumnya akan menimbulkan potensi masalah lain jika tidak segera ditangani. Beberapa isu tingkat hulu yang berkaitan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut:

1) Birokrasi yang Belum Kolaboratif.

Sejalan dengan arahan Presiden, bahwa birokrasi harus berorientasi hasil. Untuk mewujudkan arahan tersebut, terdapat berbagai peran aktor dan sektor yang menjadi kunci keberhasilan Reformasi Birokrasi. Namun dalam praktiknya, peran yang silo masih menjadi tantangan dalam perencanaan dan pelaksanaan, maupun pengukuran Reformasi Birokrasi. Oleh karena itu untuk meningkatkan efektivitas peran-peran tersebut diperlukan kolaborasi dan integrasi dalam rumusan tujuan, sasaran (*goal setting*) dan strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

2) Transformasi Digital yang Belum Optimal.

Dalam mewujudkan transformasi digital yang mendukung kinerja birokrasi, pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Perumusan kebijakan, koordinasi penerapan, dan evaluasi SPBE telah dilaksanakan, namun saat ini implementasi SPBE belum mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Hal ini disebabkan, masih rendahnya komitmen pimpinan di kementerian/lembaga/pemerintah daerah menjadikan SPBE sebagai prioritas dan perencanaan dan integrasi sistem yang dibangun kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah belum baik. Oleh karena itu diperlukan penguatan dan percepatan implementasi SPBE secara berkelanjutan.

- 3) Penyederhanaan Struktur dan Mekanisme Kerja Baru yang belum tuntas.

Penyederhanaan birokrasi merupakan serangkaian proses yang terdiri dari penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja pasca penyederhanaan birokrasi. Penyesuaian sistem kerja pada Instansi Pemerintah dilakukan secara mendasar yang mampu mentransformasi proses bisnis pemerintahan menjadi lebih dinamis, lincah, dan profesional. Sistem kerja yang sebelumnya bersifat berjenjang/hierarkis menjadi sistem kerja yang sederhana dengan mengedepankan pada kerja tim yang fokus pada hasil serta menghargai kompetensi, keahlian, dan keterampilan dengan dukungan tata kelola pemerintahan berbasis digital, untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Sebagai pedoman untuk pelaksanaan sistem kerja tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi. Dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri ini, seluruh Instansi Pemerintah diminta untuk segera menyesuaikan sistem kerjanya melalui penyempurnaan mekanisme kerja dan proses bisnis birokrasi yang berorientasi pada percepatan pengambilan keputusan dan perbaikan pelayanan publik, dengan optimalisasi SPBE.

Melalui Sistem Kerja yang baru, Pejabat Fungsional akan dapat ditugaskan secara *flexible*, *changeable*, dan *moveable*, dengan pengelolaan kinerja yang akuntabel. Pegawai ASN tidak bekerja dalam kotak-kotak tertentu melainkan fokus pada pencapaian tujuan organisasi. Dengan mekanisme kerja tersebut, Pegawai ASN dituntut untuk mampu berkinerja lebih optimal sesuai dengan kompetensinya, dapat dimanfaatkan tidak hanya pada unit organisasi, namun juga dapat dimanfaatkan di luar unit organisasi.

- 4) Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan yang masih menghadapi kendala

Integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan masih menghadapi banyak tantangan. Hal ini terlihat dari masih banyaknya temuan penyimpangan, baik yang dilakukan oleh pimpinan instansi maupun pegawainya. Kelemahan sistem pengawasan mendorong terjadinya perilaku koruptif dan pelanggaran integritas. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan sistem pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

- 5) Budaya Birokrasi: BerAKHLAK yang belum terimplementasi dengan baik.

BerAKHLAK yang ditetapkan sebagai budaya kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menyederhanakan nilai-nilai dasar ASN yang terkandung dalam Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, yang terdiri atas komponen Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif, serta budaya integritas tinggi dan pelayanan prima. Sehingga Budaya kerja tersebut dapat menjadi pondasi yang kokoh bagi setiap ASN dalam berperilaku menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga dapat dijadikan pengungkit. Meskipun budaya kerja ini sudah disosialisasikan kepada seluruh kementerian/lembaga/ pemerintah daerah, namun belum diinternalisasi dengan baik, sehingga pemahaman makna nilai BerAKHLAK belum

merata pada ASN di seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan dalam internalisasi nilai BerAKHLAK secara masif dan berkelanjutan.

1.7.2. Isu Strategis di Tingkat Hilir

Isu strategis tingkat hilir merupakan masalah yang muncul di masyarakat terkait dengan agenda program Pembangunan Nasional. Isu strategis hilir umumnya terjadi sebagai turunan yang muncul apabila isu strategis hulu tidak diselesaikan. Beberapa isu strategis hilir yang berkaitan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut:

- 1) Hasil pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan belum sebanding dengan sumber daya yang dikeluarkan

Pemerintah telah mengerahkan sumber daya anggaran yang cukup besar untuk melaksanakan berbagai program pengentasan kemiskinan dengan anggaran yang cukup besar. Adapun total anggaran pada program nasional pengentasan kemiskinan pada tahun 2021 mencapai Rp 431,3 Triliun dengan total 65 program dan 128 kegiatan yang tersebar pada 16 kementerian/lembaga. Namun dengan anggaran sebesar itu, hanya mampu menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,60% dari 10,14% (Maret 2021) menjadi 9,54% (Maret 2022).

Selain sumber daya anggaran yang besar, program pembangunan juga melibatkan berbagai sektor pemerintahan yang memiliki potensi keterkaitan berdasarkan target output dan lokus kegiatannya. Namun, belum terdapat kolaborasi utuh dalam langkah strategis yang utuh. Di lain sisi, kualitas tata kelola lintas instansi belum sejalan dengan capaian Reformasi Birokrasi dan akuntabilitas instansi yang cenderung sudah baik.

- 2) Tantangan resesi global dan pentingnya investasi.

Resesi global membawa potensi yang mengarah pada krisis pangan, energi, dan keuangan menyebabkan semua negara membutuhkan investasi. Peningkatan investasi dipengaruhi oleh keputusan investor untuk melakukan investasi yang didasarkan pada nilai keekonomian dan kemudahan berusaha pada suatu negara. Salah satu faktor yang berpengaruh pada kemudahan dalam berusaha adalah perizinan berusaha dan berinvestasi. Selama ini, izin berusaha dan berinvestasi di Indonesia identik dengan proses yang rumit dan membutuhkan waktu yang lama. Sehingga, Pemerintah Indonesia kemudian mengambil langkah dengan penerapan *omnibus law*. Oleh sebab itu, Reformasi Birokrasi diarahkan untuk memperkuat penerapan *omnibus law* serta meningkatkan *competitiveness index* sehingga bisa melipatgandakan investasi.

- 3) Tantangan perubahan global dan tuntutan terhadap pelayanan publik.

Perubahan lingkungan global yang tidak terprediksi dan berciri VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity*) menuntut seluruh sektor, termasuk birokrasi, agar dapat bekerja secara *agile, adaptive*, dan cepat, terutama dalam hal digitalisasi. Di lain sisi, masyarakat juga menuntut adanya kecepatan dan kemudahan pelayanan publik. Oleh sebab itu, Reformasi Birokrasi diarahkan untuk mendorong terciptanya digitalisasi administrasi pemerintah agar dapat mendukung pelayanan publik yang lebih cepat dan mudah.

4) Dampak inflasi yang tidak terkendali.

Pada dasarnya inflasi menggambarkan kondisi ekonomi suatu negara dimana dapat bersifat positif maupun negatif. Inflasi yang tidak terkendali akan menyebabkan dampak negatif seperti naiknya harga-harga, menurunnya daya beli masyarakat, dan peningkatan suku bunga. Dampak jangka panjang dari inflasi adalah adanya potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sehingga menyebabkan peningkatan pengangguran yang berpotensi pada peningkatan angka kemiskinan. Oleh sebab itu, pemerintah perlu memprioritaskan untuk menyelamatkan masyarakat agar tidak banyak yang jatuh ke jurang kemiskinan akibat dari adanya kenaikan harga.

1.8. TARGET KINERJA REFORMASI BIROKRASI SAMPAI DENGAN TAHUN 2024

Kinerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dicerminkan dengan pencapaian target kinerja sesuai dengan jenjang kinerja. Penjenjangan kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana telah dijelaskan dalam kerangka logis kinerja dan indikator kinerja Reformasi Birokrasi yaitu pada tingkat tujuan, sasaran strategis, sasaran kebijakan dan *output* kegiatan. Target kinerja pada tingkat pencapaian tujuan dan sasaran strategis Reformasi Birokrasi sampai tahun 2024 dinyatakan dalam tabel berikut:

Target Kinerja Tujuan
Reformasi Birokrasi Nasional

No	Tujuan Reformasi Birokrasi 2020-2024	Indikator Tujuan	Baseline 2021	Target 2024
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1.	Terwujudnya Birokrasi yang Bersih, Efektif dan Berdaya Saing Mendorong Pembangunan Nasional dan Pelayanan Publik	Capaian Indeks Reformasi Birokrasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah	91,76% Kementerian/Lembaga Minimal Baik	100% Kementerian/Lembaga Minimal Baik
			79,41% Provinsi Minimal Baik	100% Provinsi Minimal Baik
			25,79% Kab/Kota Minimal Baik	70% Kab/Kota Minimal Baik
		Capaian Indikator Kinerja Pembangunan (Angka Kemiskinan, Pertumbuhan Investasi)	Angka Kemiskinan: 9,71 (Sep 2021)	Menurun
			Pertumbuhan Investasi= 9,0% (2021/2020) Realisasi Penanaman Modal 2021: 901,0 Realisasi Penanaman Modal 2020: 826,3	Meningkat
		Capaian tiga Indikator Daya Saing Global (CPI, EGDI)	CPI: Skor 38 Peringkat 96 dari 180 negara (2021) EGDI: Peringkat ke 88 dari 193 negara (2021)	Meningkat

**Target Kinerja Sasaran Strategis
Reformasi Birokrasi Nasional**

No	Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi 2020-2024	Indikator Sasaran Strategis	Baseline 2021	Target 2024
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1.	Terciptanya Tata Kelola Indeks SPB Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel	Indeks SPBE	Kementerian/lembaga: 53,26% Baik	100% Kementerian/ lembaga Baik
			Provinsi: 44,12% Baik	80% Provinsi Baik
			Kab/Kota: 23,58% Baik	50% Kab/Kota Baik
		Capaian Akuntabilitas Kinerja	Kementerian/lembaga: 93,75% Baik Provinsi: 100,00% Baik Kab/Kota: 66,73% Baik	100% kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah minimal Baik
		Capaian Akuntabilitas Keuangan	WTP Kementerian/lembaga: 95% WTP Provinsi: 100% WTP Kab/Kota: 91,91%	100% kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah WTP dengan tingkat tindak lanjut 80%
2.	Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional	Nilai Survei <i>Employer Branding</i> (sumber: Kementerian PANReformasi Birokrasi)	6,90% (2022)	7,66%
		Nilai Survei Indeks BerAKHLAK (sumber: Kementerian PANReformasi Birokrasi)	60,9% (2022)	67,142%
		Nilai Survei Penilaian Integritas (sumber: KPK)	Nilai rata-rata Kementerian/lembaga: 81,1% Prov: 69,3% Kab/Kota: 71,4%	Nilai rata-rata kementerian/ lembaga /pemerintah daerah meningkat
		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (sumber: Kementerian PAN Reformasi Birokrasi)	Nilai rata-rata Kementerian/lembaga: 88,06 Prov: 86,15 Kab/Kota: 74,89	Nilai rata-rata kementerian/ lembaga /pemerintah daerah meningkat

BAB II

GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

Kabupaten Nias merupakan sebuah refleksi terhadap perjalanan sejarah Kabupaten Nias ditinjau dari penyelenggaraan pemerintahan adat, masa penjajahan Belanda, masa penjajahan Jepang, masa kemerdekaan dan pasca pemekaran Kabupaten Nias (pembentukan Daerah Otonom Baru). Para ahli sejarah dan budaya dari Nias meyakini bahwa leluhur pertama Ononiha (Suku Nias) berasal dari Negeri yang bernama Teteholi'ana'a (kira-kira dari Indocina-Vietnam sekarang) antara 2000 s.d. 1000 tahun sebelum masehi sebanyak 5 (lima) orang yang disebut Si Lima Börödanömö (Lima Induk Puak) yang datang secara beruntutan dalam selang waktu yang relatif singkat. Kelima orang tersebut berasal dari satu keluarga yaitu Keluarga Raja Balugu Sirao, Raja Negeri Teteholi'ana'a yang mempunyai empat orang putera dan satu orang cucu yang untuk pertama kalinya mendiami dan berkedudukan di Börönadu.

Selanjutnya, pada masa penjajahan Belanda, VOC atau Perserikatan Dagang Hindia Timur telah berada di Nias jauh sebelum Belanda menjajah Kepulauan Nias. Menurut catatan sejarah, dinyatakan bahwa Davidson (Kepala Cabang VOC) telah tiba di Kepulauan Nias pada tahun 1665, dan kemudian pada tanggal 02 Juni 1669 VOC telah menandatangani surat kontrak dagang dengan Raja Laraga untuk penggunaan Pelabuhan Luaha Idanoi.

Penjajahan Belanda di Bumi Tanö Niha diawali pada tanggal 01 Januari 1800 sebagai akibat bangkrutnya VOC pada tanggal 31 Desember 1799. Penjajahan Belanda di Nias pada saat itu belum meliputi keseluruhan Kepulauan Nias dan juga belum terstruktur sampai dengan kekalahan Belanda dari Inggris pada tahun 1821.

Pada tahun 1825 Inggris menyerahkan kembali Indonesia termasuk Nias kepada Belanda, namun karena Belanda kekurangan bala tentara dan keuangan, maka Kepulauan Nias tidak disentuh atau dibiarkan begitu saja. Selanjutnya, barulah pada tanggal 04 Desember 1870 wilayah Nias mulai diperhatikan oleh Belanda melalui pengangkatan J.F.A. de Rooij sebagai *Kontroleur* Pertama *Onder Afdeeling* Nias dengan *Luitenant der Chinezen* bernama So Ghie. Dengan demikian, *Onder Afdeeling* Nias terbentuk dan efektif bekerja mulai tanggal 04 Desember 1870 yang merupakan salah satu dari 6 (enam) *Onder Afdeeling* di bawah kekuasaan *Afdeeling* Sibolga Keresidenan Tapanuli. Atas dasar inilah yang menguatkan Pemerintah Daerah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2017 menetapkan Hari Jadi Kabupaten Nias jatuh pada tanggal 04 Desember 1870.

Selanjutnya, pada tahun 1919, *Onder Afdeeling* Nias ditingkatkan statusnya menjadi *Afdeeling* Nias yang merupakan salah satu dari 4 (empat) *Afdeeling* wilayah Residen Tapanuli. *Afdeeling* Nias dipimpin oleh Asisten Reseden, dengan wilayah administratif terbagi atas 2 (dua) *Onder Afdeeling*, yaitu : *Onder Afdeeling* Nias Selatan dengan Ibukota Teluk Dalam dan *Onder Afdeeling* Nias Utara dengan Ibukota Gunungsitoli, yang masing-masing dipimpin oleh seorang *Controleur*. Pada masa penjajahan Jepang, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942 pembagian wilayah pemerintahan di Daerah Nias tidak mengalami perubahan, sama seperti pada masa pemerintahan Hindia Belanda, kecuali *Onder Afdeeling* dihilangkan, dan yang mengalami perubahan hanya istilah saja, yaitu :

- ✓ *Afdeeling* diganti dengan nama *Gunsu Sibu* yang dipimpin oleh seorang *Setyotyö*.
- ✓ Dusun diganti dengan nama *Gun* yang dipimpin oleh seorang *Guntyo*.
- ✓ *Onder Distrik* diganti dengan nama *Fuku Gu* yang dipimpin oleh seorang *Fuku Guntyo*.

Pada tahun-tahun pertama masa kemerdekaan, pembagian wilayah pemerintahan di daerah Nias tidak mengalami perubahan. Demikian juga struktur pemerintahan, yang berubah hanya nama wilayah dan nama pimpinannya, yakni:

- ✓ Nias Gunsu Sibu diganti dengan nama Pemerintahan Nias yang dipimpin oleh seorang Luhak.
- ✓ Gun diganti dengan nama Urung yang dipimpin oleh seorang Asisten Kepala Urung (Demang).
- ✓ Fuku Gun diganti dengan nama Urung Kecil yang dipimpin oleh seorang Kepala Urung Kecil (Asisten Demang).

Pada awal masa kemerdekaan terdapat 9 (sembilan) kecamatan, dimana diantara kecamatan tersebut terdapat 3 (tiga) kecamatan yang mengalami perubahan nama dan lokasi Ibukota.

Dalam perkembangan selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Nias ditetapkan sebagai salah satu Kabupaten Otonom dan secara resmi diakui dalam cakupan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pimpinan Daerah di Kabupaten Nias sejak awal Kemerdekaan pada Tahun 1945 sampai dengan hari ini telah berjumlah 16 Orang Bupati yakni :

1.



D.Z. MARUNDRURI, Kepala Luhak Nias dari Tahun 1945 sampai dengan Tahun 1946.

2.



P.R. TELAUMBANUA, Bupati KDH Kabupaten Nias dari Tahun 1946 sampai dengan Tahun 1954.

3.



HUMALA FREDERIK SITUMORANG, Bupati KDH Kabupaten Nias dari Tahun 1954 sampai dengan Tahun 1956.

4.



HERMAN SIRAIT, Bupati KDH Kabupaten Nias dari Tahun 1956 sampai dengan Tahun 1958

5.



A.W. HAREFA, Bupati KDH Kabupaten Nias dari Tahun 1958 sampai dengan Tahun 1960.

6.



ASANUDIN WARUWU, Bupati KDH TK. II Nias dari Tahun 1960 sampai dengan Tahun 1966

7.



KENAN SARAGIH, Bupati KDH Kabupaten Nias dari Tahun 1966 sampai dengan Tahun 1967

8.



M. SANI ZEGA, Bupati KDH TK II Nias dari Tahun 1967 sampai dengan Tahun 1975

9.



DALIMEND, Bupati KDH TK II Nias dari Tahun 1975 sampai dengan Tahun 1981

10.



HANATI NAZARA, SH, Bupati KDH TK II Nias dari Tahun 1981 sampai dengan Tahun 1986

11.



S.M. MENDROFA, SH, Bupati KDH TK II Nias dari Tahun 1986 sampai dengan Tahun 1991

12.



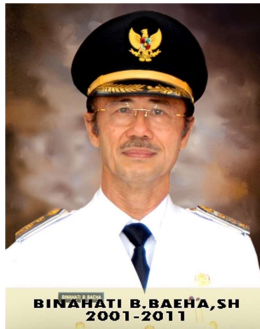
Drs. TAL LAROSA, Bupati KDH TK II Nias dari Tahun 1991 sampai dengan Tahun 1996

13.



Drs. H. ZAKHARIA Y. LAFAU, Bupati Nias dari Tahun 1996 sampai dengan Tahun 2001

14.



BINAHATI B. BAEHA, SH, Bupati Nias dari Tahun 2001 sampai dengan Tahun 2011

15.



Drs. SOKHIATULO LAOLI, MM, Bupati Nias dari Tahun 2011 – 2021

16.



YAATULO GULO, S.E., S.H., M.Si, Bupati Nias dari Tahun 2021-2024

dan Wakil Bupati yakni :

1.



AGUS HARTYAN MENDROFA
WAKIL BUPATI NIAS TAHUN 2001 - 2006

AGUS H. MENDROFA, Wakil Bupati Nias dari Tahun 2001 sampai dengan Tahun 2006.

2.



TEMAZARO HAREFA
WAKIL BUPATI NIAS TAHUN 2006 - 2011

TEMAZARO HAREFA, Wakil Bupati Nias dari Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2011.

3.



AROSOKHI WARUWU, SH, MH Wakil Bupati Nias dari Tahun 2011 – 2021

4.



AROTA LASE, A.Md
WAKIL BUPATI NIAS PERIODE 2021-2024

AROTA LASE, A.Md, Wakil Bupati Nias dari Tahun 2021-2024

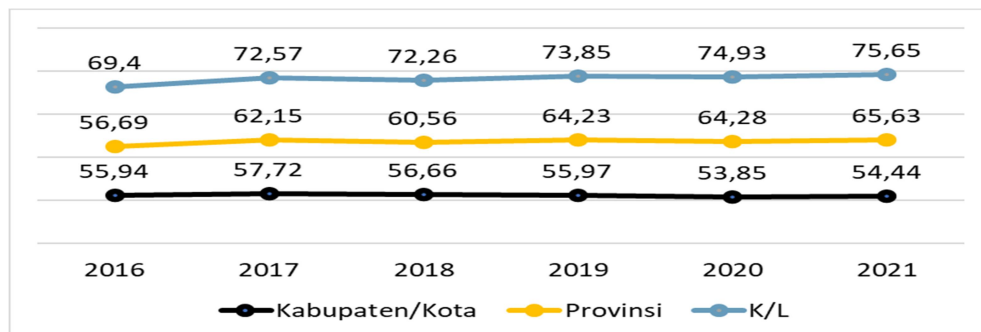
2.1 ANALISIS KONDISI EKSISTING SESUAI DENGAN PERUBAHAN ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 2020-2024

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional telah memasuki tiga periode *Road Map* Reformasi Birokrasi sejak *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010–2025 diterbitkan. Berbagai perbaikan telah dilakukan dalam tata kelola pemerintahan, mulai dari penyederhanaan birokrasi, penyetaraan jabatan, pengembangan arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) nasional yang terintegrasi, efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD), sampai dengan pengintegrasian pelayanan publik dalam mall pelayanan publik. Semua upaya tersebut bertujuan untuk menciptakan birokrasi Indonesia yang berkelas dunia sebagai tujuan akhir dari *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010–2025. Beberapa capaian dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi sampai akhir tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- 1) Penyederhanaan Birokrasi Dua Level.
Penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja baru dilakukan agar proses kerja birokrasi menjadi lebih cepat, efektif, efisien, dan dinamis dalam pengambilan keputusan. Terdapat 47.992 struktur pada 95 kementerian/lembaga yang telah disederhanakan, 148.256 struktur pada 33 provinsi dan 498 instansi daerah serta 44.870 Jabatan Administrasi yang telah dialihkan ke Jabatan Fungsional pada 91 kementerian/lembaga, disusul dengan 31 provinsi, 371 kabupaten dan 86 kota yang telah diusulkan dan diberikan pertimbangan tertulis untuk penyederhanaan birokrasi.
- 2) Penghapusan Lembaga Non-Struktural (LNS) yang tidak efektif.
Kegiatan ini bertujuan untuk mengurangi tumpang tindih tugas fungsi di antara Instansi Pemerintah yang mengakibatkan pemborosan kewenangan dan inefisiensi anggaran. Tercatat 37 LNS telah dibubarkan dan diintegrasikan pada kementerian/lembaga yang sesuai.
- 3) Digitalisasi Birokrasi Melalui Penerapan SPBE yang Terintegrasi.
Komitmen pemerintah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang mudah cepat, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, diwujudkan melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi kepada pengguna layanan. Terdapat 159 Instansi Pemerintah yang memiliki tingkat kematangan SPBE “baik”. Kualitas digital birokrasi semakin positif, tercermin pada indeks *E-Government Development Index* (EGDI) yang dikeluarkan oleh *United Nations*. Pada tahun 2020, Indonesia berada pada peringkat ke-88 atau naik 19 level dari tahun 2018.
- 4) Efisiensi APBN/APBD Melalui Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
SAKIP merupakan manajemen kinerja sektor publik yang memadukan dan mengintegrasikan sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja sehingga memastikan keselarasan dalam rangka pencapaian kinerja Instansi Pemerintah. SAKIP berhasil mencegah potensi pemborosan APBN/APBD sebesar ± Rp 112 Triliun.

- 5) Penguatan Pengawasan Melalui pembangunan Zona Integritas.
Unit kerja yang meraih predikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) adalah unit kerja yang pimpinan dan seluruh jajarannya memiliki komitmen kuat untuk membangun unit kerja percontohan dalam hal pemberantasan korupsi dan pelayanan publik yang prima. Tercatat sampai dengan tahun 2022 telah terbentuk 1.937 unit kerja WBK dan 225 unit kerja WBBM.
- 6) Integrasi Pelayanan Publik Melalui Pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP).
MPP merupakan wujud kolaborasi pelayanan terpadu pada satu tempat dari berbagai pihak mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), hingga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). MPP bertujuan untuk meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan. Sampai akhir tahun 2021, terdapat 56 MPP yang telah beroperasi di seluruh Indonesia.
Selain itu, progres capaian Reformasi Birokrasi juga dapat dilihat melalui Indeks Reformasi Birokrasi. Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan tingkat kemajuan kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam menciptakan birokrasi yang berkualitas. Pada gambar berikut disajikan grafik rata-rata nilai Indeks Reformasi Birokrasi selama lima tahun terakhir. Secara umum, rata-rata Indeks Reformasi Birokrasi kementerian/lembaga dan Pemerintah Provinsi selama lima tahun terakhir cenderung meningkat dengan capaian yang sudah dalam kategori baik. Sedangkan Pemerintah Kabupaten/Kota cenderung ada penurunan dengan capaian yang masih dibawah kategori baik.

Rata-rata Nilai Indeks Reformasi Birokrasi
Tahun 2016–2021



Sumber: Kementerian PAN & Reformasi Birokrasi RI

Meskipun berbagai upaya perbaikan telah dilakukan, namun kondisi tersebut belum mampu mengangkat posisi Indonesia agar sejajar dengan negara-negara lain yang berperingkat lebih baik. Berbagai indikator global yang mengukur kualitas tata kelola pemerintah menunjukkan bahwa Indonesia masih tertinggal. Beberapa indikator tersebut diantaranya:

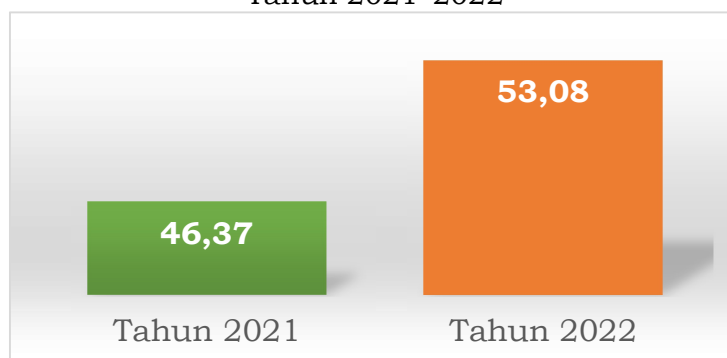
- 1) *Corruption Perception Index (CPI)* dari *Transparency International*. Pada tahun 2021 Indonesia berada pada peringkat ke-96 dunia dengan skor 38, dan berada pada peringkat ke-5 dalam *Association of SouthEast Asian Nations (ASEAN)*, jauh dibawah Singapura (peringkat ke-4 dunia dengan skor 85), Malaysia, Timor-Leste, dan Vietnam. Kondisi tersebut menunjukkan masih banyak hal yang harus diselesaikan dalam kaitannya dengan pemberantasan korupsi dan perwujudan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.

- 2) Indikator *Ease of Doing Business* (EODB) Indonesia cenderung stagnan pada peringkat ke-73 dari 190 negara dan berada pada peringkat keenam di ASEAN. Kondisi ini menunjukkan bahwa Indonesia belum dapat memberikan pelayanan yang baik bagi investor yang berbisnis atau akan berbisnis di Indonesia. Kondisi tersebut tentu merupakan sebuah ironi mengingat Indonesia merupakan salah satu pasar utama bagi para investor global.
- 3) Indikator *Government Effectiveness Index* (GEI), Indonesia berada pada peringkat ke-73 dari ke-193 negara dan berada pada peringkat ke-5 di ASEAN. Kondisi ini tentu mencerminkan masih banyaknya permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, seperti: kualitas birokrasi, pelayanan publik, dan kompetensi aparat pemerintah.
- 4) Indikator *E-Government Development Index* (EGDI) oleh *United Nations (UN) E-Government Survey 2020*. Indonesia masuk di posisi ke-88 dunia dari 193 negara. Meskipun demikian, Indonesia masih berada jauh dari negara ASEAN, seperti: Singapura yang berada pada peringkat ke-11 dunia, Malaysia, dan Thailand. Kondisi tersebut tentu mengisyaratkan bahwa masih banyak hal yang tertinggal dalam mewujudkan digital birokrasi di Indonesia.

Berkaitan dengan capaian pembangunan nasional, pelaksanaan Reformasi Birokrasi juga belum mampu untuk menyelesaikan masalah-masalah utama yang terjadi pada masyarakat, seperti: pengentasan kemiskinan, penguatan usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan pariwisata, peningkatan investasi, serta isu-isu strategis lainnya.

Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Nias pada Tahun 2021 dan Tahun 2022 mengalami peningkatan, namun masih terdapat beberapa kelemahan yang harus diperbaiki dan rekomendasi yang mesti harus ditindaklanjuti.

Nilai Indeks Reformasi Birokrasi
Pemerintah Kabupaten Nias
Tahun 2021–2022



Sumber: Kementerian PAN & Reformasi Birokrasi RI

2.2 CAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN REFORMASI BIROKRASI, KEGIATAN UTAMA DAN INDIKATOR-INDIKATOR REFORMASI BIROKRASI

A. LEVEL MAKRO

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada level mikro harus didasari pada dua dimensi, yaitu dimensi Prioritas Nasional dan dimensi Prioritas Instansional. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi level mikro yang didasari Prioritas Nasional berarti pelaksanaan Reformasi Birokrasi mikro harus sesuai dan selaras dengan seluruh kebijakan nasional terkait Reformasi Birokrasi yang telah ditetapkan dalam kebijakan di level makro dan meso yang bersifat *mandatory*. Sedangkan pelaksanaan yang didasari pada dimensi Prioritas Instansional adalah pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk mengakomodir kebutuhan untuk pemecahan masalah tata kelola internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang masih menjadi kendala dalam penyediaan pelayanan publik yang berkualitas dan peningkatan kinerja yang berkelanjutan.

Hasil Capaian Reformasi Birokrasi
Level Makro

No	Tujuan Reformasi Birokrasi 2020-2024	Indikator Tujuan	Baseline 2021	Target 2024
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1.	Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik	Capaian Indeks Reformasi Birokrasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah	91,76% Kementerian/ Lembaga Minimal Baik	100% Kementerian/ Lembaga Minimal Baik
			79,41% Provinsi Minimal Baik	100% Provinsi Minimal Baik
			25,79% Kab/Kota Minimal Baik	70% Kab/Kota Minimal Baik
		Capaian Indikator Kinerja Pembangunan (Angka Kemiskinan, Pertumbuhan Investasi)	Angka Kemiskinan: 9,71 (Sep 2021)	Menurun
			Pertumbuhan Investasi= 9,0% (2021/2020) Realisasi Penanaman Modal 2021: 901,0 Realisasi Penanaman Modal 2020: 826,3	Meningkat
		Capaian tiga Indikator Daya Saing Global (CPI, EGDI)	CPI: Skor 38 Peringkat 96 dari 180 negara (2021) EGDI: Peringkat ke 88 dari 193 negara (2021)	Meningkat

Hasil Capaian Kinerja Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi Nasional

No	Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi 2020-2024	Indikator Sasaran Strategis	Baseline 2021	Target 2024
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1.	Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel	Indeks SPBE	Kementerian/lembaga: 53,26% Baik	100% Kementerian/ lembaga Baik
			Provinsi: 44,12% Baik	80% Provinsi Baik
			Kab/Kota: 23,58% Baik	50% Kab/Kota Baik
		Capaian Akuntabilitas Kinerja	Kementerian/lembaga: 93,75% Baik Provinsi: 100,00% Baik Kab/Kota: 66,73% Baik	100% kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah minimal Baik
		Capaian Akuntabilitas Keuangan	WTP Kementerian/lembaga: 95% WTP Provinsi: 100% WTP Kab/Kota: 91,91%	100% kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah WTP dengan tingkat tindak lanjut 80%
2.	Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional	Nilai Survei <i>Employer Branding</i> (sumber: Kementerian PAN Reformasi Birokrasi)	6,90% (2022)	7,66%
		Nilai Survei Indeks BerAKHLAK (sumber: Kementerian PAN Reformasi Birokrasi)	60,9% (2022)	67,142%
		Nilai Survei Penilaian Integritas (sumber: KPK)	Nilai rata-rata Kementerian/lembaga: 81,1% Prov: 69,3% Kab/Kota: 71,4%	Nilai rata-rata kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah meningkat
		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (sumber: Kementerian PAN Reformasi Birokrasi)	Nilai rata-rata Kementerian/lembaga: 88,06 Prov: 86,15 Kab/Kota: 74,89	Nilai rata-rata kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah meningkat

B. LEVEL MESO

Strategi pada level meso dilaksanakan untuk memastikan berbagai arahan kebijakan Reformasi Birokrasi level makro yang ditetapkan oleh Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Nias (KPRBPKN) dan Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Nias (TRBPKN) diterjemahkan ke dalam kegiatan-kegiatan utama yang efektif mencapai tujuan dan sasaran strategis Reformasi Birokrasi.

Sebagaimana arah kebijakan Reformasi Birokrasi Nasional 2020–2024 adalah untuk mempercepat terciptanya birokrasi digital dan mempercepat dampak pelaksanaan Reformasi Birokrasi, maka terdapat dua strategi utama untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut. Pertama, untuk mempercepat terciptanya birokrasi digital maka ditetapkan kebijakan percepatan dalam Reformasi Birokrasi General; kedua, untuk mempercepat dampak pelaksanaan Reformasi Birokrasi maka ditetapkan isu prioritas nasional dalam Reformasi Birokrasi Tematik. Pada Kebijakan percepatan terdapat sembilan kebijakan birokrasi digital yang ditujukan

Hasil Capaian Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi 2023-2024
Level Meso

No	Sasaran (Immediate outcome)	Leading Institution	Output Utama	Tahun Pelaksanaan	Penanggung jawab
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
SASARAN STRATEGIS 1: Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel					
1.	Terimplementasikannya Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi Indikator : Pemerintah Kabupaten Nias Mengimplementasikan penyederhanaan birokrasi dengan Baik Target : 100% pada Tahun 2024	Pemerintah Kabupaten Nias	Tersedianya kebijakan penyederhanaan birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/transformasi organisasi berbasis kinerja dan <i>agile</i> pada Pemerintah Kabupaten Nias	2021	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Nias
			Terlaksananya monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan penyederhanaan birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Nias	2021	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Nias
2.	Terimplementasikannya kebijakan sistem kerja baru dan fleksibilitas bekerja pegawai ASN Indikator : Pemerintah Kabupaten Nias telah mengimplementasikan kebijakan sistem kerja baru dengan model fleksibel dengan Baik Target : 100% pada Tahun 2024	Pemerintah Kabupaten Nias	Tersedianya kebijakan sistem kerja berbasis fungsional dan kinerja (transformasi <i>squad model</i>) pada Instansi Pemerintah Kabupaten Nias	2022	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Nias
			Tersedianya kebijakan terkait Hari dan Jam Kerja Instansi Pemerintah Kabupaten Nias	2022	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nias
			Tersedianya sistem informasi yang mendukung kebijakan sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN	2022	
			Tersedianya kebijakan model jabatan fungsional baru (<i>job family based on competence domain</i>)	2022	
			Tersedianya kebijakan terkait sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN	2022	
			Terlaksananya monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan sistem kerja pasca penyederhanaan birokrasi dan sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi	2023	

No	Sasaran (Immediate outcome)	Leading Institution	Output Utama	Tahun Pelaksanaan	Penanggung jawab
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
			pegawai ASN		
3.	Terimplementasinya Kebijakan Arsitektur SPBE Nasional Indikator : Tingkat implementasi inisiatif Strategi Arsitektur SPBE Nasional pada Pemerintah Kabupaten Nias daerah Baik Target : 100% pada Tahun 2024	Pemerintah Kabupaten Nias	Tersedianya kebijakan Arsitektur SPBE Nasional Terlaksananya inisiatif Strategis Arsitektur SPBE Nasional yang ditargetkan dalam kebijakan Arsitektur SPBE Nasional Terlaksananya monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan Arsitektur SPBE Nasional	2023 2023 2023	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias
4.	Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Informasi Kinerja yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Indikator : Pemerintah Kabupaten Nias dengan Indeks Perencanaan Pembangunan Baik Pemerintah Kabupaten Nias dengan Nilai SAKIP Baik Target : 100% pada Tahun 2024	Pemerintah Kabupaten Nias	Tersedianya kebijakan integrasi sistem perencanaan, penganggaran, kinerja dan pelaporan (<i>collaborative working</i>) berbasis teknologi informasi Tersedianya kebijakan penguatan akuntabilitas kinerja pemerintah (SAKIP) Terlaksananya monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan sistem perencanaan, penganggaran dan informasi kinerja yang terintegrasi, berbasis teknologi informasi, yang mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah	2023 2022 2023	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nias Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabuapten Nias Inspektorat Daerah Kabupaten Nias Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nias Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabuapten Nias
5.	Terbangunnya Pelayanan Publik Digital (<i>Digital Services</i>) Indikator : Pemerintah Kabupaten Nias yang telah mengimplementasikan transformasi MPP digital Target : 100% pada Tahun 2024	Pemerintah Kabupaten Nias	Tersedianya Kebijakan Pelayanan Publik Digital Tersedianya Mal Pelayanan Publik (MPP) digital Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik Digital dan MPP Digital	2023 2024 2024	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabuapten Nias Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Seluruh Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias
6.	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Indikator : Tingkat perolehan unit kerja yang	Komisi Pemberantasan Korupsi Badan Pemeriksa	Terlaksananya pembangunan zona integritas kawasan dan sektor strategis Terlaksananya penguatan	2023 2022	Inspektorat Daerah Kabupaten Nias

No	Sasaran (Immediate outcome)	Leading Institution	Output Utama	Tahun Pelaksanaan	Penanggung jawab
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	mendapat predikat ZI pada Pemerintah Kabupaten Nias Tingkat maturitas SPIP pada Pemerintah Kabupaten Nias Baik Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) pada Pemerintah Kabupaten Nias dengan Baik Target : 100% pada Tahun 2024	Keuangan Pemerintah Kabupaten Nias	SPIP Terlaksananya kolaborasi peningkatan kualitas tindak lanjut pengaduan masyarakat berbasis TI Terlaksananya monitoring dan evaluasi kebijakan SPIP, kebijakan pembangunan zona integritas kawasan dan sektor strategis, serta pengaduan (LAPOR) Terlaksananya Survei Penilaian Integritas	 2022 2022 2022	
7.	Meningkatnya Kualitas Kebijakan dan Regulasi Indikator : Pemerintah Kabupaten Nias yang Kualitas kebijakan publiknya Baik Pemerintah Kabupaten Nias yang indeks reformasi hukum Baik Target : 100% pada Tahun 2024	Pemerintah Kabupaten Nias	Terlaksananya tata kelola kebijakan yang baik (<i>evidence based policy</i>) Terlaksananya Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan tata kelola kebijakan dan pembentukan peraturan perundang-undangan	2023 2022 2022	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nias
8.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Digital dan Data Statistik Sektoral Indikator Pemerintah Kabupaten Nias yang pengelolaan arsip digital dengan Baik Pemerintah Kabupaten Nias yang telah menyelenggarakan data statistik sektoral dengan Baik Target : 100% pada tahun 2024	Pemerintah Kabupaten Nias	Tersedianya Kebijakan Arsip Digital Terlaksananya monitoring dan evaluasi Kebijakan Arsip Digital Tersedianya Kebijakan Penyelenggaraan data statistik sektoral Terlaksananya monitoring dan evaluasi penyelenggaraan data statistik sektoral	2023 2023 2023 2023	Dinas Perustakaan dan Arsip Kabupaten Nias
9.	Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Pengelolaan	Pemerintah Kabupaten Nias	Terlaksananya pengadaan barang dan jasa pemerintah yang baik Terlaksananya pengelolaan keuangan dan aset yang	2022 2022	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Badan Pengelolaan

No	Sasaran (Immediate outcome)	Leading Institution	Output Utama	Tahun Pelaksanaan	Penanggung jawab
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	Keuangan dan Aset Indikator : Pemerintah Kabupaten Nias yang Tata Kelola Pengadaannya Baik Pemerintah Kabupaten Nias yang Kualitas Kinerja Pelaksanaan Anggaran Baik (IKPA) kementerian/lembaga yang Pengelolaan Asetnya Baik (IPA) Pemerintah Kabupaten Nias yang Opini BPK-nya baik dan tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan terselesaikan Target : 100% pada tahun 2024		baik Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa serta pengelolaan keuangan dan aset	2022	Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias
SASARAN 2: Budaya Birokrasi BERAKHLAK dengan ASN yang Profesional					
1.	Terwujudnya Percepatan Transformasi Jabatan Fungsional Indikator : Pemerintah Kabupaten Nias yang telah mengimplementasikan Kebijakan Transformasi Jabatan Fungsional dengan Baik Target : 100% pada Tahun 2024	Pemerintah Kabupaten Nias	Tersedianya Kebijakan Penataan Jabatan Fungsional ASN Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi implementasi penataan jabatan fungsional ASN	2023 2023	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nias
2.	Terselenggaranya Manajemen Talenta ASN yang Efektif dan Efisien Indikator Pemerintah Kabupaten Nias yang telah mengimplementasikan Manajemen Talenta ASN dengan Baik Target : 100% pada Tahun 2024	Pemerintah Kabupaten Nias	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi implementasi manajemen talenta ASN	2023	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nias
3.	Terwujudnya Percepatan Peningkatan Kapasitas	Pemerintah Kabupaten Nias	Tersedianya Kebijakan Sistem Pembelajaran Terintegrasi	2023	Badan Kepegawaian dan Pengembangan

No	Sasaran (Immediate outcome)	Leading Institution	Output Utama	Tahun Pelaksanaan	Penanggung jawab
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	Pegawai ASN Indikator : Badan Diklat Pemerintah Kabupaten Nias yang telah mengimplementasikan Kebijakan Sistem Pembelajaran Terintegrasi ASN dengan Baik Target 100% pada Tahun 2024		Tersedianya kebijakan <i>learning and development</i> menggunakan <i>learning</i> <i>wallet</i>	2023	Sumber Daya Manusia Kabupaten Nias
			Terlaksananya penguatan <i>digital mindset</i> ASN	2023	
			Terlaksananya monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan Sistem Pembelajaran ASN yang terintegrasi	2023	
4.	Terwujudnya Rekrutmen Pegawai ASN yang Efektif dan Efisien Indikator : Tingkat kepatuhan implementasi rekrutmen pegawai ASN sesuai kebijakan perencanaan dan pengadaan Target : 100% pada Tahun 2024	Pemerintah Kabupaten Nias	Tersedianya kebijakan perencanaan dan pengadaan CASN yang fleksibel	2023	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nias
			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi implementasi perencanaan dan pengadaan CASN Fleksibel	2023	
5.	Terwujudnya Percepatan Transformasi Digital Manajemen ASN Indikator : Tingkat implementasi Platform digital ekosistem pada Pemerintah Kabupaten Nias Target :100% pada Tahun 2024	Pemerintah Kabupaten Nias	Terbangunnya Platform Digital Ekosistem Manajemen ASN	2023	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nias
			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi implementasi Platform Digital Ekosistem Manajemen ASN	2023	
6.	Terwujudnya Sistem Kesejahteraan ASN yang Adil, Layak, dan Berbasis Kinerja Indikator : Pemerintah Kabupaten Nias yang telah mengimplementasikan kebijakan pengelolaan kinerja pegawai ASN dengan Baik Target :100% pada Tahun 2024	Pemerintah Kabupaten Nias	Tersedianya kebijakan kesejahteraan ASN	2023	
			Terlaksananya kebijakan tentang pengelolaan kinerja pegawai ASN	2023	
			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi implementasi manajemen kesejahteraan ASN dan pengelolaan kinerja pegawai ASN	2023	
7.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Sistem Merit dan Sistem Manajemen ASN	Pemerintah Kabupaten Nias	Terlaksannanya Pembinaan dan Pengawasan implementasi sistem merit dan sistem manajemen ASN	2023	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

No	Sasaran (Immediate outcome)	Leading Institution	Output Utama	Tahun Pelaksanaan	Penanggung jawab
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	Indikator : Pemerintah Kabupaten Nias dengan Indeks Sistem Merit Baik (Integrasi dengan Indeks Profesionalitas ASN dan Indeks NSPK) Target :100% pada Tahun 2024		Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan Sistem Merit dan Sistem Manajemen ASN Terlaksananya Survei Nilai <i>Employer Branding</i> dan Indeks BerAKHLAK	2023 2023	Manusia Kabupaten Nias
8.	Meningkatnya Budaya Pelayanan Prima Indikator : Pemerintah Kabupaten Nias dengan Indeks Pelayanan Publik Baik (Integrasi IPP dengan Tingkat Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI) Target : 100% pada Tahun 2024	Pemerintah Kabupaten Nias	Terlaksananya Survei Kepuasan Masyarakat Terlaksananya Evaluasi atas Kepatuhan Standar Pelayanan kementerian/lembaga/ pemerintah daerah Terbangunnya Manajemen Pengetahuan (<i>Knowledge Management</i>) Pelayanan Publik Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap budaya Pelayanan Prima pada seluruh kementerian/lembaga/ pemerintah daerah	2023 2023 2023 2023	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Seluruh Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias

C. LEVEL MIKRO

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada level mikro harus didasari pada dua dimensi, yaitu dimensi Prioritas Nasional dan dimensi Prioritas Instansional. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi level mikro yang didasari Prioritas Nasional berarti pelaksanaan Reformasi Birokrasi mikro harus sesuai dan selaras dengan seluruh kebijakan nasional terkait Reformasi Birokrasi yang telah ditetapkan dalam kebijakan di level makro dan meso yang bersifat *mandatory*. Sedangkan pelaksanaan yang didasari pada dimensi Prioritas Instansional adalah pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk mengakomodir kebutuhan untuk pemecahan masalah tata kelola internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang masih menjadi kendala dalam penyediaan pelayanan publik yang berkualitas dan peningkatan kinerja yang berkelanjutan.

Hasil dan *Output* yang Diharapkan Dalam Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi 2023-2024 Level Mikro

NO	SASARAN (<i>INMEDIATE OUTCOME</i>)	KEGIATAN UTAMA	PENANGGUNG JAWAB
[1]	[2]	[3]	[4]
Sasaran 1: Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel			
1.	Terimplementasikannya Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/ transformasi organisasi berbasis kinerja dan <i>agile</i>	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Nias
2.	Terimplementasikannya kebijakan sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN dengan Baik	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nias 2. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Nias
3.	Terimplementasikannya Kebijakan Arsitektur SPBE Nasional	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	1. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias 2. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Nias
4.	Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Informasi Kinerja yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nias 2. Inspektorat Daerah Kabupaten Nias 3. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias 4. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Nias 5. Seluruh Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Nias
5.	Terbangunnya Pelayanan Publik Digital (<i>Digital Services</i>)	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias
6.	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Pembangunan Zona Integritas di unit kerja Penguatan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Inspektorat Daerah Kabupaten Nias
7.	Meningkatnya Kualitas Kebijakan dan Regulasi	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan	1. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nias 2. Seluruh Perangkat Daerah
8.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Digital dan Data Statistik Sektoral	Pelaksanaan Arsip Digital	1. Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Nias 2. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias

NO	SASARAN (<i>INMEDIATE OUTCOME</i>)	KEGIATAN UTAMA	PENANGGUNG JAWAB
[1]	[2]	[3]	[4]
			Nias
		Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	1. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias 2. Badan Pusat Statistik (BPS)
9.	Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Nias
		Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias
Sasaran 2: Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional			
1.	Terwujudnya Percepatan Transformasi Jabatan Fungsional	Penataan Jabatan Fungsional	1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nias 2. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Nias 3. Seluruh Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Nias
2.	Terselenggaranya Manajemen Talenta ASN yang Efektif dan Efisien	Penguatan Manajemen Talenta ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nias
3.	Terwujudnya Percepatan Peningkatan Kapasitas Pegawai ASN	-	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nias
4.	Terwujudnya Rekrutmen Pegawai ASN yang Efektif dan Efisien	-	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nias
5.	Terwujudnya Percepatan Transformasi Digital Manajemen ASN	-	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nias
6.	Terwujudnya Sistem Kesejahteraan ASN yang Adil, Layak, dan Berbasis Kinerja	Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nias
7.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Sistem Merit dan Sistem Manajemen ASN	Penguatan Sistem Merit	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nias
		Pelaksanaan <i>Core Values</i> ASN	1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nias 2. Seluruh Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Nias
		Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	1. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Nias 2. Seluruh Perangkat Daerah/Unit Kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias

2.3 KONDISI EKSISTING PERBANDINGAN TARGET ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI NASIONAL DENGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN NIAS

Perbandingan kesesuaian target *Road Map* Refomasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Nias sebagai upaya untuk menemukan kesesuaian tema yang dipilih berdasarkan kondisi prioritas dan data eksisting yang dimiliki. Sebagai contoh, untuk Pemerintah Kabupaten Nias dapat menemukan kesesuaian dengan meninjau prioritas pembangunan daerah atau tupoksi utama instansi yang ada pada dokumen RPJMD/RPJPD. Artinya suatu tema menjadi masalah khusus dan memperoleh perhatian sehingga dijadikan sebagai prioritas dalam dokumen perencanaan.

Perbandingan Target *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nias berdasarkan Indikator Tujuan

TUJUAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2020-2024	INDIKATOR TUJUAN	TARGET ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI NASIONAL TAHUN 2024	TARGET RPJMD TAHUN 2021-2026	KONDISI EKSISTING
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Terwujudnya Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong Pembangunan Nasional dan Pelayanan Publik	Capaian Indeks Reformasi Birokrasi	100% Kementerian/ Lembaga Minimal Baik 100% Provinsi Minimal Baik 70% Kab/Kota Minimal Baik	31 Perangkat Daerah Minimal Baik	31 Perangkat Daerah
	Capaian Indikator Kinerja Pembangunan (Angka Kemiskinan, Pertumbuhan Investasi)	Angka Kemiskinan :Menurun	Menurun	Menurun
		Pertumbuhan Investasi : Meningkat	Meningkat	-
		Realisasi Penanaman Modal : Meningkat	Meningkat	-
	Capaian Tiga Indikator Daya Saing Global (CPI, EGDI)	Meningkat	Meningkat	-

Perbandingan Target *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nias berdasarkan Indikator Sasaran

NO	SASARAN STRATEGIS REFORMASI BIROKRASI 2020-2024	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	TARGET ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI NASIONAL TAHUN 2024	TARGET RPJMD TAHUN 2021-2026	KONDISI EKSISTING
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1.	Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincih, Kolaboratif, dan Akuntabel	Indeks SPBE	100% Kementerian/ lembaga Baik 80% Provinsi Baik 50% Kab/Kota Baik	31 Perangkat Daerah Minimal Baik	31 Perangkat Daerah
		Capaian Akuntabilitas Kinerja	100% kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah minimal Baik	100% Perangkat Daerah Baik	85%

NO	SASARAN STRATEGIS REFORMASI BIROKRASI 2020-2024	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	TARGET ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI NASIONAL TAHUN 2024	TARGET RPJMD TAHUN 2021-2026	KONDISI EKSISTING
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
		Capaian Akuntabilitas Keuangan	100% kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah WTP dengan tingkat tindak lanjut 80%	100% Perangkat Daerah Baik	100%
2.	Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional	Nilai Survei <i>Employer Branding</i> (sumber: Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi)	7,66	-	4,00
		Nilai Survei Indeks BerAKHLAK (sumber: Kementerian PAN Reformasi Birokrasi)	67,142	-	52,3
		Nilai Survei Penilaian Integritas (sumber: KPK)	Nilai rata-rata kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah meningkat	-	74,5
		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (sumber: Kementerian PAN Reformasi Birokrasi)	Nilai rata-rata kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah meningkat	4,00	3,46

BAB III

AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2023-2024

Penetapan strategi pada *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020–2024 setelah penajaman ini dilakukan secara kolaboratif melibatkan kementerian/lembaga pengampu kebijakan (*leading institution*) dengan memperhatikan prinsip logis, prioritas, kolaboratif, dan antisipatif. Logis berarti pemilihan kegiatan dilakukan melalui kerangka berpikir logis yang tepat, prioritas berarti memilih kegiatan yang paling mendesak untuk segera dilakukan, kolaboratif berarti pelaksanaan kegiatan dilakukan secara kolaboratif melibatkan banyak pengampu, serta antisipatif dengan memprediksi berbagai kemungkinan perkembangan lingkungan strategis dan *megatrend* ke depan.

Dinamika lingkungan yang selalu berubah dan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi juga memicu pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk semakin adaptif dan lincah. Adanya penajaman *Road Map* Reformasi Birokrasi pun bertujuan untuk menjawab hal tersebut dengan terfokus pada empat aspek, yaitu, penajaman tujuan dan sasaran, penajaman kegiatan utama yang fokus dan berdampak, fokus kepada isu hulu dan hilir, dan penajaman indikator Reformasi Birokrasi.

3.1 PENETAPAN TUJUAN DAN SASARAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2023-2024.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada level mikro mengacu pada kebijakan Reformasi Birokrasi yang telah ditetapkan di level makro dan meso. Hal ini telah tergambar pada *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 dengan penajaman yang mengarahkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi ke dalam dua fokus, yaitu Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik. Modul Pembangunan Reformasi Birokrasi ini akan menjadi panduan dalam Pembangunan Reformasi Birokrasi di level Pemerintah Kabupaten Nias mencakup Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik.

Tujuan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Nias adalah Terwujudnya Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong Pembangunan Nasional dan Pelayanan Publik dengan sasaran sebagai berikut:

1. General :
 - a. Tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah dan kolaboratif
 - b. Budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional
2. Tematik :
 - a. Nasional : Meningkatnya kualitas tata kelola dan hasil pada 4 tema prioritas reformasi birokrasi tematik
 - b. Instansional : Meningkatnya kualitas tata kelola dan hasil penanganan tema yang dipilih

Lebih lanjut tujuan, sasaran dan indikator dalam pelaksanaan Reformasi birokrasi dapat dijabarkan pada tabel berikut ini :

TUJUAN	GENERAL / TEMATIK	SASARAN	INDIKATOR
[1]	[2]	[3]	[4]
Birokrasi yang Bersih, Efektif dan Berdaya Saing mendorong Pembangunan Nasional dan Pelayanan Publik	General	Tata kelola Pemerintahan Digital yang Efektif, Lincah dan Kolaboratif	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
			Capaian Akuntabilitas Kinerja
			Capaian Akuntabilitas Keuangan
		Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional	Nilai Survei Penilaian Integritas
			Nilai <i>Employer Branding</i>
			Indeks BerAKHLAK
			Nilai Survei Kepuasan Masyarakat
	Tematik	Nasional : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan hasil pada 4 tema Prioritas Reformasi Birokrasi Tematik	Capaian Kinerja Reformasi Birokrasi Tematik
		Instansional : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan hasil Penanganan Tema yang dipilih	

1.2 PERENCANAAN REFORMASI BIROKRASI GENERAL

Pembangunan Reformasi Birokrasi General berfokus pada perbaikan sistem dan tata kelola internal pada instansi pemerintah. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General diharapkan agar fokus dan percepatan sasaran strategis Reformasi Birokrasi dapat tercapai secara keseluruhan, sesuai dengan fokus arahan dan sasaran *Road Map* Reformasi Birokrasi setelah penajaman. Untuk mewujudkan hal tersebut di level mikro, terdapat beberapa tahapan dalam Pembangunan Reformasi Birokrasi General, dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi internal. Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi, dengan tahapan sebagai berikut :

1. Penetapan Prioritas Kegiatan Utama.
Sesuai dengan *Road Map* Reformasi Birokrasi, Pemerintah Kabupaten Nias (level mikro) melaksanakan Reformasi Birokrasi dalam dua dimensi, yaitu:
 - a. Dimensi Prioritas Nasional yang telah ditetapkan oleh level makro dan meso berupa Kegiatan Utama dan telah ditetapkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional, serta bersifat *mandatory*.
 - b. Dimensi Instansional merupakan Kegiatan Utama inisiatif Pemerintah Kabupaten Nias (di luar dari Kegiatan Utama *mandatory*) yang dapat memiliki *leverage* (percepatan) terhadap pencapaian Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi.
2. Penetapan Target Kegiatan Utama.
Target Kegiatan Utama digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Nias. Penetapan Target ini perlu memperhatikan target minimal *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional.

A. PENETAPAN PRIORITAS KEGIATAN UTAMA

Dalam hal Pemerintah Kabupaten Nias memiliki keterbatasan sumber daya, maka perlu melakukan tahapan identifikasi tingkat prioritas seluruh Kegiatan Utama. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan identifikasi prioritas Kegiatan Utama, yaitu sebagai berikut:

1. Kegiatan Utama *mandatory* bersifat wajib seluruhnya dan lebih prioritas dibandingkan Kegiatan Utama inisiatif Pemerintah Kabupaten Nias
2. Seluruh Kegiatan Utama, baik yang *mandatory* maupun inisiatif Pemerintah Kabupaten Nias harus dilengkapi dengan indikator yang terukur
3. Identifikasi prioritas Kegiatan Utama didasarkan pada empat factor sesuai contoh atau lebih jika ada faktor lain yang dirasa perlu oleh Pemerintah Kabupaten Nias
4. Skor masing-masing faktor dalam skala 1-10 (atau skala lainnya), kemudian diakumulasi
5. Dapat memodifikasi *tools* yang ada atau menggunakan *tools* lainnya.
6. Hasil identifikasi ini kemudian menjadi pertimbangan dalam menetapkan target tahunan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Nias.

Identifikasi Prioritas Kegiatan Utama Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Nias

KEGIATAN UTAMA	MANDAT REFORMASI BIROKRASI NASIONAL	TINGKAT KEPARAHAN (IMPLEMENTASI RENDAH)	WAKTU (MENDESAK)	SKALA PRIORITAS (TOTAL SKOR)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Sasaran 1: Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel				
Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/ transformasi organisasi berbasis kinerja dan <i>agile</i>	10	2	5	17
Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	10	9	8	27
Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	10	8	9	27
Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	10	7	9	26
Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital	10	7	7	24
Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	10	9	9	28
Penguatan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	10	9	9	28
Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	10	4	7	21
Penguatan Upaya Pencegahan	10	3	7	20

KEGIATAN UTAMA	MANDAT REFORMASI BIROKRASI NASIONAL	TINGKAT KEPARAHAN (IMPLEMENTASI RENDAH)	WAKTU (MENDESAK)	SKALA PRIORITAS (TOTAL SKOR)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Korupsi				
Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	10	6	8	24
Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan	10	4	7	21
Pelaksanaan Arsip Digital	10	9	9	28
Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	10	7	8	25
Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	10	4	6	20
Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	10	4	6	20
Sasaran 2: Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional				
Penataan Jabatan Fungsional	10	3	5	18
Penguatan Manajemen Talenta ASN	10	6	5	21
Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	10	8	6	24
Penguatan Sistem Merit	10	4	8	22
Pelaksanaan <i>Core Values</i> ASN	10	5	10	25
Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	10	9	10	29

Dari tabel di atas, maka Prioritas Kegiatan Utama Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Nias adalah sebagai berikut :

KEGIATAN UTAMA	MANDAT REFORMASI BIROKRASI NASIONAL	TINGKAT KEPARAHAN (IMPLEMENTASI RENDAH)	WAKTU (MENDESAK)	SKALA PRIORITAS (TOTAL SKOR)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Sasaran 1: Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel				
Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	10	9	9	28
Penguatan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	10	9	9	28
Pelaksanaan Arsip Digital	10	9	9	28
Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	10	9	8	27
Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	10	8	9	27
Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	10	7	9	26
Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	10	7	8	25
Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital	10	7	7	24
Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	10	6	8	24

KEGIATAN UTAMA	MANDAT REFORMASI BIROKRASI NASIONAL	TINGKAT KEPARAHAN (IMPLEMENTASI RENDAH)	WAKTU (MENDESAK)	SKALA PRIORITAS (TOTAL SKOR)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	10	4	7	21
Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan	10	4	7	21
Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	10	3	7	20
Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	10	4	6	20
Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	10	4	6	20
Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/ transformasi organisasi berbasis kinerja dan <i>agile</i>	10	2	5	17
Sasaran 2: Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional				
Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	10	9	10	29
Pelaksanaan Core Values ASN	10	5	10	25
Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	10	8	6	24
Penguatan Sistem Merit	10	4	8	22
Penguatan Manajemen Talenta ASN	10	6	5	21
Penataan Jabatan Fungsional	10	3	5	18

B. PENETAPAN TARGET KEGIATAN UTAMA

Target Kegiatan Utama digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah kabupaten Nias. Penetapan Target ini perlu memperhatikan target minimal *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional. Hal-hal minimal yang perlu ada adalah:

1. Kegiatan Utama diambil berdasarkan hasil identifikasi Prioritas Kegiatan Utama
2. Terdapat indikator Kegiatan Utama yang terukur dan relevan
3. Terdapat target tahunan yang terukur dan optimis
4. Koordinator adalah unit/satuan kerja yang memiliki fungsi untuk mengawal dan mengkoordinir Kegiatan Utama
5. Pelaksana adalah unit/satuan kerja yang perlu melaksanakan Kegiatan Utama
6. Kegiatan Utama Inisiatif adalah yang berorientasi hasil (*bukan output*) dan memiliki *leverage* (percepatan) terhadap pencapaian Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi

Penetapan Target Kegiatan Utama Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Nias

KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	BASE LINE (2022)	TARGET TAHUNAN		PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PELAKSANA	
			2023	2024	KOORDINATOR	PELAKSANA
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
Sasaran 1: Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel						
Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/ Transformasi Organisasi Berbasis Kinerja dan <i>Agile</i>	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi	80	90	100	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Nias	Seluruh Perangkat Daerah/Unit Kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias
Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan Model Fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat Implementasi Sistem Kerja Baru dengan Model Fleksibel bagi Pegawai	80%	90%	100%	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Nias	Seluruh Perangkat Daerah/Unit Kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias
Pelaksanaan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Nasional	Indeks SPBE	2,02	2,50	2,75	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias	Seluruh Perangkat Daerah/Unit Kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias
Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Nias	Predikat B	Predikat BB	Predikat BB	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Nias	Seluruh Perangkat Daerah/Unit Kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias
Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital	Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara <i>Online</i> dan Terintegrasi	12	15	17	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias	Seluruh Perangkat Daerah/Unit Kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias
Pembangunan Zona Integritas di Unit Kerja	Indeks Survei Penilaian Integritas (SPI)	74,5	80	90	Inspektorat Daerah Kabupaten Nias	Seluruh Perangkat Daerah/Unit Kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias
Penguatan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP	Level II	Level III	Level III	Inspektorat Daerah Kabupaten Nias	Seluruh Perangkat Daerah/Unit Kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias
Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Persentase Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	90	95	100	Inspektorat Daerah Kabupaten Nias	Seluruh Perangkat Daerah/Unit Kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias
Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Tingkat Implementasi Pencegahan Korupsi	95	97	100	Inspektorat Daerah Kabupaten Nias	Seluruh Perangkat Daerah/Unit Kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias
Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik	Nilai 85,05	Nilai 90	Nilai 95	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Nias	Seluruh Perangkat Daerah/Unit Kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias
Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan	Indeks Reformasi Hukum	50,05	60	70	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nias	Seluruh Perangkat Daerah/Unit Kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias
Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti yang Sah dan Pertanggungjawaban Nasional	90	95	100	Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Nias	Seluruh Perangkat Daerah/Unit Kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias
Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	20	50	75	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias	Seluruh Perangkat Daerah/Unit Kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias

KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	BASE LINE (2022)	TARGET TAHUNAN		PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PELAKSANA	
			2023	2024	KOORDINATOR	PELAKSANA
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	24,30	50	70	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Nias	Seluruh Perangkat Daerah/Unit Kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias
Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini BPK Atas Hasil Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP	WTP	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias	Seluruh Perangkat Daerah/Unit Kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias
Sasaran 2: Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional						
Penataan Jabatan Fungsional	Tingkat Implementasi Pelaksanaan <i>Core Values</i> ASN	65	75	90	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Nias	Seluruh Perangkat Daerah/Unit Kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias
Penguatan Manajemen Talenta ASN	Profesionalitas ASN	42,81	50	60	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nias	Seluruh Perangkat Daerah/Unit Kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias
Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	Kinerja Organisasi	6,27	8	10	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nias	Seluruh Perangkat Daerah/Unit Kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias
Penguatan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit	259,5	285	300	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nias	Seluruh Perangkat Daerah/Unit Kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias
Pelaksanaan <i>Core Values</i> ASN	Tingkat Implementasi Pelaksanaan <i>Core Values</i> ASN	90	95	100	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nias	Seluruh Perangkat Daerah/Unit Kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias
Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Kualitas Pelayanan Publik	8,99	10	15	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Nias	Seluruh Perangkat Daerah/Unit Kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias

1.3 PENETAPAN TEMA DAN TARGET REFORMASI BIROKRASI TEMATIK

Reformasi Birokrasi Tematik merupakan upaya dan sarana untuk mengurai dan menjawab atau mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintahan (*debottlenecking*) yang menjadi isu strategis dan prioritas pembangunan nasional secara kolaboratif. Konsep Reformasi Birokrasi Tematik, diharapkan dapat mendorong percepatan Reformasi Birokrasi yang kolaboratif dan efektif mengungkit capaian kinerja prioritas pembangunan sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara luas. Melalui Reformasi Birokrasi Tematik, pemerintah dapat memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan dengan berbagai pelaksanaan program-kegiatan yang sifatnya *problem solving-debottlenecking* dalam tata kelola pemerintah.

Langkah awal dalam kerangka pembangunan Reformasi Birokrasi Tematik adalah menetapkan tema yang akan dijadikan sebagai fokus Reformasi Birokrasi Tematik pada tahun berjalan. Instansi pemerintah diberikan keleluasaan untuk memilih satu atau lebih dari empat tema yang akan diangkat sebagai fokus Reformasi Birokrasi Tematik. Dalam menetapkan tema, instansi pemerintah perlu berangkat dari *evidence* berupa data yang kuat dan relevan (*evidence based policy*). Data merupakan komponen penting pada tahap ini karena data tersebut akan ditransformasikan menjadi informasi yang dapat digunakan sebagai dasar penetapan tema. Data yang digunakan dapat berupa data primer maupun sekunder, baik dari internal maupun eksternal instansi pemerintah.

Metode yang digunakan adalah melalui evaluasi terhadap kinerja diinginkan yang dibandingkan dengan kinerja *existing*. Setelah melakukan identifikasi terhadap kinerja yang diinginkan dengan kinerja *existing* yang ada, maka selanjutnya adalah memperhatikan *gap* yang muncul dari kedua kinerja/kondisi tersebut. Keberhasilan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik tidak terlepas dari kemampuan instansi pemerintah dalam mengenali adanya permasalahan kesenjangan antara kinerja yang sudah ada dengan kinerja yang akan dicapai dalam Reformasi Birokrasi Tematik. Reformasi Birokrasi Tematik merupakan strategi baru dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020–2024 yang memiliki waktu pelaksanaan hingga tahun 2024. Dengan waktu yang terbatas, ditetapkan beberapa ketentuan sebagai berikut:



Reformasi Birokrasi Tematik merupakan strategi baru dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020–2024. Dengan waktu yang terbatas, ditetapkan tema pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik Nasional yaitu:

1. Reformasi Birokrasi Penanggulangan Kemiskinan
Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan multi-sektor. Tantangan yang dihadapi dalam penanggulangan kemiskinan adalah besarnya anggaran terkait penanggulangan kemiskinan belum memberikan dampak signifikan pada besaran penurunan kemiskinan. Berbagai program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan selama ini belum menjangkau target yang tepat. Dengan adanya target kemiskinan 7% pada 2024 dan target kemiskinan ekstrem menjadi 0% pada 2024, maka diperlukan kolaborasi dan sinergi program penanggulangan kemiskinan terkait dengan data, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan kondisi internal dan eksternal.
2. Reformasi Birokrasi Peningkatan Investasi
Investasi menjadi katalisator pada Pembangunan Nasional serta mendukung pencapaian nilai positif dalam Produk Domestik Bruto (PDB). Seiring dengan kenaikan investasi, maka PDB pun akan meningkat, begitu pun sebaliknya. Berbagai tantangan dalam peningkatan investasi masih dihadapi. Reformasi Birokrasi Tematik peningkatan investasi ini berperan dalam mewujudkan kondisi iklim investasi yang kondusif sehingga memiliki daya saing masuknya investasi dengan memperkuat penerapan *omnibus law* dan meningkatkan indeks daya saing (*competitiveness index*). Reformasi Birokrasi mengintervensi dan memperbaiki aspek tata kelola peningkatan investasi melalui perbaikan proses bisnis, perbaikan data, perbaikan regulasi/kebijakan, reformulasi program/kegiatan sehingga lebih tepat sasaran.

3. Reformasi Birokrasi Digitalisasi Administrasi Pemerintahan

Perubahan lingkungan global yang tidak terprediksi dan berciri VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity*) menuntut birokrasi bekerja secara *agile, adaptive* dan cepat. Selain tuntutan global, kesadaran masyarakat akan pentingnya percepatan dan kemudahan pelayanan publik menjadi perhatian utama masyarakat. Peningkatan Digital Kultur diartikan sebagai pencapaian birokrasi yang memiliki *mindset* baru bahwa prioritas kerja adalah pada hasil (*outcome*), mekanisme kerja dapat dilakukan secara fleksibel dalam konteks ruang dan waktu, serta jangkauan kolaborasi yang menembus sekat-sekat organisasi maupun hierarki. Digital Kultur tersebut dapat berjalan dengan difasilitasi platform "*smart ASN*" yang sedang dibangun oleh Kementerian PANRB. Sedangkan Digital Kompetensi diartikan untuk pencapaian peningkatan pengetahuan dan *skill* yang baru agar tetap berfungsi di tengah disrupsi teknologi dan iklim digital yang bercirikan VUCA.

4. Reformasi Birokrasi Percepatan Prioritas Aktual Presiden

Reformasi Birokrasi Percepatan Prioritas Aktual Presiden berfokus pada penguatan tata kelola birokrasi merespons dan mengawal hal-hal mendesak sesuai arahan Presiden, sehingga dapat memitigasi risiko yang berdampak serius pada masyarakat. Percepatan prioritas aktual Presiden bersifat dinamis dan bias berubah setiap tahunnya menyesuaikan dengan arahan Presiden. Adapun prioritas dan aktual Presiden yang harus segera direspon pada tahun 2023 yaitu:

a. Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri (PDN)

Reformasi Birokrasi diarahkan untuk mendorong penggunaan anggaran pemerintah yang efektif (tepat sasaran), efisiensi, serta memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan barang, jasa, dan modal pemerintah. Strategi yang digunakan salah satunya adalah dengan mendominasi *e-katalog* pengadaan barang/jasa dengan produk buatan dalam negeri.

b. Pengendalian Inflasi

Reformasi Birokrasi berfokus pada upaya dan inovasi pemerintah dalam menekan dan mengendalikan laju inflasi daerah. Inflasi merupakan indikator makro perekonomian yang menggambarkan kondisi ekonomi yang dapat dikatakan kurang sehat. Hal ini dikarenakan kenaikan harga-harga barang secara umum berimplikasi pada menurunnya kemampuan daya beli masyarakat. Kemampuan pemerintah untuk menjaga stabilitas harga yang dilakukan dengan memperkuat koordinasi lintas sektor, serta bekerja sama antar daerah dalam menjaga stabilitas pasokan kebutuhan pokok, menjadi salah satu keberhasilan Reformasi Birokrasi.

Dalam rangka terwujudnya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi, maka langkah dan tahapan pelaksanaan reformasi Birokrasi di Kabupaten Nias pada tahun 2023-2024 baik pada tingkat makro dan tingkat mikro mengacu pada *Grand Design* Reformasi Birokrasi. Setiap tahapan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dimaksudkan untuk memberikan dampak penguatan pada langkah berikutnya. Tema pelaksanaan reformasi Birokrasi Kabupaten Nias dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut:

**Tema Reformasi Birokrasi Tematik
Pemerintah Kabupaten Nias**

TEMA	SASARAN TEMATIK	INDIKATOR	BASE LINE 2022	TARGET	
				2023	2024
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
Penanguangan Kemiskinan	Meningkatnya Produktivitas Komoditi Masyarakat	Nilai Tukar Petani (NTP)	100,1	100,2	100,3
	Meningkatnya Perekonomian Masyarakat	Pengeluaran Per-Kapita	607.627	608.220	608.813
	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,45	3,40	3,35
	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Indeks Pendidikan	0,568	0,586	0,604
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	0,7655	0,7657	0,7658
	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Wilayah	Persentase Wilayah Terisolir yang Terentaskan	86,47	87,06	87,65
		Persentase Infrastruktur Jalan Kabupaten Status Mantap	36,66	37,50	38,33
	Meningkatnya Keberadaan Ruang Kota dan Lingkungan Hidup Kota yang Nyaman dan Berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	46,93	46,93	46,93
Peningkatan Investasi	Meningkatnya Investasi	Realisasi Investasi PMDN/PMA	5 Milyar	6 Milyar	8 Milyar
		Persentase Kegiatan Promosi Penanaman Modal	20	40	60
		Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	100	100	100
Digitalisasi Pemerintahan	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Indeks SPBE	2,02	2,50	2,75
		Nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Nias	B	BB	BB
		Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara <i>Online</i> dan Terintegrasi	12	15	17
		Opini BPK Terhadap Hasil Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP	WTP
	Meningkatnya Kualitas Aparatur yang Berintegritas Tinggi, Produktif, dan Melayani secara Prima dalam Rangka Peningkatan Kepercayaan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,44	81,81	82,18
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN)	Meningkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN)	Fasilitasi Pelaksanaan Sertifikasi dan Pengawasan serta Pengendalian Penerapan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)	50	55	60
Pengendalian Inflasi	Terkendalinya Inflasi	Indeks Harga Konsumen (IHK)	70	80	90

Pemerintah Kabupaten Nias dapat memilih tema yang akan diambil berdasarkan hasil analisis atas data yang ada. Dalam memilih tema, instansi pemerintah setidaknya perlu mempertimbangkan lima faktor atau kriteria berikut:

1. **Faktor Kesesuaian dengan Prioritas.**
Faktor kesesuaian diartikan sebagai upaya untuk menemukan kesesuaian tema yang dipilih berdasar kondisi prioritas dan data eksisting yang dimiliki. Sebagai contoh, untuk Daerah dapat menemukan kesesuaian dengan meninjau prioritas pembangunan daerah atau tupoksi utama instansi yang ada pada dokumen RPJMD/RPJPD. Artinya suatu tema menjadi masalah khusus dan memperoleh perhatian sehingga dijadikan sebagai prioritas dalam dokumen perencanaan.
2. **Faktor Keparahahan Masalah.**
Urgensi penyelesaian masalah yang menjadi tugas pokok dan fungsi menjadi salah satu faktor utama dalam penentuan tema Reformasi Birokrasi Tematik. Artinya bahwa tema yang dipilih dianggap telah mencapai tahap yang kritis dan tidak dapat diabaikan.
3. **Faktor Dampak terhadap Ekonomi/Kesejahteraan Masyarakat.**
Dampak ekonomi atau kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu faktor utama penentu pemilihan tema Reformasi Birokrasi Tematik. Hal ini dikarenakan, apabila tema tersebut tidak dipilih maka akan mempengaruhi secara signifikan berupa dampak negatif di sektor ekonomi ataupun berdampak pada penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, apabila tema itu dipilih, maka akan mempengaruhi secara signifikan berupa dampak positif di sektor ekonomi ataupun berdampak pada peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat.
4. **Faktor Potensi.**
Faktor lain yang juga sangat penting untuk menjadi pertimbangan dalam pemilihan tema adalah adanya potensi yang dimiliki. Artinya bahwa tema yang dipilih didasarkan pada aset kekayaan yang dimiliki daerah atau instansi yang dapat dijadikan sebagai sarana pembangunan.
5. **Faktor Percepatan Kinerja.**
Percepatan Kinerja dalam pelaksanaan pembangunan Reformasi Birokrasi menjadi faktor utama lainnya dalam pemilihan tema Reformasi Birokrasi Tematik. Artinya bahwa ketika ditemukan kondisi yang tidak signifikan negatif pada data yang ada, maka instansi dapat memilih tema yang masih memerlukan percepatan intervensi agar memperoleh hasil kinerja yang lebih optimal.

Kriteria Penetapan Tema Reformasi Birokrasi Tematik



**Form Penetapan Tema Reformasi Birokrasi Tematik
Pemerintah Kabupaten Nias**

NO	TEMA	KONDISI EKSISTING	TARGET	KESESUAIAN PRIORITAS RPJMD	KEPARAHAN MASALAH	DAMPAK TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	POTENSI YANG DIMILIKI	PERCEPATAN KINERJA	NILAI TOTAL
				SKALA 1 – 10 1 = SANGAT TIDAK SESUAI, 10 = SANGAT SESUAI					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1.	Penanggulangan Kemiskinan	16%	16,35%	10	10	10	10	10	50
2.	Digitalisasi Pemerintahan	-	-	8	9	10	10	10	47
3.	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN)	-	-	7	8	10	9	9	43
4.	Peningkatan Investasi	49%	22,50%	8	7	9	9	8	41
5.	Pengendalian Inflasi	-	-	8	7	10	7	8	40

Dari hasil form Penetapan Tema Reformasi Birokrasi Tematik Pemerintah Kabupaten Nias, maka yang menjadi tema dan fokus yang dilaksanakan pada tahun 2023-2024 adalah sebagai berikut :

1. Panggulangan Kemiskinan
2. Digitalisasi Pemerintahan
3. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN)
4. Peningkatan Investasi
5. Pengendalian Inflasi

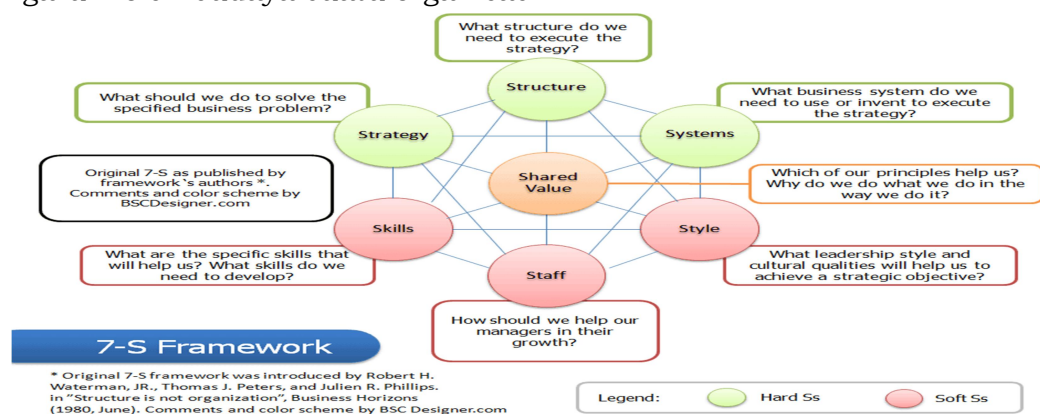


3.4. IDENTIFIKASI MASALAH (*BOTTLENECK*) REFORMASI BIROKRASI GENERAL DAN TEMATIK

Setelah menetapkan tematik yang menjadi fokus, Pemerintah Kabupaten Nias selanjutnya mengidentifikasi dan mengurai akar masalah yang terkait tata kelola pada isu/program prioritas pemerintah. Identifikasi permasalahan menjadi krusial karena seringkali kebijakan yang dibuat tidak menyentuh secara langsung akar permasalahan. Pada akhirnya hal ini seringkali mengakibatkan permasalahan yang sama terjadi berulang karena tidak terselesaikan secara tuntas. Setelah melakukan identifikasi masalah, maka perlu menetapkan fokus intervensi. Dalam hal ini fokus intervensi merupakan aspek yang akan mendapatkan intervensi dalam kegiatan Reformasi Birokrasi Tematik. Hasil dari identifikasi permasalahan yang dianggap memiliki skala potensi paling tinggi, dijadikan sebagai dasar untuk menentukan fokus intervensi.

Penetapan fokus intervensi dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti *fishbone analysis*, metode *critical success factor*, *matrix action priority*, dan metode lainnya. Pada contoh berikut metode lainnya yang dapat digunakan adalah matriks *Eisenhower*. Matriks ini dapat membantu mengatur dan memprioritaskan tugas berdasarkan urgensi (*urgency*) dan kepentingan (*importance*).

Untuk melakukan identifikasi permasalahan reformasi birokrasi secara general dan tematik, amaka dapat menggunakan metode Model 7S McKinsey. Kerangka McKinsey 7S Framework Adalah sebuah model manajemen yang melihat efektifitas organisasi dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Ada beberapa model dan analisa yang dapat digunakan untuk menentukan diposisi mana organisasi itu berada, baik itu menggunakan analisa eksternal, interenal, maupun keduanya. Salah satu model yang diyakini dan bertahan sampai hari ini adalah menggunakan pendekatan internal dengan Model McKinsey Kinsey 7S Framework. McKinsey 7S Framework merupakan alat bagi analisa dan tindakan manjerial yang memberikan struktur untuk melihat organisasi secara keseluruhan, sehingga masalah organisasi dapat didiagnosa dan strategi dapat dikembangkan dan di implementasikan. McKinsey 7s terdiri dari 7 elemen yang dibagi menjadi 2 kelompok besar, yang pertama adalah Kelompok “Keras” atau “*Hard*” yang meliputi *Strategy* (Strategi), *Structure* (Struktur) dan *Systems* (Sistem). Ketiga elemen tersebut dikategorikan sebagai Kelompok “Keras” karena lebih mudah diidentifikasi dan dapat dipengaruhi oleh Manajemen secara langsung. Sedangkan Kelompok kedua adalah Kelompok “Lunak” atau “*Soft*” yang meliputi *Skills* (Keterampilan), *Staff* (Karyawan), *Style* (Gaya Kepemimpinan) dan *Shared Values* (Nilai-nilai). Empat Elemen tersebut dikategorikan sebagai Kelompok “Lunak” karena tidak berwujud dan relatif sulit untuk dijabarkan serta sangat dipengaruhi oleh budaya suatu organisasi



Keterkaitan antar elemen-elemen McKinsey 7S ini dapat dijabarkan berikut ini:

1. **STRATEGY (STRATEGI).**
Strategi merupakan suatu rumusan organisasi yang digunakan untuk mempertahankan dan membangun keunggulan kompetitif yang berkelanjutan dalam persaingan. Strategi pada dasarnya memiliki arahan yang tegas dan jelas sehingga setiap individu ataupun kelompok mengetahui dengan jelas tentang cara yang harus digunakan untuk mencapai sasaran organisasi.
2. **STRUCTURE (STRUKTUR).**
Struktur yang dimaksud disini adalah Struktur Organisasi yang mengatur sistem kerja, komunikasi, wewenang dan tanggung jawab serta pendelegasian tugas kepada unit kerja atau orang-orang tertentu untuk mencapai sasaran organisasi. Struktur merupakan elemen yang dapat terlihat sehingga mudah untuk mengatur ataupun mengubahnya.
3. **SYSTEMS (SISTEM).**
Sistem di dalam McKinsey 7S ini adalah Proses dan Prosedur yang berisikan kegiatan operasional sehari-hari dan pembuatan keputusan dalam perusahaan. Sistem ini merupakan fokus utama manajemen apabila terjadi perubahan organisasi dalam suatu perusahaan.
4. **SKILLS (KETERAMPILAN).**
Skill adalah kemampuan karyawan yang dibutuhkan sehingga dapat berkinerja dengan baik sesuai dengan yang diharapkan sehingga dapat membantu perusahaan dalam mencapai sasarannya. Skill atau Keterampilan yang dimaksud ini juga termasuk Kapabilitas (*Capabilities*) dan Kompetensi (*Competences*).
5. **STAFF (KARYAWAN).**
Staff adalah Karyawan yang dibutuhkan. Elemen Staff berkaitan dengan bagaimana karyawan tersebut diseleksi, direkrut, dilatih, dimotivasi dan dihargai.
6. **STYLE (GAYA KEPEMIMPINAN).**
Elemen Style ini berkaitan dengan Gaya Kepemimpinan Manajemen yang digunakan dalam organisasi untuk mencapai sasaran.
7. **SHARED VALUES (NILAI-NILAI PERUSAHAAN).**
Shared Values merupakan inti utama dari Kerangka McKinsey 7S karena berkaitan dengan nilai-nilai inti yang menjadi budayanya. Shared Values pada dasarnya adalah Standar ataupun norma-norma yang menjadi panduan perilaku bagi semua pegawai dan manajemen.

Identifikasi Permasalahan (*Bottleneck*) Reformasi Birokrasi General Pemerintah Kabupaten Nias Tahun 2023-2024

ELEMEN UTAMA	ELEMEN TURUNAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN (<i>BOTTLENECK</i>)
[1]	[2]	[3]
Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel		
Hard Element	Strategy (Internal dan Eksternal)	1. Belum optimalnya Implementasi Penyederhanaan Birokrasi 2. Belum optimalnya Implementasi Sistem Kerja Baru dengan Model Fleksibel bagi Pegawai 3. Nilai SPBE belum maksimal 4. Nilai SAKIP dan RB belum memperoleh Nilai BB/A/AA 5. Mempertahankan Opini BPK Atas Hasil Laporan Keuangan Daerah WTP
	Structure (Struktur)	Penyederhanaan Struktur Organisasi masih belum optimal
	Systems (Sistem)	1. Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara <i>Online</i> dan Terintegrasi belum maksimal 2. Nilai Indeks Survei Penilaian Integritas (SPI) belum optimal 3. Tingkat Maturitas SPIP masih Level II 4. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat belum optimal

ELEMEN UTAMA	ELEMEN TURUNAN	DENTIFIKASI PERMASALAHAN (<i>BOTTLENECK</i>)
[1]	[2]	[3]
Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel		
		5. Tingkat Implementasi Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi belum optimal 6. Indeks Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik belum optimal 7. Indeks Reformasi Hukum belum optimal 8. Belum Optimalnya Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti yang Sah dan Pertanggungjawaban Nasional 9. Belum optimalnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah 10. Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa belum maksimal
Soft Elements	<i>Skills</i> (Keterampilan)	Manajemen belum sepenuhnya terpusat dan koordinasi antara Perangkat Daerah masih kurang
	<i>Staff</i> (Karyawan)	Tenaga ASN yang profesional belum memadai
	<i>Style</i> (Gaya Kepemimpinan)	1. Partisipatif 2. Komunikasi sangat jelas, demokratis dan terbuka terutama dalam mendengar berbagai saran dan ide dari bawahan 3. Mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan serta meningkatkan kinerja
	<i>Shared Values</i> (Nilai-nilai)	Berpikir, berperilaku, bertindak dengan amanah, transparan, penuh integritas, memegang teguh kode etik, dan loyal kepada bangsa dan negara
Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional		
Hard Elements	<i>Strategy</i> (Internal dan Eksternal)	1. Implementasi Pelaksanaan <i>Core Values</i> ASN belum optimal 2. Kinerja Organisasi belum optimal
	<i>Structure</i> (Struktur)	Penyederhanaan Struktur Organisasi masih belum optimal
	<i>Systems</i> (Sistem)	Peningkatan Indeks Sistem Merit
Soft Elements	<i>Skills</i> (Keterampilan)	Manajemen belum sepenuhnya terpusat dan koordinasi antara Perangkat Daerah masih kurang
	<i>Staff</i> (Karyawan)	Masih kurangnya Profesionalitas ASN
	<i>Style</i> (Gaya Kepemimpinan)	1. Partisipatif 2. Komunikasi sangat jelas, demokratis dan terbuka terutama dalam mendengar berbagai saran dan ide dari bawahan 3. Mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan serta meningkatkan kinerja
	<i>Shared Values</i> (Nilai-nilai)	Berpikir, berperilaku, bertindak dengan amanah, transparan, penuh integritas, memegang teguh kode etik, dan loyal kepada bangsa dan negara

**Identifikasi Permasalahan (*Bottleneck*) Reformasi Birokrasi Tematik
Pemerintah Kabupaten Nias Tahun 2023-2024**

ELEMEN UTAMA (TEMA/INDIKATOR)	ELEMEN TURUNAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN (<i>BOTTLENECK</i>)
[1]	[2]	[3]
PENANGGULANGAN KEMISKINAN		
Database Terpusat (<i>by name, by adreas, by NIK</i>)	<i>Strategy</i> (Internal dan Eksternal)	Masih rendahnya Kualitas dan Keterpaduan Database Kemiskinan
	<i>Structure</i> (Struktur)	Struktur Organisasi yang masih perlu penyempurnaan
	<i>Systems</i> (Sistem)	1. Penggunaan Teknologi yang belum maksimal 2. Sarana dan Prasarana yang belum memadai
	<i>Skills</i> (Keterampilan)	Tenaga Kerja yang profesional belum memadai
	<i>Staff</i> (Karyawan)	Sumber Daya manusia bidang Database masih terbatas
	<i>Style</i> (Gaya Kepemimpinan)	1. Partisipatif 2. Komunikasi sangat jelas, demokratis dan terbuka terutama dalam mendengar berbagai saran dan ide dari bawahan 3. Mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan serta meningkatkan kinerja
	<i>Shared Values</i> (Nilai-nilai)	Berpikir, berperilaku, bertindak dengan amanah, transparan, penuh integritas, memegang teguh kode etik, dan loyal kepada bangsa dan negara
Keselasaran Perencanaan	<i>Strategy</i> (Internal dan Eksternal)	Perencanaan dan penganggaran pengetasan kemiskinan masih belum terpadu listas sector dan instansi

ELEMEN UTAMA (TEMA/INDIKATOR)	ELEMEN TURUNAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN (<i>BOTTLENECK</i>)
[1]	[2]	[3]
Penganggaran	<i>Structure</i> (Struktur)	Struktur Perencanaan Penganggaran masih belum memadai
	<i>Systems</i> (Sistem)	1. Penggunaan Teknologi yang belum maksimal 2. Sarana dan Prasarana yang belum memadai
	<i>Skills</i> (Keterampilan)	Pemanfaatan Teknologi yang terbatas
	<i>Staff</i> (Karyawan)	Tenaga Kerja yang profesional belum memadai
	<i>Style</i> (Gaya Kepemimpinan)	Sumber Daya manusia bidang Perencanaan Penganggaran masih terbatas
	<i>Shared Values</i> (Nilai-nilai)	1. Partisipatif 2. Komunikasi sangat jelas, demokratis dan terbuka terutama dalam mendengar berbagai saran dan ide dari bawahan 3. Mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan serta meningkatkan kinerja
	<i>Strategy</i> (Internal dan Eksternal)	Berpikir, berperilaku, bertindak dengan amanah, transparan, penuh integritas, memegang teguh kode etik, dan loyal kepada bangsa dan negara
	<i>Strategy</i> (Internal dan Eksternal)	Indeks Profesionalitas
	<i>Structure</i> (Struktur)	Struktur Organisasi yang belum Maksimal sesuai kebutuhan
	<i>Systems</i> (Sistem)	Penggunaan Teknologi yang belum maksimal
	<i>Skills</i> (Keterampilan)	Pemanfaatan Teknologi yang terbatas
	<i>Staff</i> (Karyawan)	Tenaga Kerja yang profesional belum memadai
	<i>Style</i> (Gaya Kepemimpinan)	1. Partisipatif 2. Komunikasi sangat jelas, demokratis dan terbuka terutama dalam mendengar berbagai saran dan ide dari bawahan 3. Mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan serta meningkatkan kinerja
	<i>Shared Values</i> (Nilai-nilai)	Berpikir, berperilaku, bertindak dengan amanah, transparan, penuh integritas, memegang teguh kode etik, dan loyal kepada bangsa dan negara
Indeks Kepuasan Masyarakat	<i>Strategy</i> (Internal dan Eksternal)	Berpikir, berperilaku, bertindak dengan amanah, transparan, penuh integritas, memegang teguh kode etik, dan loyal kepada bangsa dan negara
	<i>Structure</i> (Struktur)	Struktur Pelayanan Masyarakat yang masih belum memadai
	<i>Systems</i> (Sistem)	Pelayanan yang berbasis teknologi yang belum maksimal
	<i>Skills</i> (Keterampilan)	Masih kurangnya system yang Cepat dan Tanggap dalam memberikan pelayanan
	<i>Staff</i> (Karyawan)	Sumber Daya manusia yang profesional masih terbatas
	<i>Style</i> (Gaya Kepemimpinan)	1. Partisipatif 2. Komunikasi sangat jelas, demokratis dan terbuka terutama dalam mendengar berbagai saran dan ide dari bawahan 3. Mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan serta meningkatkan kinerja
	<i>Shared Values</i> (Nilai-nilai)	Berpikir, berperilaku, bertindak dengan amanah, transparan, penuh integritas, memegang teguh kode etik, dan loyal kepada bangsa dan negara
Indeks Risiko Bencana	<i>Strategy</i> (Internal dan Eksternal)	Penyediaan Sarana Sanitasi Perumahan
	<i>Structure</i> (Struktur)	Struktur pelaksanaan dan Penilaian Risiko Bencana yang belum optimal
	<i>Systems</i> (Sistem)	Alur Risiko Bencana yang belum maksimal
	<i>Skills</i> (Keterampilan)	Percepatan pelayanan dalam penanggulangan bencana yang belum optimal
	<i>Staff</i> (Karyawan)	Sumber Daya Manusia dalam menghadapi Risiko Bencana masih kurang
	<i>Style</i> (Gaya Kepemimpinan)	1. Partisipatif 2. Komunikasi sangat jelas, demokratis dan terbuka terutama dalam mendengar berbagai saran dan ide dari bawahan 3. Mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan serta meningkatkan kinerja
	<i>Shared Values</i> (Nilai-nilai)	Berpikir, berperilaku, bertindak dengan amanah, transparan, penuh integritas, memegang teguh kode etik, dan loyal kepada bangsa dan negara
Nilai Tukar Petani (NTP)	<i>Strategy</i> (Internal dan Eksternal)	Peningkatan Perekonomian Masyarakat belum optimal

ELEMEN UTAMA (TEMA/INDIKATOR)	ELEMEN TURUNAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN (<i>BOTTLENECK</i>)
[1]	[2]	[3]
	<i>Structure</i> (Struktur)	Struktur Organisasi yang belum Maksimal sesuai kebutuhan
	<i>Systems</i> (Sistem)	1. Belum maksimalnya Peningkatan Penerimaan Petani dari hasil usahatani dan pengeluaran pangan serta pengeluaran non pangan 2. Belum optimalnya Peningkatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
	<i>Skills</i> (Keterampilan)	1. Keterbatasan teknologi 2. Tingkat pendidikan yang rendah 3. Terbatasnya lahan garapan
	<i>Staff</i> (Karyawan)	Keahlian yang rendah
	<i>Style</i> (Gaya Kepemimpinan)	1. Partisipatif 2. Komunikasi sangat jelas, demokratis dan terbuka terutama dalam mendengar berbagai saran dan ide dari bawahan 3. Mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan serta meningkatkan kinerja
	<i>Shared Values</i> (Nilai-nilai)	Berpikir, berperilaku, bertindak dengan amanah, transparan, penuh integritas, memegang teguh kode etik, dan loyal kepada bangsa dan negara
Pengeluaran Per-Kapita	Strategy (Internal dan Eksternal)	Peningkatan Perekonomian Masyarakat belum optimal
	<i>Structure</i> (Struktur)	Struktur Organisasi yang belum Maksimal sesuai kebutuhan
	<i>Systems</i> (Sistem)	1. Belum optimalnya Kuantitas dan Kualitas Produksi Masyarakat 2. Belum maksimalnya Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
	<i>Skills</i> (Keterampilan)	Rendahnya kualitas produksi masyarakat
	<i>Staff</i> (Karyawan)	Kualitas dan kapabilitas yang rendah
	<i>Style</i> (Gaya Kepemimpinan)	1. Partisipatif 2. Komunikasi sangat jelas, demokratis dan terbuka terutama dalam mendengar berbagai saran dan ide dari bawahan 3. Mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan serta meningkatkan kinerja
	<i>Shared Values</i> (Nilai-nilai)	Berpikir, berperilaku, bertindak dengan amanah, transparan, penuh integritas, memegang teguh kode etik, dan loyal kepada bangsa dan negara
Tingkat Pengangguran Terbuka	Strategy (Internal dan Eksternal)	Terbatasnya Lapangan Pekerjaan
	<i>Structure</i> (Struktur)	Struktur Organisasi yang belum Maksimal sesuai kebutuhan
	<i>Systems</i> (Sistem)	Belum optimalnya Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
	<i>Skills</i> (Keterampilan)	Tenaga Kerja yang profesional belum memadai
	<i>Staff</i> (Karyawan)	Pelatihan dan Penempatan Kerja belum maksimal
	<i>Style</i> (Gaya Kepemimpinan)	1. Partisipatif 2. Komunikasi sangat jelas, demokratis dan terbuka terutama dalam mendengar berbagai saran dan ide dari bawahan 3. Mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan serta meningkatkan kinerja
	<i>Shared Values</i> (Nilai-nilai)	Berpikir, berperilaku, bertindak dengan amanah, transparan, penuh integritas, memegang teguh kode etik, dan loyal kepada bangsa dan negara
Indeks Pendidikan	Strategy (Internal dan Eksternal)	Rendahnya Tingkat Pendidikan Masyarakat
	<i>Structure</i> (Struktur)	Struktur Organisasi yang belum Maksimal sesuai kebutuhan
	<i>Systems</i> (Sistem)	1. Belum optimalnya Pengembangan program pendidikan kesetaraan di setiap kecamatan wilayah Kabupaten Nias 2. Belum optimalnya Pengembangan minat belajar untuk anak usia sekolah 3. Belum optimalnya Pengembangan/ pembenahan sarana gedung sekolah termasuk aksesibilitas infrastruktur antara lain jalan, jembatan, dan sarana lainnya
	<i>Skills</i>	Pendidikan yang rendah sehingga tidak mampu berkompetisi

ELEMEN UTAMA (TEMA/INDIKATOR)	ELEMEN TURUNAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN (<i>BOTTLENECK</i>)
[1]	[2]	[3]
	(Keterampilan)	
	<i>Staff</i> (Karyawan)	Kualitas Pendidikan Masyarakat yang rendah
	Style (Gaya Kepemimpinan)	1. Partisipatif 2. Komunikasi sangat jelas, demokratis dan terbuka terutama dalam mendengar berbagai saran dan ide dari bawahan 3. Mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan serta meningkatkan kinerja
	<i>Shared Values</i> (Nilai-nilai)	Berpikir, berperilaku, bertindak dengan amanah, transparan, penuh integritas, memegang teguh kode etik, dan loyal kepada bangsa dan negara
Indeks Kesehatan	Strategy (Internal dan Eksternal)	Rendahnya Derajat Kesehatan Masyarakat
	<i>Structure</i> (Struktur)	Struktur Organisasi yang belum Maksimal sesuai kebutuhan
	<i>Systems</i> (Sistem)	Rendahnya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
	<i>Skills</i> (Keterampilan)	Kapasitas rendah
	<i>Staff</i> (Karyawan)	Rendahnya Kualitas Dan Derajat Kesehatan Masyarakat
	Style (Gaya Kepemimpinan)	1. Partisipatif 2. Komunikasi sangat jelas, demokratis dan terbuka terutama dalam mendengar berbagai saran dan ide dari bawahan 3. Mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan serta meningkatkan kinerja
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	<i>Shared Values</i> (Nilai-nilai)	Berpikir, berperilaku, bertindak dengan amanah, transparan, penuh integritas, memegang teguh kode etik, dan loyal kepada bangsa dan negara
	Strategy (Internal dan Eksternal)	Penguatan Strategi pengarusutamaan gender di sektor utama pelayanan
	<i>Structure</i> (Struktur)	Struktur Strategi pengarusutamaan gender di sektor utama pelayanan belum optimal
	<i>Systems</i> (Sistem)	Strategi pengarusutamaan gender di sektor utama pelayanan belum maksimal
	<i>Skills</i> (Keterampilan)	Pendidikan yang rendah sehingga tidak mampu berkompetisi
	<i>Staff</i> (Karyawan)	Sumber Daya Manusia yang belum maksimal
Persentase Wilayah Terisolir yang Terentaskan	Style (Gaya Kepemimpinan)	1. Partisipatif 2. Komunikasi sangat jelas, demokratis dan terbuka terutama dalam mendengar berbagai saran dan ide dari bawahan 3. Mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan serta meningkatkan kinerja
	<i>Shared Values</i> (Nilai-nilai)	Berpikir, berperilaku, bertindak dengan amanah, transparan, penuh integritas, memegang teguh kode etik, dan loyal kepada bangsa dan negara
	Strategy (Internal dan Eksternal)	Masih belum optimalnya Konektivitas Wilayah antar Daerah dan Penataan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup yang berkualitas
	<i>Structure</i> (Struktur)	Struktur Organisasi yang belum Maksimal sesuai kebutuhan
	<i>Systems</i> (Sistem)	Belum optimalnya Peningkatan Pembangunan Jalan Wilayah Terisolir Kabupaten
	<i>Skills</i> (Keterampilan)	Kualitas Jalan Wilayah Terisolir yang kurang memadai
Persentase Infrastruktur Jalan Kabupaten Status Mantap	<i>Staff</i> (Karyawan)	Kurangnya SDM
	Style (Gaya Kepemimpinan)	1. Partisipatif 2. Komunikasi sangat jelas, demokratis dan terbuka terutama dalam mendengar berbagai saran dan ide dari bawahan 3. Mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan serta meningkatkan kinerja
	<i>Shared Values</i> (Nilai-nilai)	Berpikir, berperilaku, bertindak dengan amanah, transparan, penuh integritas, memegang teguh kode etik, dan loyal kepada bangsa dan negara
	Strategy (Internal dan Eksternal)	Masih belum optimalnya Konektivitas Wilayah antar Daerah dan Penataan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup yang berkualitas
	<i>Structure</i> (Struktur)	Struktur Organisasi yang belum Maksimal sesuai kebutuhan
	<i>Systems</i> (Sistem)	Belum optimalnya Peningkatan Rekonstruksi Jalan, Rehabilitasi Jalan, pemeliharaan Rutin Jembatan, pemeliharaan Rutin Jalan, Penggantian Jembatan
	<i>Skills</i>	Belum optimalnya Peningkatan Pembangunan Jalan Wilayah

ELEMEN UTAMA (TEMA/INDIKATOR)	ELEMEN TURUNAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN (<i>BOTTLENECK</i>)
[1]	[2]	[3]
	(Keterampilan)	Terisolir Kabupaten
	<i>Staff</i> (Karyawan)	Kualitas Jalan Mantap yang kurang memadai
	Style (Gaya Kepemimpinan)	1. Partisipatif 2. Komunikasi sangat jelas, demokratis dan terbuka terutama dalam mendengar berbagai saran dan ide dari bawahan 3. Mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan serta meningkatkan kinerja
	<i>Shared Values</i> (Nilai-nilai)	Berpikir, berperilaku, bertindak dengan amanah, transparan, penuh integritas, memegang teguh kode etik, dan loyal kepada bangsa dan negara
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Strategy (Internal dan Eksternal)	Masih belum optimalnya Konektivitas Wilayah antar Daerah dan Penataan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup yang berkualitas
	<i>Structure</i> (Struktur)	Struktur Organisasi yang belum Maksimal sesuai kebutuhan
	<i>Systems</i> (Sistem)	Belum optimalnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
	<i>Skills</i> (Keterampilan)	Kualitas Lingkungan Hidup yang rendah
	<i>Staff</i> (Karyawan)	Surangnya SDM yang mampu menganalisa Indeks Lingkungan Hidup
	Style (Gaya Kepemimpinan)	1. Partisipatif 2. Komunikasi sangat jelas, demokratis dan terbuka terutama dalam mendengar berbagai saran dan ide dari bawahan 3. Mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan serta meningkatkan kinerja
	<i>Shared Values</i> (Nilai-nilai)	Berpikir, berperilaku, bertindak dengan amanah, transparan, penuh integritas, memegang teguh kode etik, dan loyal kepada bangsa dan negara
DIGITALISASI PEMERINTAHAN		
Persentase SDM Pengelola data yang memiliki pemahaman kategori baik	Strategy (Internal dan Eksternal)	Rendahnya kualitas database
	<i>Structure</i> (Struktur)	Struktur Pengelola data yang memiliki pemahaman kategori baik belum memadai
	<i>Systems</i> (Sistem)	Pengelola data yang memiliki pemahaman kategori baik belum optimal
	<i>Skills</i> (Keterampilan)	Pengelola data yang memiliki pemahaman kategori baik belum maksimal
	<i>Staff</i> (Karyawan)	Kualitas dan Kuantitas SDM yang memadai
	Style (Gaya Kepemimpinan)	1. Partisipatif 2. Komunikasi sangat jelas, demokratis dan terbuka terutama dalam mendengar berbagai saran dan ide dari bawahan 3. Mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan serta meningkatkan kinerja
	<i>Shared Values</i> (Nilai-nilai)	Berpikir, berperilaku, bertindak dengan amanah, transparan, penuh integritas, memegang teguh kode etik, dan loyal kepada bangsa dan negara
Jumlah Jenis Media Informasi yang digunakan	Strategy (Internal dan Eksternal)	Rendahnya kualitas infrastruktur Sistem informasi stunting
	<i>Structure</i> (Struktur)	Struktur Informasi yang belum maksimal
	<i>Systems</i> (Sistem)	Media informasi yang digunakan masih belum memadai
	<i>Skills</i> (Keterampilan)	Belum optimalnya Media informasi yang digunakan
	<i>Staff</i> (Karyawan)	Kualitas dan Kuantitas SDM yang memadai
	Style (Gaya Kepemimpinan)	1. Partisipatif 2. Komunikasi sangat jelas, demokratis dan terbuka terutama dalam mendengar berbagai saran dan ide dari bawahan 3. Mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan serta meningkatkan kinerja
	<i>Shared Values</i> (Nilai-nilai)	Berpikir, berperilaku, bertindak dengan amanah, transparan, penuh integritas, memegang teguh kode etik, dan loyal kepada bangsa dan negara

ELEMEN UTAMA (TEMA/INDIKATOR)	ELEMEN TURUNAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN (<i>BOTTLENECK</i>)
[1]	[2]	[3]
Persentase perangkat pendukung system informasi yang sesuai	Strategy (Internal dan Eksternal)	Rendahnya kualitas infrastruktur Sistem informasi stunting
	Structure (Struktur)	Struktur pendukung system informasi yang sesuai belum optimal
	Systems (Sistem)	Perangkat pendukung system informasi yang sesuai belum maksimal
	Skills (Keterampilan)	System informasi yang sesuai belum memadai
	Staff (Karyawan)	Kualitas dan Kuantitas SDM yang memadai
	Style (Gaya Kepemimpinan)	1. Partisipatif 2. Komunikasi sangat jelas, demokratis dan terbuka terutama dalam mendengar berbagai saran dan ide dari bawahan 3. Mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan serta meningkatkan kinerja
	Shared Values (Nilai-nilai)	Berpikir, berperilaku, bertindak dengan amanah, transparan, penuh integritas, memegang teguh kode etik, dan loyal kepada bangsa dan negara
Indeks SPBE	Strategy (Internal dan Eksternal)	Belum optimalnya Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip <i>good governance</i>
	Structure (Struktur)	Struktur Organisasi yang belum Maksimal sesuai kebutuhan
	Systems (Sistem)	Belum optimalnya Penyediaan Pusat Data Terpadu, Jaringan Intra Pemerintah, Sistem Penghubung Layanan Pemerintah, Aplikasi Layanan SPBE serta Keamanan Informasi Pemerintah.
	Skills (Keterampilan)	Masih kurangnya pengetahuan terhadap Aplikasi Layanan SPBE
	Staff (Karyawan)	Kurangnya SDM
	Style (Gaya Kepemimpinan)	1. Partisipatif 2. Komunikasi sangat jelas, demokratis dan terbuka terutama dalam mendengar berbagai saran dan ide dari bawahan 3. Mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan serta meningkatkan kinerja
	Shared Values (Nilai-nilai)	Berpikir, berperilaku, bertindak dengan amanah, transparan, penuh integritas, memegang teguh kode etik, dan loyal kepada bangsa dan negara
Nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Nias	Strategy (Internal dan Eksternal)	Belum optimalnya Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip <i>good governance</i>
	Structure (Struktur)	Struktur Organisasi yang belum Maksimal sesuai kebutuhan
	Systems (Sistem)	1. Belum optimalnya Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Nias 2. Belum optimalnya Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Nias 3. Belum optimalnya Penyusunan Pohon Kinerja, Cascading, Rencana Aksi Pemerintah Kabupaten Nias 4. Belum optimalnya Penyusunan <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi
	Skills (Keterampilan)	Belum meratanya Kualitas dan Kuantitas ASN yang menangani SAKIP
	Staff (Karyawan)	Kurangnya SDM
	Style (Gaya Kepemimpinan)	1. Partisipatif 2. Komunikasi sangat jelas, demokratis dan terbuka terutama dalam mendengar berbagai saran dan ide dari bawahan 3. Mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan serta meningkatkan kinerja
	Shared Values (Nilai-nilai)	Berpikir, berperilaku, bertindak dengan amanah, transparan, penuh integritas, memegang teguh kode etik, dan loyal kepada bangsa dan negara
Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi	Strategy (Internal dan Eksternal)	Belum optimalnya Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip <i>good governance</i>
	Structure (Struktur)	Struktur Organisasi yang belum Maksimal sesuai kebutuhan
	Systems (Sistem)	Belum optimalnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah
	Skills (Keterampilan)	Minimnya pengetahuan tentang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah
	Staff (Karyawan)	Kurangnya SDM

ELEMEN UTAMA (TEMA/INDIKATOR)	ELEMEN TURUNAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN (<i>BOTTLENECK</i>)
[1]	[2]	[3]
Opini BPK Terhadap Hasil Laporan Keuangan Daerah	Style (Gaya Kepemimpinan)	1. Partisipatif 2. Komunikasi sangat jelas, demokratis dan terbuka terutama dalam mendengar berbagai saran dan ide dari bawahan 3. Mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan serta meningkatkan kinerja
	<i>Shared Values</i> (Nilai-nilai)	Berpikir, berperilaku, bertindak dengan amanah, transparan, penuh integritas, memegang teguh kode etik, dan loyal kepada bangsa dan negara
	Strategy (Internal dan Eksternal)	Belum optimalnya Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip <i>good governance</i>
	<i>Structure</i> (Struktur)	Struktur Organisasi yang belum Maksimal sesuai kebutuhan
	<i>Systems</i> (Sistem)	1. Belum optimalnya Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban 2. Belum optimalnya Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggung-jawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran 3. Belum optimalnya Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
	<i>Skills</i> (Keterampilan)	Masih Rendahnya kemampuan pengelola keuangan daerah
	<i>Staff</i> (Karyawan)	Kurangnya SDM
Indeks Kepuasan Masyarakat	Style (Gaya Kepemimpinan)	1. Partisipatif 2. Komunikasi sangat jelas, demokratis dan terbuka terutama dalam mendengar berbagai saran dan ide dari bawahan 3. Mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan serta meningkatkan kinerja
	<i>Shared Values</i> (Nilai-nilai)	Berpikir, berperilaku, bertindak dengan amanah, transparan, penuh integritas, memegang teguh kode etik, dan loyal kepada bangsa dan negara
	Strategy (Internal dan Eksternal)	Belum optimalnya Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip <i>good governance</i>
	<i>Structure</i> (Struktur)	Struktur Organisasi yang belum Maksimal sesuai kebutuhan
	<i>Systems</i> (Sistem)	Belum maksimalnya Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan Pelayanan Publik dapat dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengolahan dan penyajian hasil survei
	<i>Skills</i> (Keterampilan)	Kualitas layanan yang masih rendah
	<i>Staff</i> (Karyawan)	Kemampuan kerja pegawai yang masih rendah
Fasilitasi Pelaksanaan Sertifikasi dan Pengawasan serta Penerapan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)	Style (Gaya Kepemimpinan)	1. Partisipatif 2. Komunikasi sangat jelas, demokratis dan terbuka terutama dalam mendengar berbagai saran dan ide dari bawahan 3. Mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan serta meningkatkan kinerja
	<i>Shared Values</i> (Nilai-nilai)	Berpikir, berperilaku, bertindak dengan amanah, transparan, penuh integritas, memegang teguh kode etik, dan loyal kepada bangsa dan negara
	Strategy (Internal dan Eksternal)	Kualitas produk Lokal yang kalah bersaing, kurangnya kesadaran dari masyarakat sendiri, serta faktor promosi dan pemasaran yang kurang
	<i>Structure</i> (Struktur)	Struktur Pelaksanaan Sertifikasi dan Pengawasan serta Pengendalian Penerapan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) belum maksimal
	<i>Systems</i> (Sistem)	Belum optimalnya Pelaksanaan Sertifikasi dan Pengawasan serta Pengendalian Penerapan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)
	<i>Skills</i>	Kemampuan Pelaksanaan Sertifikasi dan Pengawasan serta

PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI (PDN)

ELEMEN UTAMA (TEMA/INDIKATOR)	ELEMEN TURUNAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN (<i>BOTTLENECK</i>)
[1]	[2]	[3]
	(Keterampilan)	Pengendalian Penerapan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) yang masih rendah
	<i>Staff</i> (Karyawan)	Kualitas dan Kuantitas SDM yang mamadai
	Style (Gaya Kepemimpinan)	1. Partisipatif 2. Komunikasi sangat jelas, demokratis dan terbuka terutama dalam mendengar berbagai saran dan ide dari bawahan 3. Mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan serta meningkatkan kinerja
	<i>Shared Values</i> (Nilai-nilai)	Berpikir, berperilaku, bertindak dengan amanah, transparan, penuh integritas, memegang teguh kode etik, dan loyal kepada bangsa dan negara
Tingkat Kematangan UKPBJ	Strategy (Internal dan Eksternal)	Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) yang Belum Matang
	<i>Structure</i> (Struktur)	Penggunaan teknologi dalam pengadaan Persentase barang/jasa PDN pada RUP masih belum terpenuhi
	<i>Systems</i> (Sistem)	Kemampuan dalam mengolah database masih rendah
	<i>Skills</i> (Keterampilan)	Kualitas dan Kuantitas SDM yang mamadai
	<i>Staff</i> (Karyawan)	Kualitas dan Kuantitas SDM yang mamadai
	Style (Gaya Kepemimpinan)	1. Partisipatif 2. Komunikasi sangat jelas, demokratis dan terbuka terutama dalam mendengar berbagai saran dan ide dari bawahan 3. Mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan serta meningkatkan kinerja
	<i>Shared Values</i> (Nilai-nilai)	Berpikir, berperilaku, bertindak dengan amanah, transparan, penuh integritas, memegang teguh kode etik, dan loyal kepada bangsa dan negara
Tingkat Kepatuhan Pelaporan Melalui Sistem	Strategy (Internal dan Eksternal)	Sistem Teknologi yang Belum Optimal dalam Menunjang Pengadaan Barang dan Jasa
	<i>Structure</i> (Struktur)	Penggunaan teknologi dalam pengadaan Persentase barang/jasa PDN pada RUP masih belum terpenuhi
	<i>Systems</i> (Sistem)	Kemampuan dalam mengolah database masih rendah
	<i>Skills</i> (Keterampilan)	Kualitas dan Kuantitas SDM yang mamadai
	<i>Staff</i> (Karyawan)	Kualitas dan Kuantitas SDM yang mamadai
	Style (Gaya Kepemimpinan)	1. Partisipatif 2. Komunikasi sangat jelas, demokratis dan terbuka terutama dalam mendengar berbagai saran dan ide dari bawahan 3. Mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan serta meningkatkan kinerja
	<i>Shared Values</i> (Nilai-nilai)	Berpikir, berperilaku, bertindak dengan amanah, transparan, penuh integritas, memegang teguh kode etik, dan loyal kepada bangsa dan negara
Persentase Ketepatan Pembayaran Termin	Strategy (Internal dan Eksternal)	Pembayaran termin yang tidak tepat waktu
	<i>Structure</i> (Struktur)	Struktur Pengadaan barang/jasa PDN pada RUP belum terpenuhi
	<i>Systems</i> (Sistem)	Penggunaan teknologi dalam pengadaan Persentase barang/jasa PDN pada RUP masih belum terpenuhi
	<i>Skills</i> (Keterampilan)	Kemampuan dalam mengolah database masih rendah
	<i>Staff</i> (Karyawan)	Kualitas dan Kuantitas SDM yang mamadai
	Style (Gaya Kepemimpinan)	1. Partisipatif 2. Komunikasi sangat jelas, demokratis dan terbuka terutama dalam mendengar berbagai saran dan ide dari bawahan 3. Mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan serta meningkatkan kinerja
	<i>Shared Values</i> (Nilai-nilai)	Berpikir, berperilaku, bertindak dengan amanah, transparan, penuh integritas, memegang teguh kode etik, dan loyal kepada bangsa dan negara
Jumlah pelaku usaha dan UMKM yang paham dengan proses e-tendering, P3DN, dst	Strategy (Internal dan Eksternal)	Pelaku Usaha yang Belum Memahami terkait e-tendering, epurchasing, dll
	<i>Structure</i> (Struktur)	Struktur Pengadaan barang/jasa PDN pada RUP belum terpenuhi
	<i>Systems</i> (Sistem)	Penggunaan teknologi dalam pengadaan Persentase barang/jasa PDN pada RUP masih belum terpenuhi
	<i>Skills</i>	Kemampuan dalam mengolah database masih rendah

ELEMEN UTAMA (TEMA/INDIKATOR)	ELEMEN TURUNAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN (<i>BOTTLENECK</i>)
[1]	[2]	[3]
	(Keterampilan)	
	<i>Staff</i> (Karyawan)	Kualitas dan Kuantitas SDM yang memadai
	Style (Gaya Kepemimpinan)	1. Partisipatif 2. Komunikasi sangat jelas, demokratis dan terbuka terutama dalam mendengar berbagai saran dan ide dari bawahan 3. Mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan serta meningkatkan kinerja
	<i>Shared Values</i> (Nilai-nilai)	Berpikir, berperilaku, bertindak dengan amanah, transparan, penuh integritas, memegang teguh kode etik, dan loyal kepada bangsa dan negara
Persentase Barang/Jasa PDN pada RUP terpenuhi	Strategy (Internal dan Eksternal)	Jumlah barang/jasa yang dibutuhkan tidak dapat dipenuhi oleh penyedia
	<i>Structure</i> (Struktur)	Struktur Pengadaan barang/jasa PDN pada RUP belum terpenuhi
	<i>Systems</i> (Sistem)	Penggunaan teknologi dalam pengadaan Persentase barang/jasa PDN pada RUP masih belum terpenuhi
	<i>Skills</i> (Keterampilan)	Kemampuan dalam mengolah database masih rendah
	<i>Staff</i> (Karyawan)	Kualitas dan Kuantitas SDM yang memadai
	Style (Gaya Kepemimpinan)	1. Partisipatif 2. Komunikasi sangat jelas, demokratis dan terbuka terutama dalam mendengar berbagai saran dan ide dari bawahan 3. Mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan serta meningkatkan kinerja
	<i>Shared Values</i> (Nilai-nilai)	Berpikir, berperilaku, bertindak dengan amanah, transparan, penuh integritas, memegang teguh kode etik, dan loyal kepada bangsa dan negara
PENGENDALIAN INVESTASI		
Realisasi Investasi PMDN/PMA	Strategy (Internal dan Eksternal)	Belum optimalnya Pengembangan Investasi yang ada di Kabupaten Nias
	<i>Structure</i> (Struktur)	Struktur Organisasi yang belum Maksimal sesuai kebutuhan
	<i>Systems</i> (Sistem)	Belum optimalnya Peningkatan Pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kab/Kota
	<i>Skills</i> (Keterampilan)	Masih belum ada Peningkatan Nilai Investasi PMDN/PMA
	<i>Staff</i> (Karyawan)	Kualitas dan Kuantitas SDM yang memadai
	Style (Gaya Kepemimpinan)	1. Partisipatif 2. Komunikasi sangat jelas, demokratis dan terbuka terutama dalam mendengar berbagai saran dan ide dari bawahan Mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan serta meningkatkan kinerja
	<i>Shared Values</i> (Nilai-nilai)	Berpikir, berperilaku, bertindak dengan amanah, transparan, penuh integritas, memegang teguh kode etik, dan loyal kepada bangsa dan negara
Persentase Kegiatan Promosi Penanaman Modal	Strategy (Internal dan Eksternal)	Masih belum ada Peningkatan Nilai Investasi PMDN/PMA
	<i>Structure</i> (Struktur)	Struktur Organisasi yang belum Maksimal sesuai kebutuhan
	<i>Systems</i> (Sistem)	Belum optimalnya Penyusunan Dokumen Potensi dan Peluang Investasi Daerah
	<i>Skills</i> (Keterampilan)	Masih belum ada Peningkatan Nilai Investasi PMDN/PMA
	<i>Staff</i> (Karyawan)	Kualitas dan Kuantitas SDM yang memadai
	Style (Gaya Kepemimpinan)	1. Partisipatif 2. Komunikasi sangat jelas, demokratis dan terbuka terutama dalam mendengar berbagai saran dan ide dari bawahan Mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan serta meningkatkan kinerja
	<i>Shared Values</i> (Nilai-nilai)	Berpikir, berperilaku, bertindak dengan amanah, transparan, penuh integritas, memegang teguh kode etik, dan loyal kepada bangsa dan negara
Jumlah Peta Potensi Investasi Daerah yang diupdate dan tersedia di website DPMPSTP dan Pemerintah Daerah	Strategy (Internal dan Eksternal)	Rendahnya kemampuan Pemda dalam mengidentifikasi dan menjual potensi investasi daerah
	<i>Structure</i> (Struktur)	Belum optimalnya Peta Potensi Investasi Daerah yang diupdate dan tersedia di website DPMPSTP dan Pemerintah Daerah
	<i>Systems</i> (Sistem)	Masih belum ada Peningkatan Nilai Investasi PMDN/PMA
	<i>Skills</i>	Kualitas dan Kuantitas SDM yang memadai

ELEMEN UTAMA (TEMA/INDIKATOR)	ELEMEN TURUNAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN (<i>BOTTLENECK</i>)
[1]	[2]	[3]
	(Keterampilan)	
	Staff (Karyawan)	Kualitas dan Kuantitas SDM yang memadai
	Style (Gaya Kepemimpinan)	1. Partisipatif 2. Komunikasi sangat jelas, demokratis dan terbuka terutama dalam mendengar berbagai saran dan ide dari bawahan 3. Mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan serta meningkatkan kinerja
	Shared Values (Nilai-nilai)	Berpikir, berperilaku, bertindak dengan amanah, transparan, penuh integritas, memegang teguh kode etik, dan loyal kepada bangsa dan negara
Persentase investor yang berkomitmen untuk melakukan investasi	Strategy (Internal dan Eksternal)	Rendahnya kemampuan Pemda dalam mengidentifikasi dan menjual potensi investasi daerah
	Structure (Struktur)	Belum optimalnya investor yang berkomitmen untuk melakukan investasi
	Systems (Sistem)	Masih belum ada Peningkatan Nilai Investasi PMDN/PMA
	Skills (Keterampilan)	Kualitas dan Kuantitas SDM yang memadai
	Staff (Karyawan)	Kualitas dan Kuantitas SDM yang memadai
	Style (Gaya Kepemimpinan)	1. Partisipatif 2. Komunikasi sangat jelas, demokratis dan terbuka terutama dalam mendengar berbagai saran dan ide dari bawahan 3. Mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan serta meningkatkan kinerja
	Shared Values (Nilai-nilai)	Berpikir, berperilaku, bertindak dengan amanah, transparan, penuh integritas, memegang teguh kode etik, dan loyal kepada bangsa dan negara
Hasil Penilaian Mandiri Kinerja PTSP	Strategy (Internal dan Eksternal)	Rendahnya kualitas penyelenggaraan pelayanan perizinan
	Structure (Struktur)	Belum optimalnya Penilaian Mandiri Kinerja PTSP
	Systems (Sistem)	Masih belum ada Peningkatan Nilai Investasi PMDN/PMA
	Skills (Keterampilan)	Kualitas dan Kuantitas SDM yang memadai
	Staff (Karyawan)	Kualitas dan Kuantitas SDM yang memadai
	Style (Gaya Kepemimpinan)	1. Partisipatif 2. Komunikasi sangat jelas, demokratis dan terbuka terutama dalam mendengar berbagai saran dan ide dari bawahan 3. Mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan serta meningkatkan kinerja
	Shared Values (Nilai-nilai)	Berpikir, berperilaku, bertindak dengan amanah, transparan, penuh integritas, memegang teguh kode etik, dan loyal kepada bangsa dan negara
Iklim Usaha Industri*	Strategy (Internal dan Eksternal)	Iklim investasi yang tidak kondusif untuk meningkatkan realisasi investasi
	Structure (Struktur)	Belum optimalnya Iklim Usaha Industri
	Systems (Sistem)	Masih belum ada Peningkatan Nilai Investasi PMDN/PMA
	Skills (Keterampilan)	Kualitas dan Kuantitas SDM yang memadai
	Staff (Karyawan)	Kualitas dan Kuantitas SDM yang memadai
	Style (Gaya Kepemimpinan)	1. Partisipatif 2. Komunikasi sangat jelas, demokratis dan terbuka terutama dalam mendengar berbagai saran dan ide dari bawahan 3. Mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan serta meningkatkan kinerja
	Shared Values (Nilai-nilai)	Berpikir, berperilaku, bertindak dengan amanah, transparan, penuh integritas, memegang teguh kode etik, dan loyal kepada bangsa dan negara
Persentase Peningkatan Kepatuhan Pelaporan LKPM	Strategy (Internal dan Eksternal)	Rendahnya Kepatuhan Pelaporan LKPM
	Structure (Struktur)	Belum optimalnya Peningkatan Kepatuhan Pelaporan LKPM
	Systems (Sistem)	Masih belum ada Peningkatan Nilai Investasi PMDN/PMA
	Skills (Keterampilan)	Kualitas dan Kuantitas SDM yang memadai
	Staff (Karyawan)	Kualitas dan Kuantitas SDM yang memadai
	Style (Gaya Kepemimpinan)	1. Partisipatif 2. Komunikasi sangat jelas, demokratis dan terbuka terutama

ELEMEN UTAMA (TEMA/INDIKATOR)	ELEMEN TURUNAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN (<i>BOTTLENECK</i>)
[1]	[2]	[3]
		dalam mendengar berbagai saran dan ide dari bawahan 3. Mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan serta meningkatkan kinerja
	<i>Shared Values</i> (Nilai-nilai)	Berpikir, berperilaku, bertindak dengan amanah, transparan, penuh integritas, memegang teguh kode etik, dan loyal kepada bangsa dan negara
Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Strategy (Internal dan Eksternal)	Masih belum ada Peningkatan Nilai Investasi PMDN/PMA
	<i>Structure</i> (Struktur)	Struktur Organisasi yang belum Maksimal sesuai kebutuhan
	<i>Systems</i> (Sistem)	Belum optimalnya Peningkatan Sistem Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal
	<i>Skills</i> (Keterampilan)	Masih belum ada Peningkatan Nilai Investasi PMDN/PMA
	<i>Staff</i> (Karyawan)	Kualitas dan Kuantitas SDM yang memadai
	Style (Gaya Kepemimpinan)	1. Partisipatif 2. Komunikasi sangat jelas, demokratis dan terbuka terutama dalam mendengar berbagai saran dan ide dari bawahan 3. Mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan serta meningkatkan kinerja
	<i>Shared Values</i> (Nilai-nilai)	Berpikir, berperilaku, bertindak dengan amanah, transparan, penuh integritas, memegang teguh kode etik, dan loyal kepada bangsa dan negara
PENINGKATAN INFLASI		
Indeks Harga Konsumen (IHK)	Strategy (Internal dan Eksternal)	Rendahnya konektivitas jaringan distribusi pangan, kesenjangan informasi dan distorsi struktur pasar dan produktivitas pangan
	<i>Structure</i> (Struktur)	Struktur atau Alur Perhitungan Indeks Harga Konsumen (IHK) belum optimal
	<i>Systems</i> (Sistem)	Peningkatan Indeks Harga Konsumen (IHK) belum maksimal
	<i>Skills</i> (Keterampilan)	Perhitungan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang akurat belum maksimal
	<i>Staff</i> (Karyawan)	SDM bidang Statistik yang belum maksimal
	Style (Gaya Kepemimpinan)	1. Partisipatif 2. Komunikasi sangat jelas, demokratis dan terbuka terutama dalam mendengar berbagai saran dan ide dari bawahan 3. Mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan serta meningkatkan kinerja
	<i>Shared Values</i> (Nilai-nilai)	Berpikir, berperilaku, bertindak dengan amanah, transparan, penuh integritas, memegang teguh kode etik, dan loyal kepada bangsa dan negara
Tingkat Produktivitas Perikanan, Pertanian dan Perkebunan	Strategy (Internal dan Eksternal)	Belum optimalnya peran SDM penyuluh petani, perkebunan dan perikanan yang berkualitas
	<i>Structure</i> (Struktur)	Struktur Produktivitas Perikanan, Pertanian dan Perkebunan belum optimal
	<i>Systems</i> (Sistem)	Produktivitas Perikanan, Pertanian dan Perkebunan yang belum ada peningkatan yang signifikan
	<i>Skills</i> (Keterampilan)	Kemampuan dalam peningkatan Produktivitas Perikanan, Pertanian dan Perkebunan yang belum optimal
	<i>Staff</i> (Karyawan)	SDM bidang Perikanan, Pertanian dan Perkebunan belum memadai
	Style (Gaya Kepemimpinan)	1. Partisipatif 2. Komunikasi sangat jelas, demokratis dan terbuka terutama dalam mendengar berbagai saran dan ide dari bawahan 3. Mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan serta meningkatkan kinerja
	<i>Shared Values</i> (Nilai-nilai)	Berpikir, berperilaku, bertindak dengan amanah, transparan, penuh integritas, memegang teguh kode etik, dan loyal kepada bangsa dan negara
Nilai Transaksi Kerjasama antar Daerah	Strategy (Internal dan Eksternal)	Masih panjangnya rantai distribusi dan Masih minimnya Kerjasama Antar Daerah (KAD)
	<i>Structure</i> (Struktur)	Struktur Penataan Kerjasama antar daerah belum optimal
	<i>Systems</i> (Sistem)	Jalinan kerjasama antar daerah yang masih belum maksimal
	<i>Skills</i> (Keterampilan)	Kemampuan dalam peningkatan Nilai Transaksi Kerjasama antar Daerah belum maksimal
	<i>Staff</i> (Karyawan)	SDM yang mampu mengembangkan kerjasama antar daerah yang belum memadai

ELEMEN UTAMA (TEMA/INDIKATOR)	ELEMEN TURUNAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN (<i>BOTTLENECK</i>)
[1]	[2]	[3]
Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Award	Style (Gaya Kepemimpinan)	1. Partisipatif 2. Komunikasi sangat jelas, demokratis dan terbuka terutama dalam mendengar berbagai saran dan ide dari bawahan 3. Mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan serta meningkatkan kinerja
	<i>Shared Values</i> (Nilai-nilai)	Berpikir, berperilaku, bertindak dengan amanah, transparan, penuh integritas, memegang teguh kode etik, dan loyal kepada bangsa dan negara
	Strategy (Internal dan Eksternal)	Belum optimalnya peran TPID dalam melakukan pemantauan
	Structure (Struktur)	Struktur Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Award yang masih belum maksimal
	Systems (Sistem)	TPID yang belum maksimal
	Skills (Keterampilan)	Kemampuan TPID yang masih belum maksimal
	Staff (Karyawan)	SDM TPID yang masih belum optimal
	Style (Gaya Kepemimpinan)	1. Partisipatif 2. Komunikasi sangat jelas, demokratis dan terbuka terutama dalam mendengar berbagai saran dan ide dari bawahan 3. Mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan serta meningkatkan kinerja
	<i>Shared Values</i> (Nilai-nilai)	Berpikir, berperilaku, bertindak dengan amanah, transparan, penuh integritas, memegang teguh kode etik, dan loyal kepada bangsa dan negara

3.5. PENETAPAN KINERJA (*LOG FRAME*) REFORMASI BIROKRASI TEMATIK

Langkah selanjutnya dalam kerangka perencanaan reformasi birokrasi tematik, Pemerintah Kabupaten Nias perlu menyusun kerangka logis berdasarkan fokus intervensi yang telah ditetapkan. Berikut kerangka logis dalam Penetapan Kinerja Reformasi Birokrasi :



Pada fase ini dilakukan identifikasi secara holistik terhadap kinerja yang diinginkan akan diwujudkan pada setiap jenjang tingkatan dari Reformasi Birokrasi Tematik. Langkah identifikasi dimulai dengan menyusun kerangka logis kinerja atas program Tematik secara lengkap, dari tingkat final *outcome* sampai pada input atau sumberdaya yang akan digunakan. Pelaksanaan identifikasi dilakukan oleh koordinator program tematik berkolaborasi dengan instansi terkait. Dalam penyusunan kerangka logis kinerja Reformasi Birokrasi Tematik, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan *Final Outcome* dengan dilengkapi indikator kinerja dan penetapan besarnya target yang akan dicapai dari indikator kinerja tersebut.
2. *Final outcome* yang telah ditetapkan, dijabarkan ke dalam *intermediate outcome* dengan dilengkapi indikator kinerja dan penetapan besarnya target yang akan dicapai. Dalam penjabaran kinerja harus mempertimbangkan hubungan kausalitas dan keselarasan sinergitas antar jenjang kinerja.
3. Masing-masing *intermediate outcome* dijabarkan ke dalam *immediate outcome* sampai pada tingkat input sumberdaya yang diperlukan.
4. Dengan disusunnya kerangka logis kinerja, maka akan terlihat adanya hubungan sebab akibat (*causality*) dan keselarasan (*alignment*) yang jelas antara setiap jenjang kinerja yang akan dicapai. Penyusunan kerangka logis dapat digunakan untuk mencegah ketidakselarasan antar kegiatan yang dilaksanakan dengan *outcomes* yang akan dicapai, serta memudahkan dalam melakukan analisis keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan.

**Penetapan Kinerja Reformasi Birokrasi General
Pemerintah Kabupaten Nias Tahun 2023-2024**

SASARAN REFORMASI BIROKRASI	HAL-HAL YANG SUDAH DICAPAI/BAIK	IDENTIFIKASI MASALAH (<i>BOTTLENECK</i>) YANG PERLU DIPERBAIKI (MASALAH)	PENETAPAN KINERJA
[1]	[2]	[3]	[4]
Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel	1. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) telah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP); 2. Seluruh Pejabat telah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) tiap tahunnya; 3. Pemerintah Kabupaten Nias sudah memperoleh Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Level II; 4. Nilai Indeks Internal Audit Capability Model (Kapasitas APIP) Level II; 5. Nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Nias Predikt B (60,24).	1. Mempertahankan Nilai Opini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP); 2. Pejabat tetap menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) tiap tahunnya tepat waktu; 3. Peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); 4. Peningkatan Indeks <i>Internal Audit Capability Model</i>; 5. Peningkatan Nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Nias	1. Meningkatnya kepatuhan dan efektivitas terhadap pengelolaan keuangan daerah, sehingga dapat mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK; 2. Integritas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN); 3. Pelaksanaan penanganan gratifikasi secara optimal; 4. Pelaksanaan APBD sesuai dengan perencanaan dan penganggaran. 5. Nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Nias terus meningkat
Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional	1. Indeks Sistem Merit memperoleh Nilai 259,5 2. Profesionalitas ASN memperoleh Nilai 42,81 3. Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik dari Ombudsman RI dengan Nilai 85,05 4. Kualitas Pelayanan Publik oleh Kemenpan & RB RI dengan Nilai 3,46	1. Peningkatan Nilai Sistem Merit 2. Peningkatan Profesionalitas ASN yang merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya 3. Kurangnya pemahaman mengenai Undang-Undang	1. Kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi. 2. Profesionalisme dan produktivitas ASN yang mampu mengembangkan dan meningkatkan

SASARAN REFORMASI BIROKRASI	HAL-HAL YANG SUDAH DICAPAI/BAIK	IDENTIFIKASI MASALAH (<i>BOTTLENECK</i>) YANG PERLU DIPERBAIKI (MASALAH)	PENETAPAN KINERJA
[1]	[2]	[3]	[4]
		Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Permenpan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan standar Pelayanan, Komitmen pimpinan, Standar Pelayanan Publik belum ada, Sumber daya Manusia, Kemauan dan itikad pelaksana.	kompetensinya, baik peningkatan pengetahuan (<i>knowledge</i>), keterampilan (<i>skill</i>) dan sikap (<i>attitude</i>) dalam aktivitas kegiatan dan pekerjaannya, menjadi salah satu wujud solusi yang jelas dan nyata. 3. Peningkatan kualitas pelayanan publik, melalui : 1) Revitalisasi, restrukturisasi, dan deregulasi di bidang pelayanan publik; 2) Peningkatan profesionalisme pejabat pelayan publik; 3) Korporatisasi unit pelayanan publik; 4) Pengembangan dan pemanfaatan Electronic-Government (<i>EGovernment</i>) bagi instansi pelayanan publik; 5) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik; 6) Pemberian penghargaan dan sanksi kepada unit pelayanan masyarakat.

Kenyataan yang terjadi hanya merupakan pemahaman semata yang terbatas pada organisasi namun tidak ke tataran sistem dan kinerja individu aparatur sebagai ujung terdepan pelayanan negara terhadap masyarakat/publik. Masyarakat/publik memberi amanah pengelolaan negara kepada organisasi besar bernama “pemerintah”, maka publik pasti berharap yang terbaik diberikan pemerintah untuk masyarakat. Inilah negara demokrasi, dari, oleh dan untuk rakyat. Reformasi Birokrasi adalah kunci dan strategi terbaik dalam menjawab ketidakpuasan publik maupun ketidakpercayaan masyarakat. Reformasi Birokrasi pada dasarnya adalah upaya untuk melakukan perbaikan kinerja birokrasi dalam hal meningkatkan kualitas regulasi, meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui kreativitas dan inovasi.

Perubahan tidak hanya sekedar perubahan terhadap struktur organisasi, tetapi juga menyangkut berbagai proses penyelenggaraan pemerintahan, harmonisasi dan pelurusan (*streamlining*) berbagai regulasi, perubahan mendorong pada sistem Sumber Daya Manusia yang mampu mendorong kinerja organisasi dan perubahan pada sistem pengawasan dan akuntabilitas yang mampu mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Langkah-langkah perubahan tersebut diharapkan dapat membawa dampak positif terhadap upaya peningkatan kualitas pelayanan serta perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur. Dalam rangka mewujudkan terlaksananya reformasi birokrasi maka Pemerintah Kabupaten Nias menyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi yang diharapkan dapat mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Nias dengan profesionalitas, karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih dari KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai serta kode etik aparatur negara.

Kondisi saat ini Pemerintah Kabupaten Nias masih menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan, sebagaimana pada tabel berikut ini:

**Penetapan Kinerja Reformasi Birokrasi Tematik
Pemerintah Kabupaten Nias Tahun 2023-2024**

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	IDENTIFIKASI MASALAH (<i>BOTTLENECK</i>) YANG DIHADAPI	SASARAN PERUBAHAN	PENETAPAN KINERJA
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
PENANGGULANGAN KEMISKINAN				
1.	Database Terpusat (by name, by adreas, by NIK)	Rendahnya Kualitas dan Keterpaduan Database Kemiskinan	Tersedianya Database Pengentasan Kemiskinan yang Terpadu	Peningkatan Kualitas dan Keterpaduan Database Kemiskinan
2.	Keselasaran perencanaan penganggaran	Perencanaan dan penganggaran pengetasan kemiskinan masih belum terpadu listas sector dan instansi	Tersusunnya perencanaan dan penganggaran pengentasan kemiskinan yang efektif dan efisien	Terwujudnya Perencanaan dan penganggaran pengetasan kemiskinan listas sector dan instansi
3.	Tersedianya probis terpadu		Terwujudnya peta proses bisnis yang terpadu	
4.	Indeks Profesionalitas		Terwujudnya profesionalitas SDM Apatur	
5.	Kepuasan masyarakat	Pelaksanaan program dan kegiatan masih banyak dikeluhkan masyarakat	Terlaksananya pengentasan kemiskinan yang sesuai dengan kebutuhan	Peningkatan Pelaksanaan program dan kegiatan yang tepat sasaran
6.	Nilai Tukar Petani (NTP)	Peningkatan Perekonomian Masyarakat belum optimal	Peningkatan Penerimaan Petani dari hasil usahatani dan pengeluaran pangan serta pengeluaran non pangan	Peningkatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
7.	Pengeluaran Per-Kapita	Meningkatnya Perekonomian Masyarakat	Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Produksi Masyarakat	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
8.	Tingkat	Terbatasnya Lapangan	Pelatihan dan	Pelaksanaan Pendidikan

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	IDENTIFIKASI MASALAH (BOTTLENECK) YANG DIHADAPI	SASARAN PERUBAHAN	PENETAPAN KINERJA
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
	Pengangguran Terbuka	Pekerjaan	Penempatan Kerja	dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
9.	Indeks Pendidikan	Rendahnya Tingkat Pendidikan dan Derajat Kesehatan Masyarakat	Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat	Pengembangan program pendidikan kesetaraan di setiap kecamatan wilayah Kabupaten Nias
				Pengembangan minat belajar untuk anak usia sekolah
				Pengembangan/ pembenahan sarana gedung sekolah termasuk aksesibilitas infrastruktur antara lain jalan, jembatan, dan sarana lainnya
10.	Indeks Kesehatan		Peningkatan Kualitas Dan Derajat Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
11.	Persentase Wilayah Terisolir yang Terentaskan	Konektivitas Wilayah antar Daerah dan Penataan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup yang berkualitas	Perentasan Wilayah Terisolir	Peningkatan Pembangunan Jalan Wilayah Terisolir Kabupaten
12.	Persentase Infrastruktur Jalan Kabupaten Status Mantap		Peningkatan Infrastruktur Jalan Kabupaten Status Mantap	Peningkatan Rekonstruksi Jalan, Rehabilitasi Jalan, pemeliharaan Rutin Jembatan, pemeliharaan Rutin Jalan, Penggantian Jembatan
13.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup meningkat	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
14.	Indeks Risiko Bencana	Penyediaan Sarana Sanitasi Perumahan	Meningkatnya keberadaan ruang kota dan lingkungan hidup kota yang nyaman dan berkualitas	Peningkatan Sarana Sanitasi Perumahan dalam menangani Risiko Bencana
15.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Penguatan Strategi pengarusutamaan gender di sektor utama pelayanan	Meningkatnya Strategi pengarusutamaan gender di sektor utama pelayanan	Peningkatan Strategi pengarusutamaan gender di sektor utama pelayanan
DIGITALISASI PEMERINTAHAN				
1.	Persentase SDM Pengelola data yang memiliki pemahaman kategori baik	Rendahnya kualitas database	Tersedianya SDM pengelola data yang berkualitas	Peningkatan SDM Pengelola data yang memiliki pemahaman kategori baik
2.	Jumlah jenis Media informasi yang digunakan	Rendahnya kualitas infrastruktur Sistem informasi stunting	Tersedianya media informasi terkait penggunaan system informasi	Peningkatan media informasi terkait penggunaan system informasi
3.	Persentase	Rendahnya kualitas infrastruktur Sistem	Tersedianya perangkat pendukung system	Meningkatkan perangkat pendukung system

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	IDENTIFIKASI MASALAH (BOTTLENECK) YANG DIHADAPI	SASARAN PERUBAHAN	PENETAPAN KINERJA
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
	perangkat pendukung system informasi yang sesuai	informasi stunting	informasi yang berkualitas	informasi yang berkualitas
4.	Indeks SPBE	Belum optimalnya Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip <i>good governance</i>	Indeks SPBE Meningkat	Penyediaan Pusat Data Terpadu, Jaringan Intra Pemerintah, Sistem Penghubung Layanan Pemerintah, Aplikasi Layanan SPBE serta Keamanan Informasi Pemerintah.
5.	Nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Nias		Peningkatan Nilai SAKIP dan RB	Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Nias
				Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Nias
				Penyusunan Pohon Kinerja Pemerintah Kabupaten Nias
				Penyusunan <i>Cascading</i> Pemerintah Kabupaten Nias
				Penyusunan Rencana Aksi Pemerintah Kabupaten Nias
				Penyusunan <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi
6.	Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara <i>Online</i> dan Terintegrasi		Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara <i>Online</i> dan Terintegrasi	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah
7.	Opini BPK Terhadap Hasil Laporan Keuangan Daerah		Opini BPK WTP	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
				Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggung-jawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
				Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
8.	Indeks Kepuasan		Indeks Kepuasan	Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	IDENTIFIKASI MASALAH (BOTTLENECK) YANG DIHADAPI	SASARAN PERUBAHAN	PENETAPAN KINERJA
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
	Masyarakat		Masyarakat Meningkatkan	terhadap penyelenggaraan Pelayanan Publik dapat dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengolahan dan penyajian hasil survei
PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI (PDN)				
1.	Fasilitasi Pelaksanaan Sertifikasi dan Pengawasan serta Penerapan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)	Kualitas produk Lokal yang kalah bersaing, kurangnya kesadaran dari masyarakat sendiri, serta faktor promosi dan pemasaran yang kurang	Meningkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN)	Sertifikasi dan Pengawasan serta Pengendalian Penerapan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)
2.	Jumlah SDM Pengelola PBJ yang Tersertifikasi	SDM Tata Kelola yang Belum Kompeten	Meningkatnya Pengelola PBJ yang Kompeten	Peningkatan SDM Pengelola PBJ yang Tersertifikasi
3.	Tingkat Kematangan UKPBJ	Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) yang Belum Matang	Meningkatnya Kematangan UKPBJ	
4.	Tingkat Kepatuhan Pelaporan Melalui Sistem	Sistem Teknologi yang Belum Optimal dalam Menunjang Pengadaan Barang dan Jasa	Meningkatnya Optimalisasi Penggunaan Sistem Teknologi Informasi dalam Menunjang Proses Pengadaan Barang dan Jasa	Peningkatan Kematangan UKPBJ
5.	Jumlah pelaku usaha dan UMKM yang paham dengan proses e-tendering, P3DN dst	Pelaku Usaha yang Belum Memahami terkait e-tendering, e-purchasing, dll	Meningkatnya pemahaman pelaku usaha terkait e-tendering, e-purchasing, dll	Peningkatan pelaku usaha dan UMKM yang paham dengan proses e-tendering, P3DN dst
6.	Persentase barang/jasa PDN pada RUP terpenuhi	Jumlah barang/jasa yang dibutuhkan tidak dapat dipenuhi oleh penyedia	Tersedianya produk/ barang PDN yang sesuai kebutuhan	Pemenuhan barang/jasa PDN pada RUP
PENINGKATAN INVESTASI				
1.	Realisasi Investasi PMDN/PMA	Belum optimalnya Pengembangan Investasi yang ada di Kabupaten Nias	Peningkatan Nilai Investasi PMDN/PMA	Peningkatan Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kab/Kota
2.	Persentase Kegiatan Promosi Penanaman Modal		Adanya Pihak yang menanamkan Modal di Kabupaten Nias	Penyusunan Dokumen Potensi dan Peluang Investasi Daerah
3.	Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal		Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal	Peningkatan Sistem Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal
4.	Hasil Penilaian Mandiri Kinerja PTSP	Rendahnya kualitas penyelenggaraan pelayanan perizinan	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
5.	Iklim Usaha Industri*	Iklim investasi yang tidak kondusif untuk meningkatkan realisasi investasi	Terciptanya Iklim Investasi yang kondusif untuk meningkatkan realisasi investasi	Peningkatan Iklim investasi yang tidak kondusif untuk meningkatkan realisasi investasi

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	IDENTIFIKASI MASALAH (BOTTLENECK) YANG DIHADAPI	SASARAN PERUBAHAN	PENETAPAN KINERJA
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
6.	Persentase Peningkatan Kepatuhan Pelaporan LKPM	Rendahnya Kepatuhan Pelaporan LKPM	Meningkatnya Kepatuhan Pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal	Peningkatan Kepatuhan Pelaporan LKPM
PENGENDALAIAN INFLASI				
1.	Indeks Harga Konsumen (IHK)	Rendahnya konektivitas jaringan distribusi pangan, kesenjangan informasi dan distorsi struktur pasar dan produktivitas pangan	Meningkatnya Indeks Harga Konsumen (IHK)	Peningkatan Indeks Harga Konsumen (IHK)
2.	Tingkat Produktivitas Perikanan, Pertanian dan Perkebunan	Belum optimalnya peran SDM penyuluh petani, perkebunan dan perikanan yang berkualitas	Meningkatnya produksi Perikanan, Pertanian dan Perkebunan Rendahnya jumlah petani yang bergabung didalam kelompok formal sehingga menyulitkan untuk pemberian bantuan pemerintah/ pembiayaan	Peningkatan Produktivitas Perikanan, Pertanian dan Perkebunan
3.	Nilai Transaksi Kerjasama antar Daerah	Masih panjangnya rantai distribusi dan Masih minimnya Kerjasama Antar Daerah (KAD)	Meningkatnya Kerjasama Antar Daerah	Peningkatan Nilai Transaksi Kerjasama antar Daerah
4.	TPID Award	Belum optimalnya peran TPID dalam melakukan pemantauan	Meningkatnya Peran TPID	Peningkatan Peran TPID

BAB IV

MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PEERINTAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2023-2024

4.1. PENETAPAN PERIORITAS KEGIATAN UTAMA

Dalam hal Pemerintah Kabupaten Nias memiliki keterbatasan sumber daya, maka perlu melakukan tahapan identifikasi tingkat prioritas seluruh Kegiatan Utama. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan identifikasi prioritas Kegiatan Utama, yaitu sebagai berikut:

1. Kegiatan Utama *mandatory* bersifat wajib seluruhnya dan lebih prioritas dibandingkan Kegiatan Utama inisiatif Pemerintah Kabupaten Nias
2. Seluruh Kegiatan Utama, baik yang *mandatory* maupun inisiatif Pemerintah Kabupaten Nias harus dilengkapi dengan indikator yang terukur
3. Identifikasi prioritas Kegiatan Utama didasarkan pada empat factor sesuai contoh atau lebih jika ada faktor lain yang dirasa perlu oleh Pemerintah Kabupaten Nias
4. Skor masing-masing faktor dalam skala 1-10 (atau skala lainnya), kemudian diakumulasi
5. Dapat memodifikasi *tools* yang ada atau menggunakan *tools* lainnya.
6. Hasil identifikasi ini kemudian menjadi pertimbangan dalam menetapkan target tahunan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Nias.

4.2 PENETAPAN TARGET KEGIATAN UTAMA

Target Kegiatan Utama digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah kabupaten Nias. Penetapan Target ini perlu memperhatikan target minimal *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional. Hal-hal minimal yang perlu ada adalah:

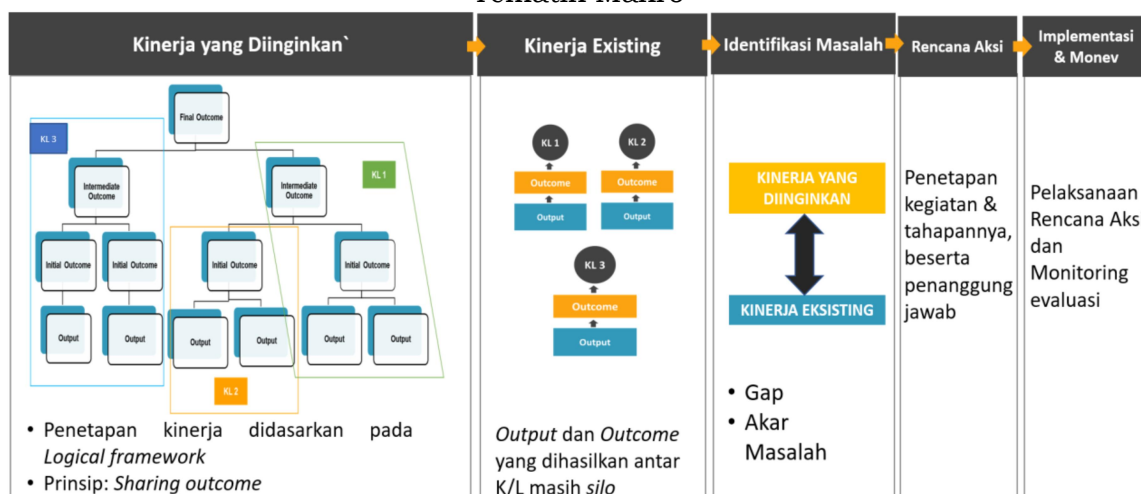
1. Kegiatan Utama diambil berdasarkan hasil identifikasi Prioritas Kegiatan Utama
2. Terdapat indikator Kegiatan Utama yang terukur dan relevan
3. Terdapat target tahunan yang terukur dan optimis
4. Koordinator adalah unit/satuan kerja yang memiliki fungsi untuk mengawal dan mengkoordinir Kegiatan Utama
5. Pelaksana adalah unit/satuan kerja yang perlu melaksanakan Kegiatan Utama
6. Kegiatan Utama Inisiatif adalah yang berorientasi hasil (*bukan output*) dan memiliki *leverage* (percepatan) terhadap pencapaian Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi

4.3 PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Reformasi Birokrasi Tematik dirumuskan untuk menjawab tuntutan percepatan dampak konkrit Reformasi Birokrasi terhadap isu yang ada di hilir, yaitu capaian Pembangunan Nasional. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik tersebut tidak akan terwujud jika tidak diikuti dengan strategi dan pengelolaan yang tepat. Melalui Reformasi Birokrasi Tematik, Pemerintah Kabupaten Nias dapat lebih fokus dalam mempercepat terwujudnya kinerja yang telah ditentukan dengan menetapkan tema dalam Reformasi Birokrasi tematik.

Konsep Reformasi Birokrasi Tematik Pemerintah Kabupaten Nias juga merupakan upaya dan sarana untuk mengurai dan menjawab atau mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintahan (*debottlenecking*) yang memang dirasakan secara langsung oleh masyarakat dan menjadi penyebab tidak tercapainya tujuan dan sasaran dari Reformasi Birokrasi Tematik yang telah ditetapkan. Dengan teratasinya akar masalah dalam tata kelola tersebut maka diharapkan dapat mempercepat tercapainya tujuan dan sasaran kebijakan pembangunan serta terwujudnya kondisi yang diharapkan masyarakat. Berikut kerangka logis Reformasi Birokrasi Tematik Pemerintah Kabupaten Nias dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Kerangka Logis Reformasi Birokrasi
Tematik Makro



Sumber: Kementerian PAN & Reformasi Birokrasi RI

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Nias dapat dilakukan melalui rencana aksi General dan Tematik yang ditetapkan. Menyusun rencana aksi adalah tahapan untuk mengoperasionalkan strategi dan program yang telah ditetapkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Nias. Rencana aksi secara umum terdapat dua tipe yaitu mandat instansi yang dirumuskan sesuai tupoksi instansi, dan inisiatif instansi yang merupakan inovasi dari instansi terkait.

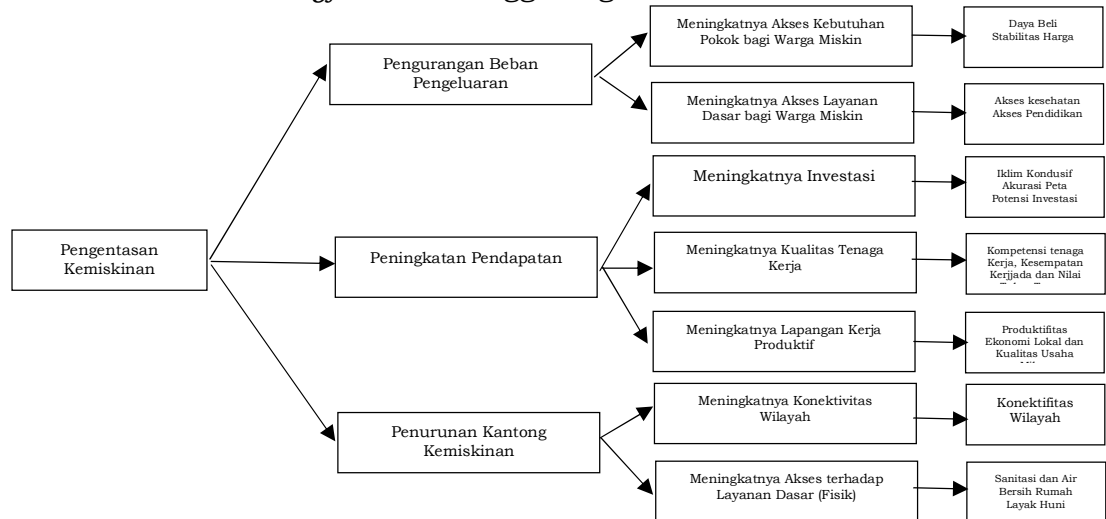
4.2 KERANGKA LOGIS PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Kerangka logis dapat digunakan untuk mencegah ketidak selarasan antar kegiatan yang dilaksanakan dengan *outcome* yang akan dicapai. Kerangka logis berdasarkan fokus intervensi, maka Pemerintah daerah perlu menyusun kerangka logis berdasarkan fokus intervensi yang telah ditetapkan untuk memahami permasalahan tematik yang dihadapi. Hubungan sebab-akibat dan keselarasan melalui kerangka logis diperlukan untuk melihat adanya hubungan sebab-akibat dan keselarasan yang jelas antara setiap jenjang kinerja yang ingin dicapai. Secara umum, penyusunan kerangka logis dapat mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah.

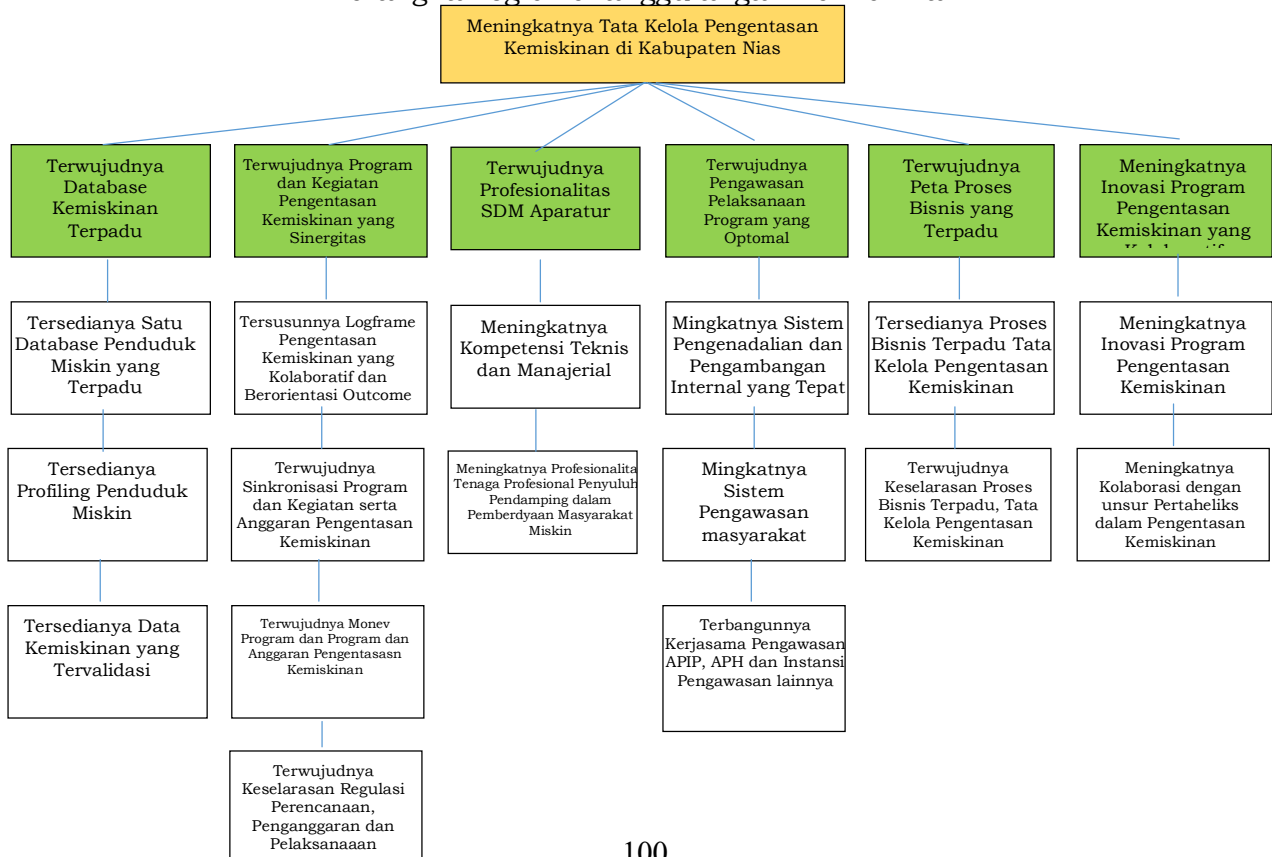
A. KERANGKA LOGIS PENANGGULANGAN KEMISKINAN

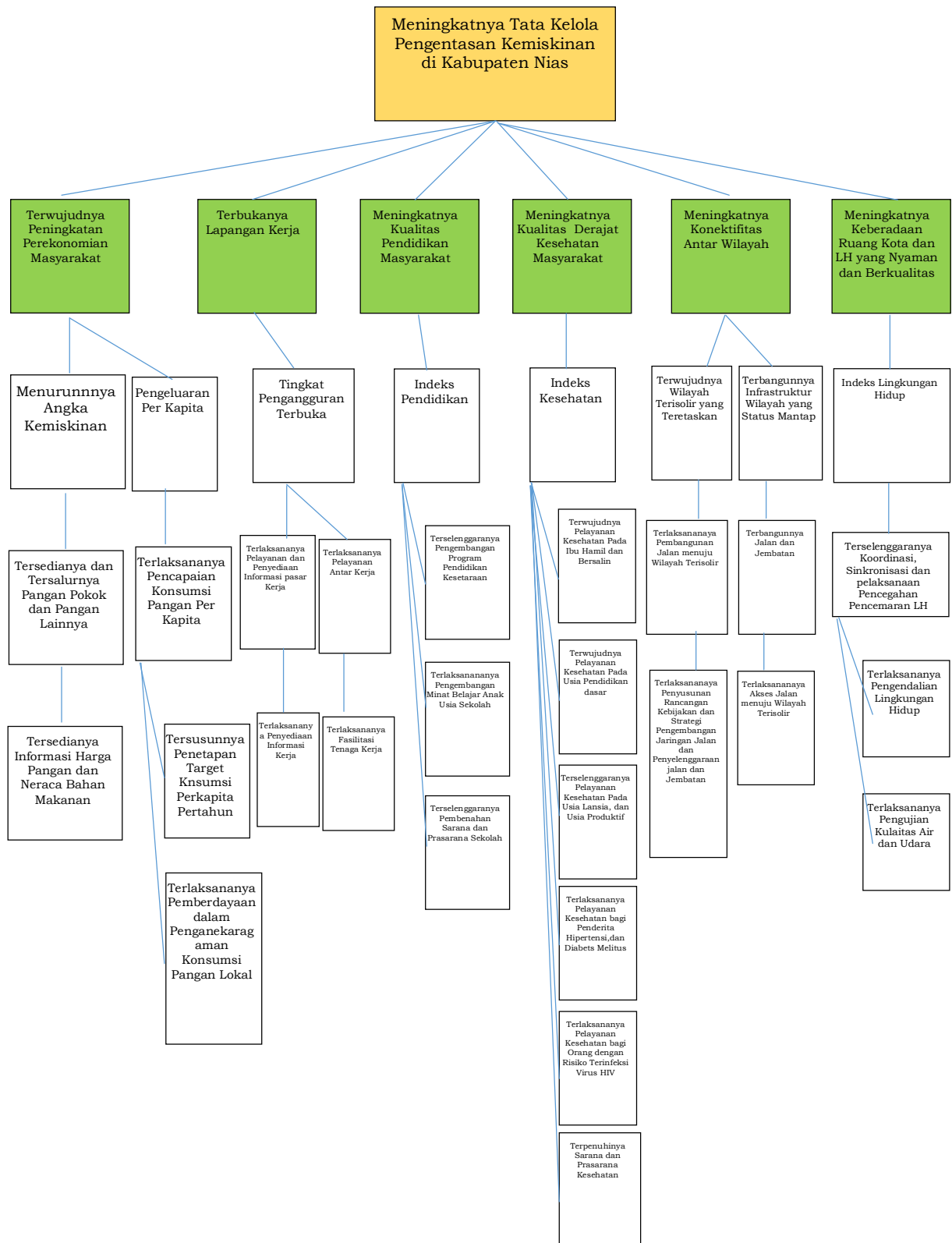
Logical framework (logframe) ini dikembangkan dari tiga (3) strategi pengentasan kemiskinan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022, yaitu pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan penurunan kantong-kantong kemiskinan. Pemerintah Kabupaten Nias dapat menggunakan *logframe* untuk mengembangkan konsep yang sudah ada dan disesuaikan dengan kebutuhan, potensi, karakteristik, hingga kondisi permasalahan pengentasan kemiskinan.

Logframe Penanggulangan Kemiskinan



Kerangka Logis Penanggulangan Kemiskinan

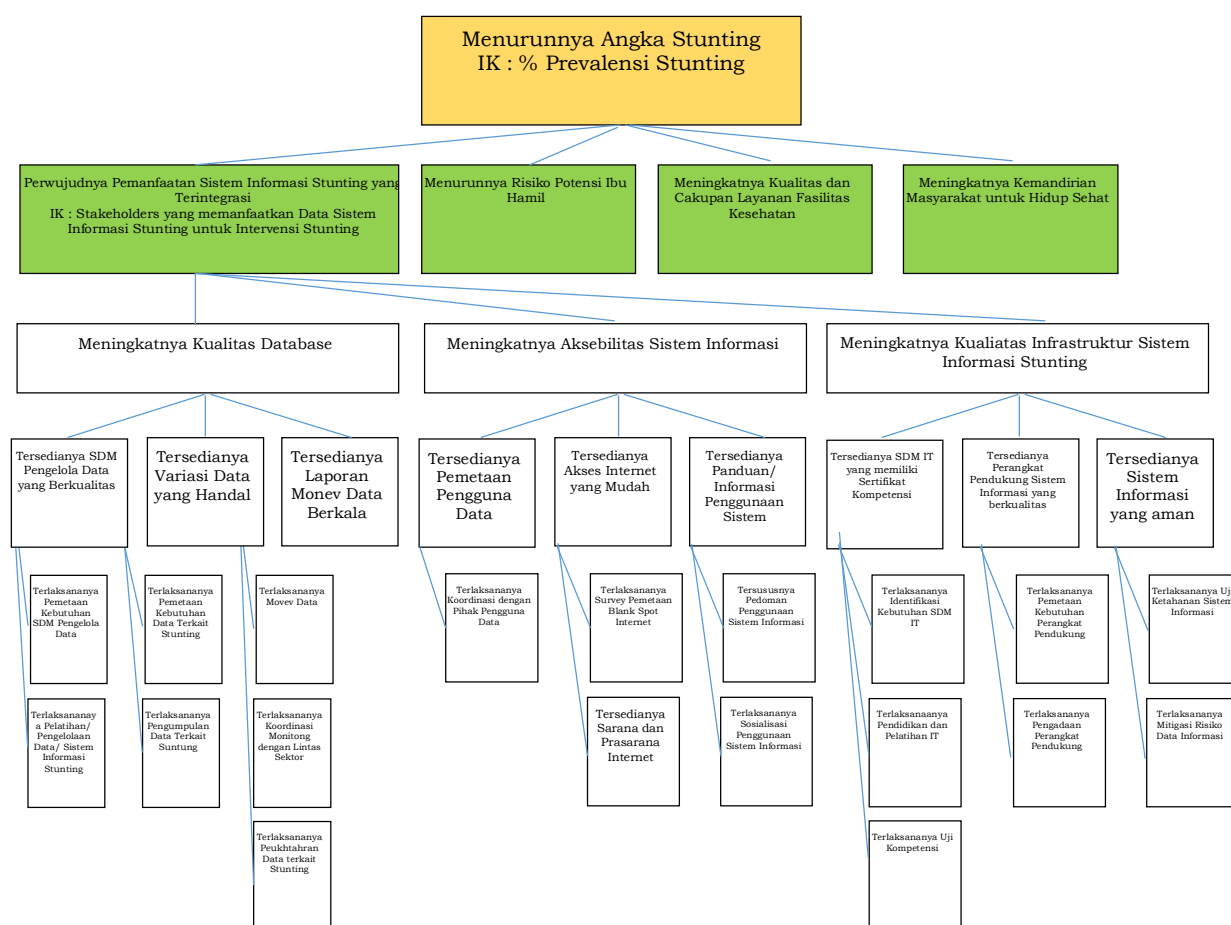


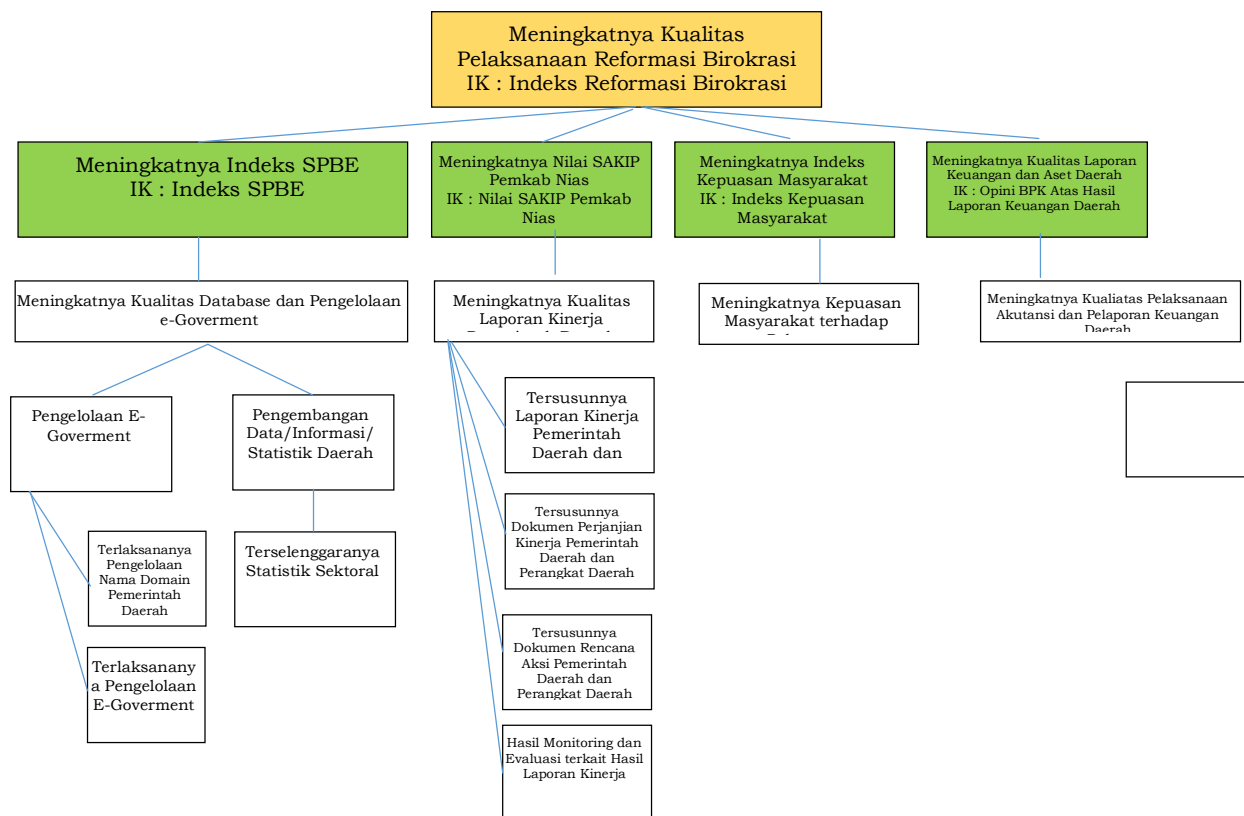


B. KERANGKA LOGIS DIGITALISASI PEMERINTAHAN

Dalam menyelesaikan permasalahan stunting di Indonesia ditemukan sejumlah kondisi yang masih menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya angka stunting, yaitu buruknya kesehatan ibu dan anak, rendahnya mutu fasilitas kesehatan, pola hidup bersih sehat masyarakat yang masih rendah dan belum terintegrasinya sistem informasi penanganan stunting. Sebagai salah satu faktor strategis, pengintegrasian sistem informasi penanganan stunting dipandang perlu untuk segera diwujudkan. Data stunting yang akurat sebagai produk dari sistem informasi yang baik menjadi dasar pengambilan keputusan oleh *stakeholder*.

Kerangka Logis Digitalisasi Pemerintahan



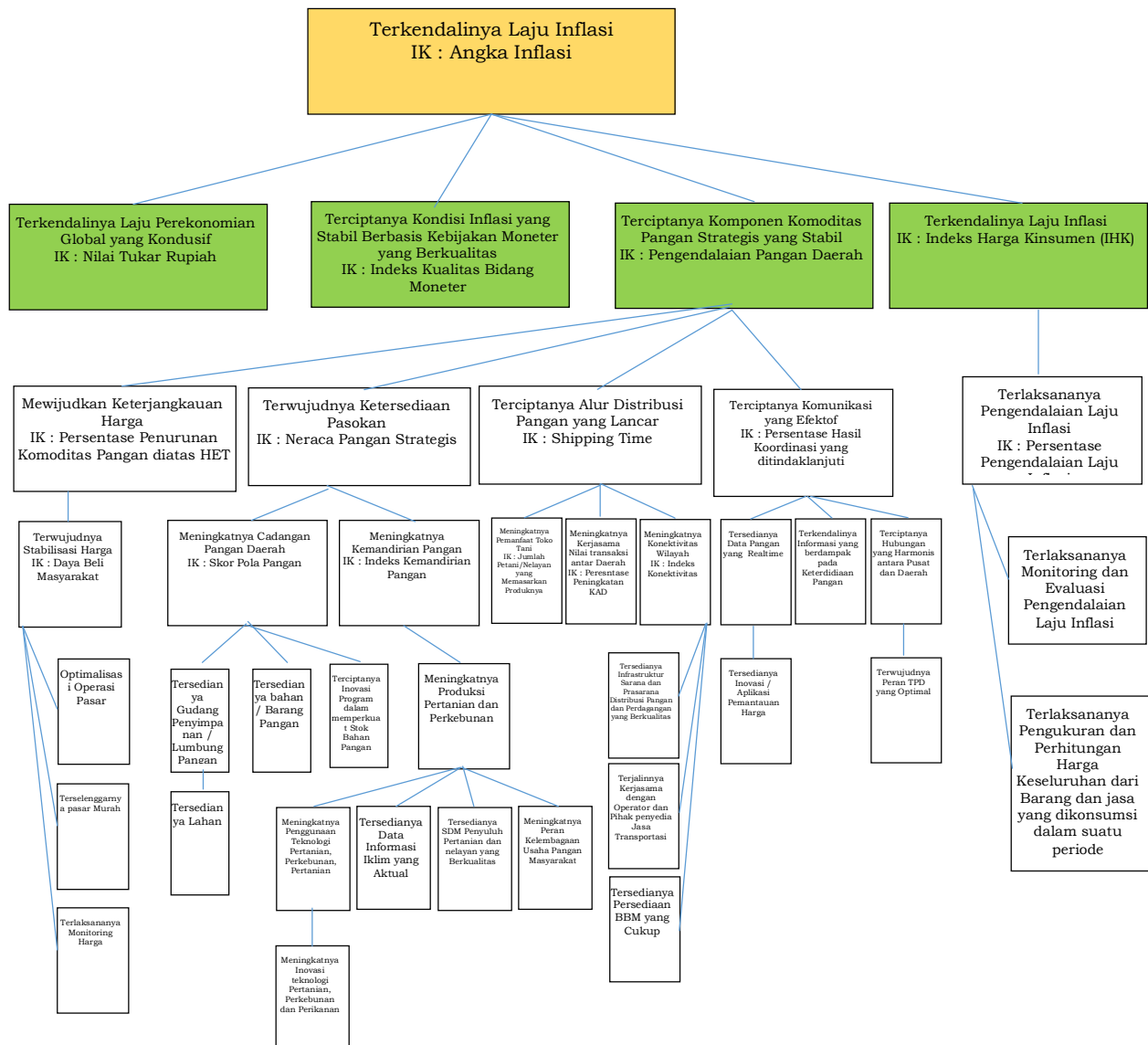


C. KERANGKA LOGIS PENGENDALAIAN INFLASI

Dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi nasional pasca pandemi, maka perlu upaya lebih dengan mewujudkan birokrasi yang secara adaptif menjawab tantangan tersebut melalui perbaikan reformasi birokrasi tematik pengendalian inflasi yang mendukung optimalisasi kebijakan 4K pengendalian inflasi. Keberhasilan terhadap RB tematik pengendalian inflasi akan dilihat melalui bagaimana upaya Pemerintah Daerah dalam mengendalikan inflasi pangan daerah melalui Indeks Perkembangan Harga (IPH) dan Indeks Harga Konsumen (IHK). Strategi 4K adalah sebagai berikut :

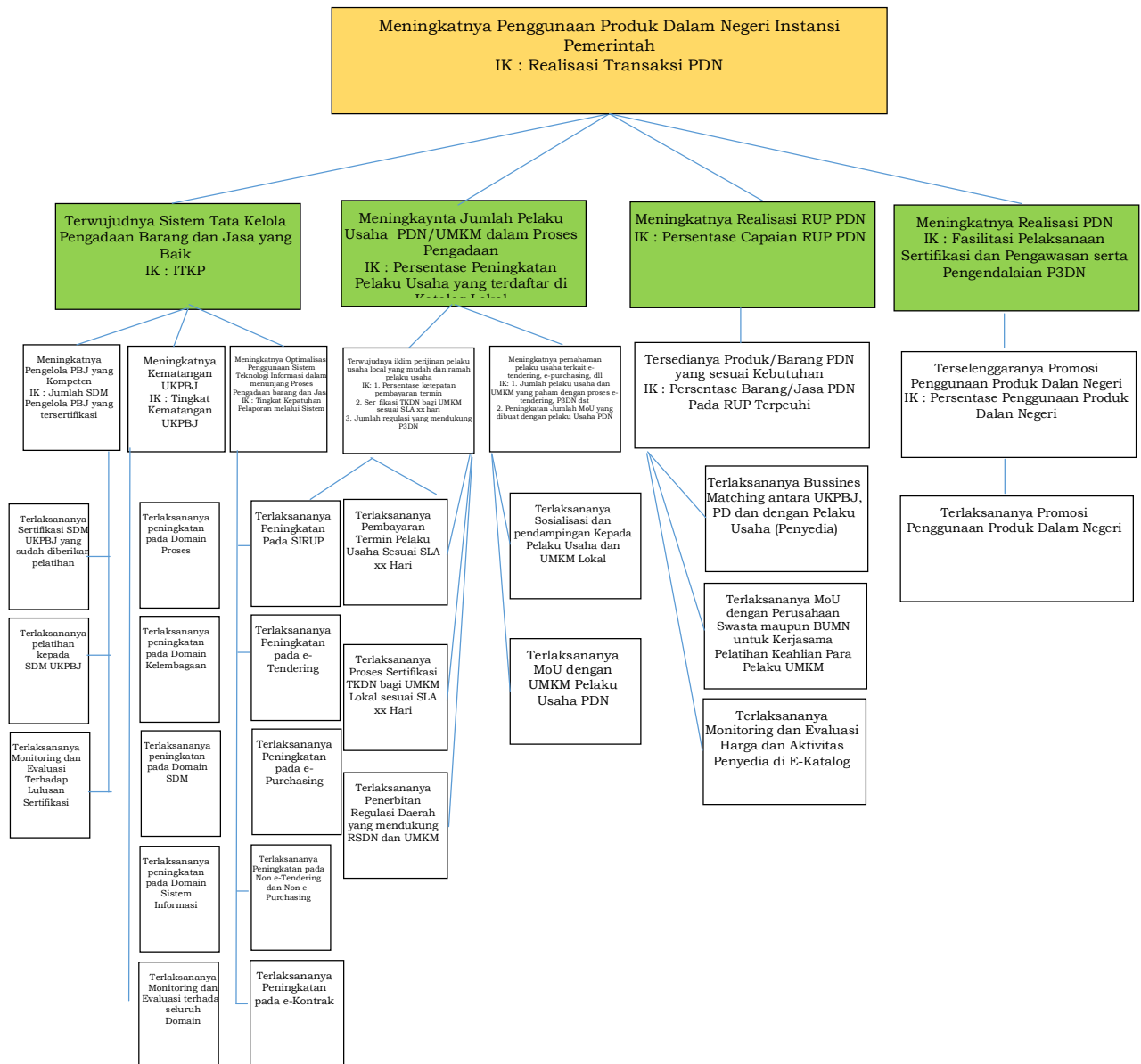


Kerangka Logis Pengendalian Inflasi



D. KERANGKA LOGIS PENINGKATAN PRODUK DALAM NEGERI (PDN)

Kerangka Logis Peningkatan Produk Dalam Negeri

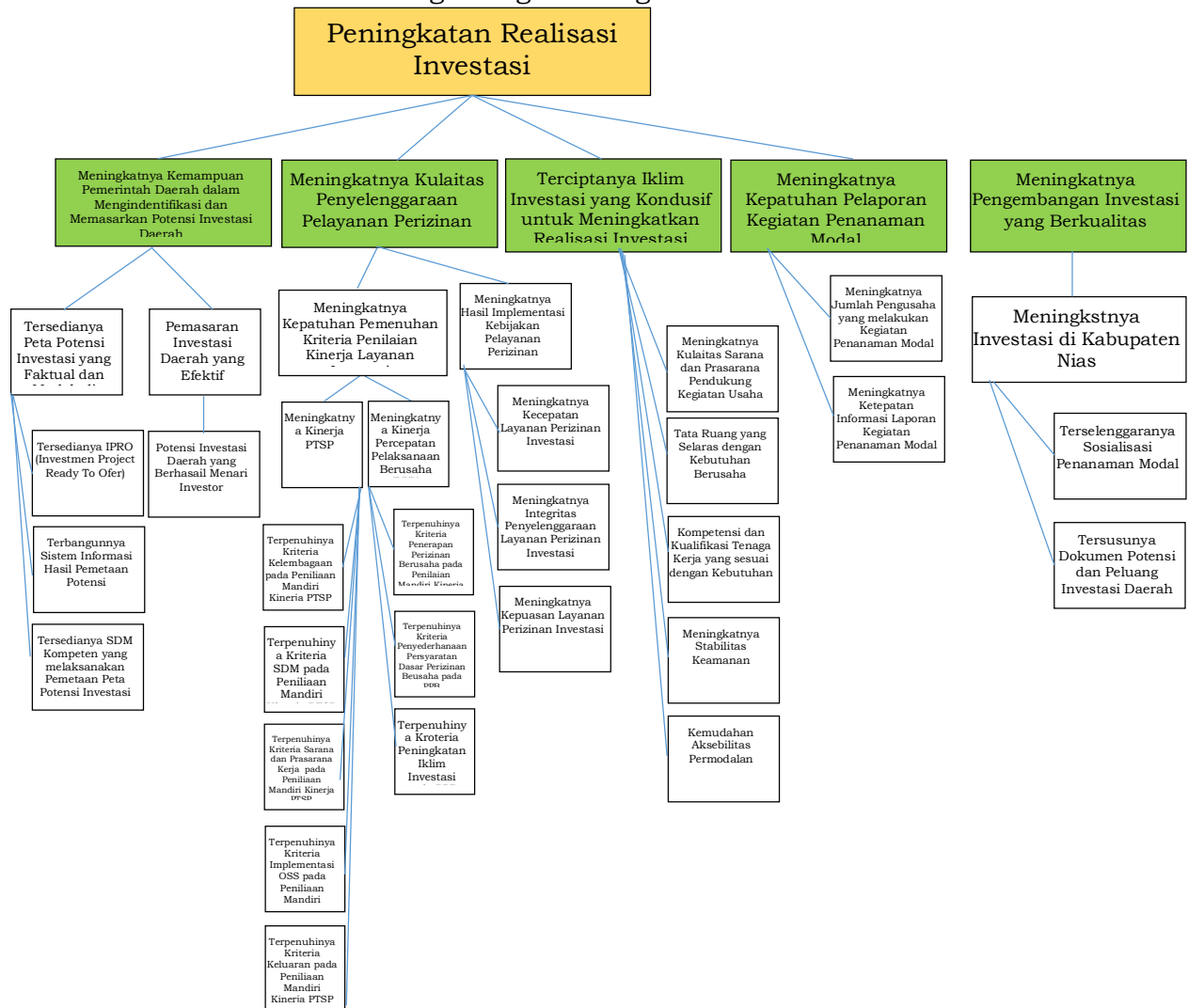


E. KERANGKA LOGIS PENINGKATAN INVESTASI

Investasi menjadi katalisator pada Pembangunan Nasional serta mendukung pencapaian nilai positif dalam Produk Domestik Bruto (PDB). Seiring dengan kenaikan investasi, maka PDB pun akan meningkat. Program Reformasi Birokrasi Tematik peningkatan investasi ini berperan dalam mewujudkan kondisi iklim investasi yang kondusif sehingga memiliki daya saing masuknya investasi dengan memperkuat penerapan omnibus law dan meningkatkan indeks daya saing (*competitiveness index*).

Pemerintah Kabupaten Nias dapat memilih tema peningkatan investasi dari beberapa tema Reformasi Birokrasi Tematik. Beberapa hal yang dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan pemilihan tema antara lain mandat RPJMD, arahan kepala daerah, atau kond isi urgent lain (potensi tinggi investasidaerahnamunminimrealisasi) yang menjadikan tema Peningkatan Investasi menjadi isu yang semakin penting untuk dikelola dengan baik.

Kerangka Logis Peningkatan Investasi



4.3 RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI

Rencana Aksi adalah langkah-langkah rinci yang diambil untuk mencapai tujuan jangka panjang atau jangka pendek. Penyusunan rencana aksi merupakan penetapan aktivitas yang perlu dilaksanakan untuk menyelesaikan masalah utama sebagaimana yang telah diidentifikasi dalam *logical framework*. Penyusunan rencana aksi harus mengacu pada *logical framework* yang telah dirumuskan.

Menyusun rencana aksi adalah tahapan untuk mengoperasionalkan strategi dan program yang telah ditetapkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi instansi. Rencana aksi secara umum terdapat dua tipe yaitu mandat instansi yang dirumuskan sesuai tupoksi instansi, dan inisiatif instansi yang merupakan inovasi dari instansi terkait.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General:

1. Aksi yang dimaksud harus merupakan aksi yang memiliki dampak langsung terhadap capaian Kegiatan Utama.
2. Rencana aksi harus jelas dan terukur
3. Target triwulanan berupa akumulasi dari triwulan-triwulanan sebelumnya.
4. Rencana Aksi merupakan *output* dari Tim Pengelola Reformasi Birokrasi General, jika terdapat Tim Pengelola Reformasi Birokrasi General di level unit kerja, maka Tim tersebut perlu menyusun Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Unit Kerja.
5. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Unit Kerja dapat terdiri dari penjabaran atas Rencana Aksi level pusat (level Pemerintah Kabupaten Nias) dan inisiatif unit kerja jika diperlukan.
6. Jika unit kerja memiliki Rencana Aksi di luar mandat level pusat, maka inisiatif tersebut harus melalui proses validasi level pusat terlebih dulu sebelum dimasukkan sebagai Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Unit Kerja.

Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General dan Tematik dapat beririsan, sehingga dalam proses perencanaan Reformasi Birokrasi mikro, perlu dikoordinasikan secara komprehensif oleh Sekretariat.

A. RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI GENERAL

Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General
Pemerintah Kabupaten Nias Tahun 2023-2024

PERMASALAHAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUNAN 2023-2024	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN (TRIWULAN)					JUMLAH ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH/ UNIT KERJA PELAKSANA	
					SATUAN	INDIKATOR	I	II	III	IV	TOTAL		KOORDINATOR	PELAKSANA
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]
Sasaran 1: Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel														
Belum Optimalnya Transformasi Organisasi Berbasis Kinerja dan <i>Agile</i>	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi) / Transformasi Organisasi Berbasis Kinerja dan <i>Agile</i>	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi	90	Membentuk Tim Penyusun Nomenklatur Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional Aparatur Sipil Negara di Lngkungan Pemerintah Kabupaten Nias	Kegiatan	Meningkatnya ketepatan fungsi dan ukuran perangkatdaerah	1	-	-	-	1	90.000.000	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Nias	Seluruh Perangkat Daerah/ Unit Kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias
				Mengadalan Rapat Tim Penyusun Nomenklatur Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional Aparatur Sipil Negara di Lngkungan Pemerintah Kabupaten Nias	Kegiatan	Tersusunnya Nomenklatur Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional Aparatur Sipil Negara di Lngkungan Pemerintah Kabupaten Nias (Target = 100%)	1	-	1	-	2			
				Menyusun Nomenklatur Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional Aparatur Sipil Negara di Lngkungan Pemerintah Kabupaten Nias	Dokumen		1	-	-	-	1			
				Melaksanakan Monitoring Kelembagaan	Kegiatan		-	1	-	1	2			
				Melakukan Pemetaan dan Evaluasi Kelembagaan	Kegiatan		1	-	1	-	2			
				Melakukan Penyederhanaan Birokrasi	Kegiatan		1	1	-	-	2			
				Menyusun Regulasi Penataan Kelembagaan	Kegiatan		-	1	-	-	1			
				Menyusun Regulasi Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah	Dokumen		1	-	-	-	1			
				Menyusun Nilai Jabatan, Kelas Jabatan danEvaluasi Jabatan	Dokumen		1	-	-	-	1			
				Menyusun Standar Kompetensi Jabatan	Dokumen		1	-	-	-	-			

PERMASALAHAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUNAN 2023-2024	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN (TRIWULAN)					JUMLAH ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH/ UNIT KERJA PELAKSANA	
					SATUAN	INDIKATOR	I	II	III	IV	TOTAL		KOORDINATOR	PELAKSANA
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]
				Menyusun Nomenklatur Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional Aparatur Sipil Negara	Dokumen		1	-	-	-	-	90.000.000		
				Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terkait Nomenklatur Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional Aparatur Sipil Negara di Lngkungan Pemerintah Kabupaten Nias	Kegiatan		-	1	-	1	2			
				Melaksanakaevaluasi untuk menilai ketepatan seluruh fungsi dan ukuran organisasi		Tersusunnya dokumen Evaluasi Jabatan yang tepat fungsi (Target = 100%)	-	1	-	1	2			
				Melakukan evaluasi yang mengukur seluruh jenjang organisasi			-	1	-	1	2			
				Meakukan valuasi yang menganalisis seluruh kemungkinan duplikasi fungsi			-	1	-	1	2			
				Melakukan evaluasi kesesuaian seluruh tugas dan fungsi dengan sasaran kinerja			-	1	-	1	2			
				Melakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian seluruh struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan			-	1	-	1	2			
				Melakukan evaluasi yang menganalisis kemampuan seluruh struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis			-	1	-	1	2			
Sistem Kerja Baru dengan Model Fleksibel bagi Pegawai ASN belum Maksimal	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan Model Fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat Implementasi Sistem Kerja Baru dengan Model Fleksibel bagi Pegawai	90%	Membentuk Tim Penyusun Dokumen Sistem Kerja pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias	Kegiatan	Tersusunnya Dokumen Sistem Kerja pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias (Target = 100%)	1	1	-	-	1	50.000.000	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Nias	Seluruh Perangkat Daerah/Unit Kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias
				Mengadakan Rapat Tim Penyusun Dokumen Sistem Kerja pada Perangkat Daerah di Lingkungan	Kegiatan		1	1	-	-	2			

PERMASALAHAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUNAN 2023-2024	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN (TRIWULAN)					JUMLAH ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH/ UNIT KERJA PELAKSANA	
					SATUAN	INDIKATOR	I	II	III	IV	TOTAL		KOORDINATOR	PELAKSANA
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]
				Pemerintah Kabupaten Nias Kabupaten Nias										
				Menyusun Dokumen Sistem Kerja pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias	Kegiatan		-	1	-	-	1			
Belum Optimalnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Nasional	Pelaksanaan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Nasional	Indeks SPBE	2,50	Melakukan pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Nias	Kegiatan	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah (Target = 100%)	1	1	1	1	4	116.428.829	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias	Seluruh Perangkat Daerah/ Unit Kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias
				Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah (Target = 100%)			1	1	1	1	4	231.190.532		
				Melakukan Pengembangan data/informasi /statistik daerah	Kegiatan	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah (Target = 100%)	1	1	1	1	4	369.997.450		
Belum adanya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Nias	Predikat BB	Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Nias dan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias	Kegiatan	Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Nias dan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias (Target = 100%)	1	-	-	-	1	150.000.000	Asisten Asministasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Nias	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Nias
				Mengadakan Rapat Tim Penyusun Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Nias dan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias	Kegiatan		1	-	-	-	1			Seluruh Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias
				Menyusun Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Nias dan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias	Kegiatan		1	-	-	-	1			
				Reviu Laporan Kinerja oleh Inspektirat Daerah Kabupaten Nias	Kegiatan		1	-	-	-	1			
				Menyampaikan ke Kemnterian PN & RB melalui Aplikasi esr.menpan.go.d	Kegiatan		1	-	-	-	1			

PERMASALAHAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUNAN 2023-2024	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN (TRIWULAN)					JUMLAH ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH/ UNIT KERJA PELAKSANA			
					SATUAN	INDIKATOR	I	II	III	IV	TOTAL		KOORDINATOR	PELAKSANA		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]		
				Membentuk Tim Penyusun Penjenjangan Kinerja Pemerintah Kabupaten Nias danPerangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias Kabupaten Nias	Kegiatan	Penyusunan Penjenjangan Kinerja Pemerintah Kabupaten Nias danPerangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias (Target = 100%)	1	-	-	-	1	15.000.000				
				Mengadakan Rapat Tim Penyusun Penjenjangan Kinerja Pemerintah Kabupaten Nias danPerangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias	Kegiatan		1	-	-	-	1					
				Menyusun Dokumen Penjenjangan Kinerja Pemerintah Kabupaten Nias danPerangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias	Kegiatan		1	-	-	-	1					
				Reviu Laporan Kinerja oleh Inspektirat Daerah Kabupaten Nias	Kegiatan		1	-	-	-	1					
				Menyampaikan ke Kemnterian PN & RB melalui Aplikasi esr.menpan.go.d	Kegiatan		1	-	-	-	1					
				Membentuk Tim Penyusun Rencana Aksi Pemerintah Kabupaten Nias danPerangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias	Kegiatan	Penyusunan Rencana Aksi Pemerintah Kabupaten Nias danPerangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias (Target = 100%)	1	-	-	-	1	15.000.000				
				Mengadakan Rapat Tim Penyusun Rencana Aksi Pemerintah Kabupaten Nias danPerangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias	Kegiatan		1	-	-	-	1					
				Menyusun Dokumen Rencana Aksi Pemerintah Kabupaten Nias danPerangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias	Kegiatan		1	-	-	-	1					
				Reviu Laporan Kinerja oleh Inspektirat Daerah Kabupaten Nias	Kegiatan		1	-	-	-	1					

PERMASALAHAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUNAN 2023-2024	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN (TRIWULAN)					JUMLAH ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH/ UNIT KERJA PELAKSANA	
					SATUAN	INDIKATOR	I	II	III	IV	TOTAL		KOORDINATOR	PELAKSANA
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]
				Menyampaikan ke Kemnterian PN & RB melalui Aplikasi esr.menpan.go.d	Kegiatan		1	-	-	-	1		21.000.000	
				Membentuk Tim Penyusun Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Nias danPerangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias	Kegiatan	Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Nias danPerangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias	1	-	-	1	2			
				Mengadakan Rapat Tim Penyusun Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Nias danPerangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias	Kegiatan	Kabupaten Nias (Target = 100%)	1	-	-	1	2			
				Menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Nias danPerangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias	Kegiatan		1	-	-	1	2			
				Reviu Laporan Kinerja oleh Inspektirat Daerah Kabupaten Nias	Kegiatan		1	-	-	1	2			
				Menyampaikan ke Kemnterian PN & RB melalui Aplikasi esr.menpan.go.d	Kegiatan		1	-	-	1	2			
				Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias secara berkala	Kegiatan	Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias (Target = 100%)	1	1	1	1	4	60.000.000		
				Mendorong keterlibatan pimpinan OPD/Unit Kerja dalam penyusunan rencana strategis	Kegiatan	Persentase Pimpinan OPD/Unit Kerja terlibat dalam penyusunan rencana strategis (Target 100%)	1	1	1	1	4			
				Mendorong keterlibatan pimpinan OPD/Unit dalam penyusunan penetapan kinerja	Kegiatan	Pimpinan OPD/Unit Kerja terlibat (baik langsung maupun tidak langsung) dalam penyusunan penetapan kinerja	1	1	1	1	4			

PERMASALAHAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUNAN 2023-2024	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN (TRIWULAN)					JUMLAH ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH/ UNIT KERJA PELAKSANA	
					SATUAN	INDIKATOR	I	II	III	IV	TOTAL		KOORDINATOR	PELAKSANA
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]
						(Target 100%)						170.000.000	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nias	Seluruh Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias
				Mendorong setiap pimpinan OPD/Unit melaksanakan pemantauan/ penilaian/ pengukuran atas pencapaian kinerja bawahan secara berkala	Kegiatan	Pimpinan OPD/Unit Kerja melaksanakan pemantauan/ penilaian/ pengukuran terhadap kinerja bawahan (Target 100%)	1	1	1	1	4			
				Membentuk Tim Evaluasi Keselarasan RKPD Perangkat Daerah terhadap RPJMD	Kegiatan	Tercapainya Keselarasan Dokumen RKPD Perangkat Daerah terhadap RPJMD	1	1	1	1	4			
				Mengadakan Rapat Tim Evaluasi Keselarasan RKPD Perangkat Daerah terhadap RPJMD	Kegiatan	(Target 100%)	1	1	1	1	4			
				Melakukan Pembekalan Teknis kepada Tim Evaluasi Keselarasan RKPD Perangkat Daerah terhadap RPJMD terkait aplikasi SIPD	Kegiatan		1	1	1	1	4			
				Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terhadap Penyusunan Keselarasan Dokumen RKPD Perangkat Daerah terhadap RPJMD	Kegiatan	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi terhadap Penyusunan Keselarasan Dokumen RKPD Perangkat Daerah terhadap RPJMD (Target = 100%)	1	1	1	1	4			
Pelayanan Publik Digital yang belum Memadai	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital	Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara <i>Online</i> dan Terintegrasi	15	Melakukan pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kegiatan	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	1	1	1	1	4	275.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias	Seluruh Perangkat Daerah/Unit Kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias
Belum adanya Pembangunan Zona Integritas di Unit Kerja	Pembangunan Zona Integritas di Unit Kerja	Indeks Survei Penilaian Integritas (SPI)	80	Melakukan Survei secara <i>online</i> dengan kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	%	Meningkatnya Indeks Survei Penilaian Integritas (SPI)	1	1	1	1	4	50.000.000	Inspektorat Daerah Kabupaten Nias	Seluruh Perangkat Daerah/Unit Kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias
Level Maturitas SPIP yang masih Kurang	Penguatan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP	Level III	Menetapkan kebijakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Kegiatan	Meningkatnya Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pemerintah Kabupaten Nias	1	1	1	1	4	90.000.000	Inspektorat Daerah Kabupaten Nias	Seluruh Perangkat Daerah/Unit Kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias
				Membangun lingkungan pengendalian	Kegiatan	(Target = 100%)	1	1	1	1	4			

PERMASALAHAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUNAN 2023-2024	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN (TRIWULAN)					JUMLAH ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH/ UNIT KERJA PELAKSANA	
					SATUAN	INDIKATOR	I	II	III	IV	TOTAL		KOORDINATOR	PELAKSANA
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]
				Melakukan penilaian/identifikasi resiko atas organisasi	Kegiatan		1	1	1	1	4			
				Melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi	Kegiatan		1	1	1	1	4			
				Menginformasikan dan mengkomunikasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada seluruh pihak terkait	Kegiatan		1	1	1	1	4			
				Melakukan pemantauan pengendalian intern	Kegiatan		1	1	1	1	4			
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat belum Optimal	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Persentase Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	95	Menetapkan kebijakan pengaduan masyarakat	Kegiatan	Tersusunnya Standar Operating Procedure (SOP) pengaduan masyarakat (Target = 100%)	1	-	-	-	1	300.000.000	Inspektorat Daerah Kabupaten Nias	Seluruh Perangkat Daerah/Unit Kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias
				Mengimplementasikan penanganan pengaduan masyarakat	Kegiatan		1	1	1	1	4			
				Menindaklanjuti hasil penanganan pengaduan masyarakat	Kegiatan		1	1	1	1	4			
				Melakukan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Kegiatan		1	1	1	1	4			
				Menindaklanjuti hasil evaluasi penanganan pengaduan masyarakat	Kegiatan		1	1	1	1	4			
Pemahaman ASN dan Masyarakat akan pentingnya Pencegahan Korupsi	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Tingkat Implementasi Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	97	Melakukan Pencanangan Zona Integritas	Kegiatan	Terlaksananya kegiatan pencanangan zona integritas (Target = 100%)	1	-	-	-	1	150.000.000	Inspektorat Daerah Kabupaten Nias	Seluruh Perangkat Daerah/Unit Kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias
				Menetapkan PD/Unit Kerja yang akan dikembangkan menjadi Zona Integritas dengan Keputusan Bupati	Kegiatan	Tersusun Keputusan Bupati tentang PD yang menjadi project zona integritas (Target = 100%)	1	-	-	-	1			
				Melakukan Pembangunan Zona Integritas	Kegiatan	Terlaksana pembangunan zona integritas di PD (Target = 100%)	1	1	1	1	4			

PERMASALAHAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUNAN 2023-2024	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN (TRIWULAN)					JUMLAH ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH/ UNIT KERJA PELAKSANA	
					SATUAN	INDIKATOR	I	II	III	IV	TOTAL		KOORDINATOR	PELAKSANA
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]
				Melakukan evaluasi atas Zona Integritas yang telah ditetapkan	Kegiatan	Terlaksana evaluasi atas zona integritas yang telah ditetapkan (Target = 100%)	1	1	1	1	4			
				Mengusulkan OPD/Unit Kerja yang memenuhi sebagai zona integritas menuju Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani kepada KemenPAN-RB	Kegiatan	Terlaksana pengusulan OPD yang memenuhi sebagai zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani kepada KemenPAN-RB (Target = 100%)	1	-	-	-	1			
				Menetapkan kebijakan tentang <i>Whistle Blowing System</i> (WBS)	Kegiatan	Adanya kebijakan tentang <i>Whistle Blowing System</i> (WBS) (Target = 100%)	1	-	-	-	1	90.000.000	Inspektorat Daerah Kabupaten Nias	Seluruh Perangkat Daerah/Unit Kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias
				Mensosialisasikan <i>Whistle Blowing System</i> (WBS)	Kegiatan		-	1	-	-	1			
				Mengimplementasikan <i>Whistle Blowing System</i> (WBS)	Kegiatan		1	1	1	1	4			
				Melakukan evaluasi atas pelaksanaan <i>Whistle Blowing System</i> (WBS)	Kegiatan		1	1	1	1	4			
				Menindaklanjuti hasil evaluasi atas pelaksanaan <i>Whistle Blowing System</i> (WBS)	Kegiatan		1	1	1	1	4			
Tata Kelola Kebijakan Publik belum Optimal	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik	Nilai 90	Melakukan pemantauan pelayanan publik secara berkala	Kegiatan	Meningkatnya Indeks Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik (Target=100%)	1	1	1	1	4	60.000.000	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Nias	Seluruh Perangkat Daerah/Unit Kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias
				Mengevaluasi Standar Pelayanan Publik	Kegiatan		1	1	1	1	4			
Adanya Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan yang tidak Harmonis	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan	Indeks Reformasi Hukum	60	Melakukan Identifikasi peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/ tidak sinkron	Kegiatan	Meningkatnya kualitas produk hukum daerah yang melindungi dan berpihak pada kepentingan publik, harmonis dan tidak tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan lainnya	1	1	1	1	4	150.000.000	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nias	Seluruh Perangkat Daerah/Unit Kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias

PERMASALAHAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUNAN 2023-2024	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN (TRIWULAN)					JUMLAH ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH/ UNIT KERJA PELAKSANA	
					SATUAN	INDIKATOR	I	II	III	IV	TOTAL		KOORDINATOR	PELAKSANA
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]
						(Target=100%)								
				Melakukan evaluasi secara berkala terhadap produk hukum daerah yang masih berlaku	Kegiatan	Terlaksananya evaluasi secara berkala terhadap produk hukum daerah (rapat Tim secara rutin) (Target=100%)	1	1	1	1	4			
				Melakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap produk hukum daerah yang tidak harmonis/tidak sinkron dengan peraturan perundang- undangan lainnya	Kegiatan	Terlaksananya identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap produk hukum daerah yang tidak harmonis/tidak sinkron dengan peraturan perundang- undangan lainnya (Target=100%)	1	1	1	1	4			
				Melakukan revisi/ penyempurnaan produk hukum daerah yang tidak harmonis/tidak sinkron dengan peraturan perundang- undangan lainnya	Kegiatan	Terlaksananya revisi/ penyempurnaan produk hukum daerah yang tidak harmonis/ tidak sinkron dengan peraturan perundang- undangan lainnya (Target=100%)	1	1	1	1	4			
				Melakukan deregulasi untuk memangkas produk hukum daerah yang dipandang menghambat pelayanan bagi masyarakat	Kegiatan	Terlaksananya deregulasi terhadap produk hukum daerah yang menghambat pelayanan bagi masyarakat (Target=100%)	1	1	1	1	4			
				Membuat sistem pengendalian/ Standard Operating Procedure (SOP) penyusunan produk hukum daerah	Kegiatan	Terlaksananya pembuatan sistem pengendalian/ Standard Operating Procedure (SOP) penyusunan produk hukum daerah (Target=100%)	1	1	1	1	4	60.000.000		
				Melakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian/ Standard	Kegiatan	Terlaksananya evaluasi pelaksanaan sistem pengendalian/	1	1	1	1	4			

PERMASALAHAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUNAN 2023-2024	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN (TRIWULAN)					JUMLAH ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH/ UNIT KERJA PELAKSANA	
					SATUAN	INDIKATOR	I	II	III	IV	TOTAL		KOORDINATOR	PELAKSANA
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]
				Operating Procedure (SOP) penyusunan produk hukum daerah secara berkala		Standard Operating Procedure (SOP) penyusunan produk hukum daerah secara berkala (Target=100%)						150.000.000		
				Penyusunan produk hukum daerah yang berkualitas	Kegiatan	Terlaksananya rapat Tim penyusunan produk hukum daerah (Target=100%)	1	1	1	1	4			
				Sosialisasi produk hukum daerah dan peraturan perundang- undangan lainnya	Kegiatan	Terlaksananya sosialisasi produk hukum daerah dan peraturan perundang- undangan lainnya (Target=100%)	1	1	1	1	4			
				Publikasi produk hukum daerah dan peraturan perundang- undangan lainnya	Kegiatan	Terlaksananya publikasi produk hukum daerah dan peraturan perundang- undangan lainnya (Target=100%)	1	1	1	1	4			
Penerpan Arsip Digital yang belum memadai	Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti yang Sah dan Pertanggung jawaban Nasional	95	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan	Terselenggaranya Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota (Target=100%)						85.000.000	Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Nias	Seluruh Perangkat Daerah/Unit Kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias
				Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Kegiatan									
Pengelolaan Data Statistik Sektoral yang belum Optimal	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	50	Melakukan Pengembangan data/informasi /statistik daerah	Kegiatan	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah	1	1	1	1	4	369.997.450	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias	Seluruh Perangkat Daerah/Unit Kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias

PERMASALAHAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUNAN 2023-2024	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN (TRIWULAN)					JUMLAH ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH/ UNIT KERJA PELAKSANA	
					SATUAN	INDIKATOR	I	II	III	IV	TOTAL		KOORDINATOR	PELAKSANA
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]
Sumber Daya Manusia Pengelola barang dan Jasa yang belum Maksimal	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	50	Layanan standarisasi layanan LPSE	%	Terlaksananya standarisasi layanan LPSE (Target = 100%)	1	1	1	1	4	300.000.000	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Nias	Seluruh Perangkat Daerah/Unit Kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias
				Pelelangan Barang/Jasa Pemerintah	Kegiatan	Terlaksananya tender pengadaan barang/jasa (Target = 100%)	1	1	1	1	4			
				Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa	Kegiatan	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pengadaan barang/jasa (Target = 100%)	1	1	1	1	4			
				Pendampingan Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Kegiatan	Terlaksananya proses pendampingan permasalahan pengadaan barang/jasa pemerintah (Target = 100%)	1	1	1	1	4			
				Pembinaan Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Kegiatan	Terlaksananya pembinaan pelaku pengadaan barang/jasa	1	1	1	1	4			
				Penyusunan Buku Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Kegiatan	Tersusunnya Buku Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1	-	-	-	1			
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang masih belum Optimal dan Terintegrasi	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini BPK Atas Hasil Laporan Keuangan Daerah	WTP	Peningkatan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kegiatan	Terlaksananya Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1	1	1	1	4	194.379.649.712	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias	Seluruh Perangkat Daerah/Unit Kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias
				Menyusun kebijakan gratifikasi	Kegiatan	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Wajar Tanpa Pengecualian) (Target = 100%)	1	-	-	-	1			
				Melaksanakan kampanye publik (<i>public campaign</i>) terkait kebijakan gratifikasi	Kegiatan		1	1	1	1	4			
				Melaksanakan kebijakan gratifikasi	Kegiatan		1	1	1	1	4			
				Melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan gratifikasi	Kegiatan		1	1	1	1	4			

PERMASALAHAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUNAN 2023-2024	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN (TRIWULAN)					JUMLAH ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH/ UNIT KERJA PELAKSANA	
					SATUAN	INDIKATOR	I	II	III	IV	TOTAL		KOORDINATOR	PELAKSANA
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]
				Menindaklanjuti hasil evaluasi gratifikasi	Kegiatan		1	1	1	1	4			
				Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Kegiatan		1	1	1	1	4			
Sasaran 2: Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional														
Penataan Jabatan Fungsional yang belum Optimal	Penataan Jabatan Fungsional	Persentase Penataan Jabatan Fungsional	100	Membentuk Tim Penyusun Jabatan Fungsional Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias	Kegiatan	Terlaksananya Penataan Jabatan Fungsional (Target = 100%)	1	-	-	-	1	50.000.000	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Nias	Seluruh Perangkat Daerah/Unit Kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias
				Mengadakan Rapat Tim	Kegiatan		1	1	-	-	2			
				Menyusun Dokumen Jabatan Fungsional Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias	Kegiatan		-	1	-	-	1			
				Melakukan evaluasi terhadap Jabatan fungsional yang ada	Kegiatan		1	1	1	1	4			
Pengembangan Manajemen Talenta ASN Belum Optimal	Penguatan Manajemen Talenta ASN	Indeks Profesionalitas ASN	50	Peningkatan Pendidikan ASN melalui Tigas Belajar dan Diklat	Kegiatan	Meningkatkan kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya (Target = 100%)						120.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nias	Seluruh Perangkat Daerah/Unit Kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias
				Mengembangkan kompetensi Pegawai	Kegiatan									
				Peningkatan Kinerja Pegawai	Kegiatan									
				Peningkatan Disiplin Pegawai	Kegiatan									
Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN Belum Optimal dan Terintegrasi dengan Sistem	Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	Kinerja Organisasi	8	Menciptakan Komunikasi yang Baik	Kegiatan	Meningkatnya Kinerja Organisasi (Target = 100%)	1	1	1	1	4	120.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nias	Seluruh Perangkat Daerah/Unit Kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias
				Melakukan Evaluasi Kerja Secara Berkala	Kegiatan		1	1	1	1	4			
				Memberikan <i>Reward and Punishment</i>	Kegiatan		1	1	1	1	4			
				Memberikan Pelatihan dan Pengembangan ASN	Kegiatan		1	1	1	1	4			
				Jenjang Karir	Kegiatan		1	1	1	1	4			
				<i>Feedback</i> yang Membangun	Kegiatan		1	1	1	1	4			

PERMASALAHAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUNAN 2023-2024	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN (TRIWULAN)					JUMLAH ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH/ UNIT KERJA PELAKSANA	
					SATUAN	INDIKATOR	I	II	III	IV	TOTAL		KOORDINATOR	PELAKSANA
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]
Pengembangan Sistem Merit yang Masih belum Maksimal	Penguatan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit	285	Memberikan kepastian karier dan melindungi karier ASN dari intervensi politik dan tindakan kesewenang-wenangan	% Kegiatan	Meningkatnya Indeks Sistem Merit (Target = 100%)	1	1	1	1	4	150.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nias	Seluruh Perangkat Daerah/Unit Kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias
				Mengelola ASN secara efektif dan efisien	Kegiatan		1	1	1	1	4			
				Memberikan penghargaan bagi ASN yang adil dan layak sesuai kinerja.	Kegiatan		1	1	1	1	4			
				Mempunyai rencana kebutuhan ASN untuk 5 tahun yang dirinci menurut jenis dan jenjang jabatan dan disusun berdasarkan Analisa Jabatan (disusun berdasarkan Anjab dan ABK), dengan mempertimbangkan pegawai yang memasuki masa pensiun	Kegiatan		1	1	1	1	4			
				Mengembangkan kemampuan ASN melalui bimbingan dan diklat	Kegiatan		1	1	1	1	4			
Pemahaman ASN akan pentingnya Core Values ASN	Pelaksanaan Core Values ASN	Tingkat Implementasi Pelaksanaan Core Values ASN	95	Mendorong Aparatur Sipil Negara (ASN) kini memiliki Nilai-Nilai Dasar (Core Values) untuk menjadi pendorong atau penyemangat bagi seluruh ASN agar terus memiliki semangat dan kemampuan yang tinggi dalam memberikan pelayanan yang terbaik dan berkualitas baik sebagai abdi negara, abdi pemerintah maupun sebagai abdi masyarakat.	Kegiatan	Terselenggaranya Implementasi Pelaksanaan Core Values ASN (Target = 100%)	1	1	-	-	2	100.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nias	Seluruh Perangkat Daerah/Unit Kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias
				Menerapkan tujuan BerAKHLAK ASN yang merupakan sikap Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif.	Kegiatan		1	1	1	1	4			
				Menyeragamkan nilai-nilai dasar bagi seluruh ASN di Indonesia sehingga menjadi pondasi budaya kerja ASN yang profesional.	Kegiatan		1	1	1	1	4			

PERMASALAHAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUNAN 2023-2024	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN (TRIWULAN)					JUMLAH ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH/ UNIT KERJA PELAKSANA	
					SATUAN	INDIKATOR	I	II	III	IV	TOTAL		KOORDINATOR	PELAKSANA
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]
Pelayanan Publik Prima yang belum Optimal	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Kualitas Pelayanan Publik	10	Membentuk Tim Pelayanan Publik	Kegiatan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1	-	-	-	1	100.000.000	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Nias	Seluruh Perangkat Daerah/Unit Kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias
				Rapat Tim Pelayanan Publik	Kegiatan	(Target = 100%)	1	1	-	-	2			
				Melaksanakan monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik	Kegiatan		1	1	1	1	4			
				Pengolahan data hasil monitoring Evaluasi Pelayanan Publik	Kegiatan		-	-	-	1	1			
				Melaksanakan rapat evaluasi hasil monitoring pelayanan publik	Kegiatan		-	1	-	1	2			

B. RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI TEMATIK

1. RENCANA AKSI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik “Penanggulangan Kemiskinan”
Pemerintah Kabupaten Nias Tahun 2023-2024

PERMASALAHAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN 2023-2024	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN (TRIWULAN)					JUMLAH ANGGARAN	KETERKAITAN DENGAN MASYARAKAT	PERANGKAT DAERAH/ UNIT KERJA PELAKSANA	
					SATUAN	INDIKATOR	I	II	III	IV	TOTAL			KOORDINATOR	PELAKSANA
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[3]	[4]	[5]	[6]
Masih rendahnya Kualitas dan Keterpaduan Database Kemiskinan	Tersedianya Database Pengentasan Kemiskinan yang Terpadu	Database Terpusat (by name, by adreas, by NIK)	100%	Rekonsiliasi Data Penduduk Miskin dan Pemutakhiran Data Sasaran	Kegiatan	Persentase data penduduk miskin yang telah dimutakhirkan	-	1	-	1	2		Tidak Terkait	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias
				Melaksanakan <i>profiling</i> penduduk miskin dengan memanfaatkan data K/L terkait	Kegiatan	Persentase penduduk miskin yang di <i>profiling</i>	-	1	-	1	2		Tidak Terkait		
				Melaksanakan verifikasi dan validasi terhadap data sasaran	Kegiatan	Persentase data sasaran yang telah dilakukan verifikasi dan validasi	-	1	-	1	2		Terkait		
Perencanaan dan penganggaran pengentasan kemiskinan masih belum terpadu lintas sector dan instansi	Tersusunnya perencanaan dan penganggaran pengentasan kemiskinan yang efektif dan efisien	Keseluruhan perencanaan penganggaran	100%	Penyusunan <i>logical framework</i> kinerja penanggulangan kemiskinan yang berorientasi pada outcomes sesuai kondisi	Kegiatan	1 <i>logical framework</i>	1	-	-	-	1		Tidak Terkait	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nias	Seluruh Perangkat Daerah / Unit Kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias
				<i>Review/kajian</i> terhadap desain program, kegiatan dan anggaran yang tepat	Kegiatan	Laporan <i>review/kajian</i>	-	1	-	1	2		Tidak Terkait		
				Sinkronisasi program/kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan secara multilateral antara K/L/Pemda/BUMN dan swasta	Kegiatan	Jumlah program kegiatan yang sinkron	-	1	-	-	1		Tidak Terkait		
				Melakukan kerja sama dalam monev kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan	Kegiatan	Laporan Monev yang berkualitas	-	1	-	1	2		Tidak Terkait		
	Terwujudnya peta proses bisnis yang terpadu	Tersedianya probis terpadu	1 dokumen	Penyusunan Peta Proses Bisnis dengan <i>Stakeholders</i>	Dokumen	Jumlah Peta Proses Bisnis	1	-	-	-	1		Tidak Terkait	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Nias	Seluruh Perangkat Daerah / Unit Kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias
				Pemanfaatan peta proses bisnis	Kegiatan	Persentase pemanfaatan	-	1	1	1	3		Tidak Terkait		

PERMASALAHAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN 2023-2024	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN (TRIWULAN)					JUMLAH ANGGARAN	KETERKAITAN DENGAN MASYARAKAT	PERANGKAT DAERAH/ UNIT KERJA PELAKSANA	
					SATUAN	INDIKATOR	I	II	III	IV	TOTAL			KOORDINATOR	PELAKSANA
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[3]	[4]	[5]	[6]
	Terwujudnya profesionalitas SDM Apatur	Indeks Profesionalitas	90%	Melakukan kerja sama dengan pihak eksternal dalam peningkatan kompetensi teknis dan manajerial SDMA pengentasan kemiskinan	Kegiatan	Persentase pelaksanaan kerja sama	1	1	1	1	4		Tidak Terkait	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nias	Seluruh Perangkat Daerah / Unit Kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias
				Melakukan kerja sama dengan <i>stakeholder</i> yang memiliki SDM Profesional dalam penguatan kemiskinan	Kegiatan	Persentase pelaksanaan kerja sama	1	1	1	1	4		Tidak Terkait		
				Melakukan <i>sharing knowledge</i>	Kegiatan	Persentase peningkatan pemahaman hasil <i>sharing knowledge</i>	1	1	1	1	4		Tidak Terkait		
Pengawasan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang ada di masing-masing Pemda masih lemah	Turunnya jumlah pelanggaran	Jumlah Pelanggaran	0	Penguatan implementasi system pengendalian internal program penanggulangan kemiskinan	Kegiatan	Jumlah SPJ	-	-	1	1	2		Tidak Terkait	Inspektorat Daerah Kabupaten Nias	Seluruh Perangkat Daerah / Unit Kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias
				Penguatan implementasi system pengaduan masyarakat melalui integrasi system pengaduan berbasis TI	Kegiatan	BKPSDMLah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	1	1	1	1	4		Tidak Terkait		
				Peningkatan kolaborasi pengawasan antara APIP dengan APH dan instansi pengawasan lainnya spr BPK, KPK, BPKP	Kegiatan	Jumlah kolaborasi dengan APH dan pengawasa lain	-	1	1	1	3		Tidak Terkait	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Nias	Seluruh Perangkat Daerah / Unit Kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias
Pelaksanaan program dan kegiatan masih banyak dikeluhkan masyarakat	Terlaksananya pengentasan kemiskinan yang sesuai dengan kebutuhan	Kepuasan masyarakat	3,8	Melakukan analisis kebutuhan masyarakat	Kegiatan	Laporan analisis	1	1	-	-	2		Terkait		
				Membangun inovasi sesuai dengan kebutuhan	Kegiatan	Jumlah masukan yang dapat diakomodir	1	1	-	-	2		Terkait		
				Membangun inovasi sesuai kebutuhan	Kegiatan	Jumlah inovasi yang sesuai kebutuhan	-	-	1	-	1		Tidak Terkait		
				Membangun kolaborasi dengan swasta	Kegiatan	Jumlah kolaborasi	-	-	1	1	2		Tidak Terkait		
Penyediaan Sarana dan Prasarana sekolah serta pelatihan kepada tenaga pendidik dan kependidikan	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Indeks Pendidikan		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100%	Meningkatnya Mutu Pendidikan Sekolah Dasar						43,324,294,255		Dinas Pendidikan Kabupaten Nias	Dinas Pendidikan Kabupaten Nias
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100%	Meningkatnya Mutu Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						22,434,788,764			
				Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100%	Meningkatnya Mutu Pendidikan Masyarakat Pada						3,030,000,000			

PERMASALAHAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN 2023-2024	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN (TRIWULAN)					JUMLAH ANGGARAN	KETERKAITAN DENGAN MASYARAKAT	PERANGKAT DAERAH/ UNIT KERJA PELAKSANA	
					SATUAN	INDIKATOR	I	II	III	IV	TOTAL			KOORDINATOR	PELAKSANA
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
						Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)									
				Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	100%	Meningkatnya Mutu Pendidikan Masyarakat Pada Jenjang Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						1,870,000,000			
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	100%	Penerapan Pendidikan Karakter Terhadap Peserta Didik						140.000.000			
				Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	100%	Fasilitasi Kegiatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan						85,000,000			
Meningkatkan Strategi Promotif dan Preventif hidup sehat	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah kabupaten/Kota	1 Tahun	Pengendalian dan Pengawasan terhadap pemberian izin praktik tenaga kesehatan						35,000,000		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nias	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nias
				Advokasi Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	60 Kecamatan	Meningkatnya upaya advokasi pemberdayaan, kemitraan, peningkatan PSM dan lintas sektor						160,000,000			
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan tingkat Daerah kabupaten/Kota	12 Wilayah Puskesmas	Tersedianya Layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						42,113,512,560			
				Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	7 kegiatan	Terlaksananya KIE Tentang Pengendalian penduduk dan KB						70,000,000			
				Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	10 Kecamatan	Terpenuhinya sarana penurunan stunting						15,000,000			
				Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan dan Kesejahteraan Keluarga	10 Kecamatan	Terlaksananya Edukasi Pengasuhan 1000 HPK dan Pemahaman Kespro dan Stunting Kepada Calon Pengantin						35,000,000			

PERMASALAHAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN 2023-2024	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN (TRIWULAN)					JUMLAH ANGGARAN	KETERKAATAN DENGAN MASYARAKAT	PERANGKAT DAERAH/ UNIT KERJA PELAKSANA	
					SATUAN	INDIKATOR	I	II	III	IV	TOTAL			KOORDINATOR	PELAKSKANA
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
Penyediaan Sarana Sanitasi Perumahan	Meningkatnya keberadaan ruang kota dan lingkungan hidup kota yang nyaman dan berkualitas	Indeks Risiko Bencana		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	100 SR	Penyediaan Sarana Air Bersih						1,028,686,330		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Nias	Perangkat Daerah Terkait
				Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	750 Meter	Pembangunan Jalan Setapak di Kawasan Strategis						1,240,562,172			
				Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	37,50%	Pembangunan dan Pemeliharaan jalan Kabupaten/Kondisi Mantap jalan Kabupaten/Kota						47,250,493,599			
Penyediaan dan Pemeliharaan Rumah Tidak Layak Huni	Meningkatnya Keberadaan ruang kota dan lingkungan hidup kota yang nyaman dan berkualitas	Indeks Lingkungan Hidup		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah korban bencana atau Relokasi program Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota						50,000,000		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perhubungan serta Lingkungan Hidup Kabupaten Nias	Perangkat Daerah Terkait
		Indeks Resiko Bencana		Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	3.36%	Luas Kawasan Permukiman Kumuh di Bawah 10 Ha yang Ditangani						400,000,000			
				Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	3.36%	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha						2,250,000,000			
				Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	3.60%	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Harian						2,000,000,000			
				Pengelolaan Sampah	64%	Persentase rumah tangga yang terlayani dhi. Penanganan Sampah						1,050,000,000			
Penguatan Strategi pengarusutamaa	Meningkatnya Strategi pengarusuta	Indeks Pembangunan Gender (IPG)		Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota	1 Kegiatan	Fasilitasi Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber						100,000,000		Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan,	Perangkat Daerah Terkait

PERMASALAHAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN 2023-2024	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN (TRIWULAN)					JUMLAH ANGGARAN	KETERKAATAN DENGAN MASYARAKAT	PERANGKAT DAERAH/ UNIT KERJA PELAKSANA	
					SATUAN	INDIKATOR	I	II	III	IV	TOTAL			KOORDINATOR	PELAKSKANA
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[3]	[4]	[5]	[6]
n gender di sektor utama pelayanan	maan gender di sektor utama pelayanan					Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota								dan Perlindungan Ana Kabupaten Nias	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Asuhan	3 Kegiatan	Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Asuhan						420,000,000			
				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	2 Kegiatan	Fasilitasi Kegiatan Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota						1,390,000,000			
				Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	2 Kegiatan	Fasilitasi kegiatan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota						80,000,000			
				Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/kota	1 Kegiatan	Fasilitas Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota						50,000,000			
Pemenuhan Infrastruktur Dasar Wilayah yang terpadu dan berkelanjutan	Meningkatnya Infrastruktur Dasar Wilayah yang terpadu dan berkelanjutan	Persentase Wilayah Terisolir yang Teretaskan		Penyelenggaraan Penataan Desa	1 Kegiatan	Jumlah Penyelenggaraan Penataan Desa						65,000,000			
				Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	9 Kegiatan	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa						3,035,000,000			
	Meningkatnya Perekonomian Masyarakat	Pengeluaran Perkapita		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	10 Kec	Jumlah Kecamatan yang terpantau ketersediaan pangan pokok						40,000,000		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Nias	Perangkat Daerah Terkait
				Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan angka Kecukupan gizi	10 Kec	Jumlah Kecamatan yang terpantau pencapaian target konsumsi						105,000,000			
				Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan	1 Kegiatan	Tertangani daerah rawan						20,000,000			

PERMASALAHAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN 2023-2024	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN (TRIWULAN)					JUMLAH ANGGARAN	KETERKAATAN DENGAN MASYARAKAT	PERANGKAT DAERAH/ UNIT KERJA PELAKSANA	
					SATUAN	INDIKATOR	I	II	III	IV	TOTAL			KOORDINATOR	PELAKSKANA
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
				Kabupaten/Kota		pangan									
				Pengelolaan Penangkapan Ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	Fasilitasi pengelolaan penangkapan ikan						540,000,000			
				Pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah kabupaten/kota	1 Kegiatan	fasilitasi pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah						130,000,000			
				Pemberdayaan Pembudi daya ikan kecil	1 Kegiatan	Fasilitasi pemberdayaan pembudidayaan ikan kecil						50,000,000			
				Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	1 Kegiatan	Fasilitasi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan						150,000,000			
				Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	1 Kegiatan	Penerbitan Tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan						5,000,000			
				Pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil	1 Kegiatan	Fasilitasi Pembinaan Mutu dan keamanan Hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran						15,000,000			
				Penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	Fasilitasi penyediaan dan penyaluran bahan baku pengolahan ikan						80,000,000			
	Meningkatnya Perekonomian Masyarakat	Nilai Tukar Petani		Pengawasan Pembangunan Sarana Pertanian	1 Kegiatan	Meningkatnya jumlah produksi pertanian						550,000,000		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Nias	Perangkat Daerah Terkait
				Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	Peningkatan Kualitas Benih						275,000,000			
				Pembangunan Prasarana Pertanian	1 Kegiatan	Jumlah Prasarana Pertanian yang dibangun						1,000,000,000			
				Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	1 Kegiatan	Fasilitasi Penyuluhan Pertanian						250,000,000			
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kependudukan yang cepat dan	Indeks Kependudukan	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1 kegiatan	Dokumen Masyarakat akan peristiwa kependudukan terlayani						537,450,800		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias	Perangkat Daerah Terkait

PERMASALAHAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN 2023-2024	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN (TRIWULAN)					JUMLAH ANGGARAN	KETERKAIA TAN DENGAN MASYARAKAT	PERANGKAT DAERAH/ UNIT KERJA PELAKSANA	
					SATUAN	INDIKATOR	I	II	III	IV	TOTAL			KOORDINATOR	PELAKSKANA
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
kredibel															
Pembukaan lapangan pekerjaan di sektor ekonomi kreatif	Meningkatnya Keesempatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan unit kompetensi	15 orang	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan unit kompetensi						295,000,000		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan serta Ketenagakerjaan Kabupaten Nias	Perangkat Daerah Terkait
				Pelayanan antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	77%	Persentase tenaga kerja yang difasilitasi penempatan dalam negeri						105,000,000			
				Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan para Pemangku Kepentingan	20 UMKM	Terlaksananya Pemberdayaan Usaha menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan para Pemangku Kepentingan						80,000,000			
	Meningkatnya Perekonomian Masyarakat	Pengeluaran Perkapita		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	30%	Persentase Pembangunan dan Pemanfaatan Pasar Tradisional dan Pasar Modern						4,725,000,000			
	Meningkatnya produktifitas komoditi masyarakat			Pengawasan pupul dan pestisida bersubsidi ditingkat daerah kabupaten/kota	70%	peningkatan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi di wilayah kabupaten nias						30,000,000			
Optimalisasi Pengelolaan Pajak Daerah dan retribusi Daerah	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Persentase Daerah dengan nilai IKM Baik		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	100%	persentase penetapan pemberian fasilitas insentif penanaman modal yang menjadi kewenangan kab/kota						250,000,000		Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias	Perangkat Daerah Terkait
Pengelolaan Sistem serta prosedur pengelolaan arsip	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	Adanya Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota						48,810,000		Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Nias	Perangkat Daerah Terkait

PERMASALAHAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN 2023-2024	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN (TRIWULAN)					JUMLAH ANGGARAN	KETERKAITAN DENGAN MASYARAKAT	PERANGKAT DAERAH/ UNIT KERJA PELAKSANA	
					SATUAN	INDIKATOR	I	II	III	IV	TOTAL			KOORDINATOR	PELAKSKANA
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[3]	[4]	[5]	[6]
daerah				Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	Tercapainya Pelayanan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) ke sekolah dan desa						100,000,000			
	Meningkatnya Perekonomian Masyarakat			Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	Pengelolaan destinasi pariwisata						200,000,000		Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Nias	Perangkat Daerah Terkait
Implementasi Standar Pelayanan Publik dan standar pelayanan minimal	Meningkatnya Kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat di tingkat kecamatan dan desa						6,000,000			

2. RENCANA AKSI DIGITALISASI PEMERINTAHAN

Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik “Digitalisasi Pemerintahan” Pemerintah Kabupaten Nias Tahun 2023-2024

PERMASALAHAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN 2023-2024	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN (TRIWULAN)					JUMLAH ANGGARAN	KETERKAITAN DENGAN MASYARAKAT	PERANGKAT DAERAH/ UNIT KERJA PELAKSANA	
					SATUAN	INDIKATOR	I	II	III	IV	TOTAL			KOORDINATOR	SATUAN
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
Rendahnya kualitas database	Tersedianya SDM pengelola data yang berkualitas	% SDM Pengelola data yang memiliki pemahaman kategori baik	100%	Terlaksananya pemetaan kebutuhan SDM Pengelola data kader KB	Laporan	Jumlah laporan hasil pemetaan kebutuhan SDM Pengelola Data Kader KB	-	1	-	1	2		Tidak Terkait	Badan Kepegawiaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nias	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nias
				Terlaksananya pemetaan kebutuhan SDM Pengelola Data Fakse Tingkat I	Laporan	Jumlah laporan hasil pemetaan kebutuhan SDM Pengelola Data Faskes Tingkat I	-	1	-	1	2		Tidak Terkait		
				Terlaksananya pemetaan kebutuhan SDM Pengelola Data Bidang Perkim	Laporan	Jumlah laporan hasil pemetaan kebutuhan SDM Pengelola Data Bidang Perkim	-	1	-	1	2		Tidak Terkait		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perhubungan serta laingkungan Hidup Kabupaten Nias
				Terlaksananya pelatihan pengelolaan data/system informasi stunting	Kegiatan	Jumlah pelatihan pengelolaan data/system informasi stunting	1	1	1	1	4		Tidak Terkait		Dinas Kesehatan, P2KB, Diskominfo dan OPD terkait
Rendahnya kualitas infrastruktur Sistem informasi stunting	Tersedianya media informasi terkait penggunaan system informasi	Jumlah jenis Media informasi yang digunakan	2 (online dan offline)	Terusunnya manual book/pedoman penggunaan Sistem Informasi	Dokumen	Jumlah dokumen pedoman penggunaan Sistem informasi	1	-	1	-	2		Terkait langsung dengan masyarakat	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias	Dinas Kesehatan, Perkim, Kecamatan dan Pemerintah Desa
				Terlaksananya sosialisasi penggunaan system informasi	Kegiatan	Jumlah kegiatan sosialisasi penggunaan system informasi	1	1	1	1	4		Terkait langsung dengan masyarakat		Dinas Kesehatan, P2KB, Perkim, Kecamatan, Pemerintah Desa
Rendahnya kualitas infrastruktur Sistem informasi stunting	Tersedianya perangkat pendukung system informasi yang berkualitas	Persentase perangkat pendukung system informasi yang sesuai	100%	Terlaksananya pemetaan kebutuhan perangkat pendukung Sistem informasi	Laporan	Jumlah laporan hasil pemetaan kebutuhan perangkat pendukung Sistem Informasi	-	1	-	1	2		Tidak terkait	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias	Dinas Kesehatan, P2KB, Kecamatan, Pemerintah Desa
				Terlaksananya Pengadaan Perangkat pendukung Sistem	%	% Pengadaan Perangkat pendukung	1	1	1	1	4		Tidak terkait		Dinas Kesehatan P2KB, Dinas

PERMASALAHAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN 2023-2024	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN (TRIWULAN)					JUMLAH ANGGARAN	KETERKAITAN DENGAN MASYARAKAT	PERANGKAT DAERAH/ UNIT KERJA PELAKSANA	
					SATUAN	INDIKATOR	I	II	III	IV	TOTAL			KOORDINATOR	SATUAN
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[3]	[4]	[5]	[6]
				Informasi		Sistem Informasi sesuai dengan hasil pemetaan kebutuhan								Jasa Sekretariat daerah Kabupaten Nias	Perkimhub dan LH, Diskominfo, Kecamatan, Pemerintah Desa, Dinas lain terkait
Belum optimalnya Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip <i>good governance</i> .	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Indeks SPBE	2,50	Melakukan pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Nias	Kegiatan	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah (Target = 100%)	1	1	1	1	4	116.428.829	Terkait	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias	Seluruh Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias
						Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah (Target = 100%)	1	1	1	1	4	231.190.532	Terkait		
				Melakukan Pengembangan data/informasi /statistik daerah	Kegiatan	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah (Target = 100%)	1	1	1	1	4	369.997.450	Tidak Terkait		
		Nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Nias	BB	Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Nias dan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias	Kegiatan	Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Nias dan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias (Target = 100%)	1	-	-	-	1	150.000.000	Tidak Terkait	Asisten Asministasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Nias	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Seluruh Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias
				Mengadakan Rapat Tim Penyusun Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Nias dan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias	Kegiatan								Tidak Terkait		
				Menyusun Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Nias dan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias	Kegiatan								Tidak Terkait		
				Reviu Laporan Kinerja oleh Inspektirat Daerah Kabupaten Nias	Kegiatan								Tidak Terkait		
				Menyampaikan ke Kemnterian PN & RB melalui Aplikasi esr.menpan.go.d	Kegiatan								Tidak Terkait		

PERMASALAHAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN 2023-2024	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN (TRIWULAN)					JUMLAH ANGGARAN	KETERKAITAN DENGAN MASYARAKAT	PERANGKAT DAERAH/ UNIT KERJA PELAKSANA	
					SATUAN	INDIKATOR	I	II	III	IV	TOTAL			KOORDINATOR	SATUAN
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[3]	[4]	[5]	[6]
				Membentuk Tim Penyusun Penjenjangan Kinerja Pemerintah Kabupaten Nias danPerangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias Kabupaten Nias	Kegiatan	Penyusunan Penjenjangan Kinerja Pemerintah Kabupaten Nias danPerangkat Daerah	1	-	-	-	1	15.000.000	Tidak Terkait		
				Mengadakan Rapat Tim Penyusun Penjenjangan Kinerja Pemerintah Kabupaten Nias danPerangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias	Kegiatan	Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias (Target = 100%)							Tidak Terkait		
				Menyusun Dokumen Penjenjangan Kinerja Pemerintah Kabupaten Nias danPerangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias	Kegiatan								Tidak Terkait		
				Reviu Laporan Kinerja oleh Inspektirat Daerah Kabupaten Nias	Kegiatan								Tidak Terkait		
				Menyampaikan ke Kemnterian PN & RB melalui Aplikasi esr.menpan.go.d	Kegiatan								Tidak Terkait		
				Membentuk Tim Penyusun Rencana Aksi Pemerintah Kabupaten Nias danPerangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias	Kegiatan	Penyusunan Rencana Aksi Pemerintah Kabupaten Nias dan Perangkat Daerah	1	-	-	-	1	15.000.000	Tidak Terkait		
				Mengadakan Rapat Tim Penyusun Rencana Aksi Pemerintah Kabupaten Nias danPerangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias	Kegiatan	Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias (Target = 100%)							Tidak Terkait		
				Menyusun Dokumen Rencana Aksi Pemerintah Kabupaten Nias danPerangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias	Kegiatan								Tidak Terkait		
				Reviu Laporan Kinerja oleh Inspektirat Daerah Kabupaten Nias	Kegiatan								Tidak Terkait		
				Menyampaikan ke Kemnterian PN & RB melalui Aplikasi esr.menpan.go.d	Kegiatan								Terkait		
				Membentuk Tim	Kegiatan	Penyusunan	1	-	-	1	2	21.000.000	Tidak Terkait		

PERMASALAHAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN 2023-2024	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN (TRIWULAN)					JUMLAH ANGGARAN	KETERKAITAN DENGAN MASYARAKAT	PERANGKAT DAERAH/ UNIT KERJA PELAKSANA	
					SATUAN	INDIKATOR	I	II	III	IV	TOTAL			KOORDINATOR	SATUAN
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[3]	[4]	[5]	[6]
				Penyusun Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Nias danPerangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias		Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Nias dan Perangkat Daerah						60.000.000			
				Mengadakan Rapat Tim Penyusun Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Nias danPerangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias	Kegiatan	Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias (Target = 100%)							Tidak Terkait		
				Menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Nias danPerangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias	Kegiatan								Tidak Terkait		
				Reviu Laporan Kinerja oleh Inspektirat Daerah Kabupaten Nias	Kegiatan								Tidak Terkait		
				Menyampaikan ke Kemnterian PN & RB melalui Aplikasi esr.menpan.go.d	Kegiatan								Tidak Terkait		
				Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias secara berkala	Kegiatan	Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias (Target = 100%)	1	1	1	1	4		Tidak Terkait		
				Mendorong keterlibatan pimpinan OPD/Unit Kerja dalam penyusunan rencana strategis	Kegiatan	Persentase Pimpinan OPD/Unit Kerja terlibat dalam penyusunan rencana strategis (Target 100%)	1	1	1	1	4	-	Terkait		
				Mendorong keterlibatan pimpinan OPD/Unit dalam penyusunan penetapan kinerja	Kegiatan	Pimpinan OPD/Unit Kerja terlibat (baik langsung maupun tidak langsung) dalam penyusunan penetapan kinerja (Target 100%)	1	1	1	1	4	-	Terkait		
				Mendorong setiap	Kegiatan	Pimpinan	1	1	1	1	4	-	Terkait		

PERMASALAHAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN 2023-2024	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN (TRIWULAN)					JUMLAH ANGGARAN	KETERKAITAN DENGAN MASYARAKAT	PERANGKAT DAERAH/ UNIT KERJA PELAKSANA	
					SATUAN	INDIKATOR	I	II	III	IV	TOTAL			KOORDINATOR	SATUAN
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[3]	[4]	[5]	[6]
				pimpinan OPD/Unit melaksanakan pemantauan/ penilaian/ pengukuran atas pencapaian kinerja bawahan secara berkala		OPD/Unit Kerja melaksanakan pemantauan/ penilaian/ pengukuran terhadap kinerja bawahan (Target 100%)						170.000.000	Tidak Terkait	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nias	Seluruh Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias
				Membentuk Tim Evaluasi Keselarasan RKPD Perangkat Daerah terhadap RPJMD	Kegiatan	Tercapainya Keselarasan Dokumen RKPD Perangkat Daerah	1	1	1	1	4				
				Mengadakan Rapat Tim Evaluasi Keselarasan RKPD Perangkat Daerah terhadap RPJMD	Kegiatan	terhadap RPJMD (Target 100%)	1	1	1	1	4				
				Melakukan Pembekalan Teknis kepada Tim Evaluasi Keselarasan RKPD Perangkat Daerah terhadap RPJMD terkait aplikasi SIPD	Kegiatan		1	1	1	1	4				
				Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terhadap Penyusunan Keselarasan Dokumen RKPD Perangkat Daerah terhadap RPJMD	Kegiatan	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi terhadap Penyusunan Keselarasan Dokumen RKPD Perangkat Daerah terhadap RPJMD (Target = 100%)	1	1	1	1	4				
		Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi	15	Melakukan pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kegiatan	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	1	1	1	1	4	275.000.000	Terkait	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Nias	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Seluruh Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias
				Peningkatan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kegiatan	Terlaksananya Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1	1	1	1	4				
		Opini BPK Terhadap Hasil Laporan Keuangan Daerah	WTP									194.379.649.712	Terkait	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias	Seluruh Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten

PERMASALAHAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN 2023-2024	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN (TRIWULAN)					JUMLAH ANGGARAN	KETERKAITAN DENGAN MASYARAKAT	PERANGKAT DAERAH/ UNIT KERJA PELAKSANA	
					SATUAN	INDIKATOR	I	II	III	IV	TOTAL			KOORDINATOR	SATUAN
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[3]	[4]	[5]	[6]
	Meningkatnya Kualitas Aparatur yang Berintegritas Tinggi, Produktif, dan Melayani secara Primadalam Rangka Peningkatan Kepercayaan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,81	Membentuk Tim Penyusunan dokumen IKM	Kegiatan	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	1	-	-	-	1	100.000.000	Tidak Terkait	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Nias
				Rapat Tim Penyusunan dokumen IKM	Kegiatan	(Target = 2 dok)	1	1	-	-	2		Tidak Terkait	Sekretaris Daerah Kabupaten Nias	Bagian Organiasai Sekretariat Daerah Kabupaten Nias
				Melaksanakan monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik	Kegiatan		1	1	1	1	4		Tidak Terkait		Seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Nias
				Pengolahan data hasil monitoring Evaluasi Pelayanan Publik	Kegiatan		-	-	-	1	1		Terkait		Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias
				Melaksanakan rapat evaluasi hasil monitoring pelayanan publik	Kegiatan		-	1	-	1	2		Terkait		

3. RENCANA AKSI PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI (PDN)

Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik “Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN)” Pemerintah Kabupaten Nias Tahun 2023-2024

PERMASALAHAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN 2023	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN (TRIWULAN)					JUMLAH ANGGARAN	KETERKAITAN DENGAN MASYARAKAT	PERANGKAT DAERAH/ UNIT KERJA PELAKSANA	
					SATUAN	INDIKATOR	I	II	III	IV	TOTAL			KOORDINATOR	PELAKSANA
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]
Kualitas produk Lokal yang kalah bersaing, kurangnya kesadaran dari masyarakat sendiri, serta faktor promosi dan pemasaran yang kurang	Meningkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN)	Fasilitasi Pelaksanaan Sertifikasi dan Pengawasan serta Penerapan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)	55	Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri	Kegiatan	Terlaksananya Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri	1	1	1	1	4	50.000.000	Terkait	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Nias	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan Serta Ketenagakerjaan Kabupaten Nias
SDM Tata Kelola yang Belum Kompeten	Meningkatnya Pengelola PBJ yang Kompeten	Jumlah SDM Pengelola PBJ yang Tersertifikasi		Melakukan Pelatihan kepada SDM UKPBJ	Orang	SDM UKPBJ yang Dilatih	-	1	-	-	2		Terkait	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Nias	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Seluruh Perangkat Daerah
				Melakukan Sertifikasi kepada SDM UKPBJ yang Sudah Diberikan Pelatihan	Orang	Jumlah SDM UKPBJ yang Lulus Sertifikasi	-	-	-	1	1		Terkait		
				Melakukan Monev Terhadap Lulusan Sertifikasi untuk Memantau Kualitas SDM Dapat Terjaga	Orang	Jumlah SDM UKPBJ Bersertifikasi yang Masih Eligible	-	1	-	1	2		Terkait		
Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) yang Belum Matang	Meningkatnya Kematangan UKPBJ	Tingkat Kematangan UKPBJ		Melakukan peningkatan pada Domain Proses	Kegiatan	Peningkatan Domain Proses	-	1	-	1	2		Terkait		
				Melakukan peningkatan pada Domain Kelembagaan	Kegiatan	Peningkatan Domain Kelembagaan	-	1	-	1	2		Terkait		
				Melakukan peningkatan pada Domain SDM	Kegiatan	Peningkatan Domain SDM	-	1	-	1	2		Terkait		
				Melakukan peningkatan pada Domain Sistem Informasi	Kegiatan	Peningkatan Domain SI	-	1	-	1	2		Terkait		
				Melakukan Monev Terhadap Seluruh Domain	Kegiatan	Laporan Monev Hasil Penilaian Kematangan UKPBJ	1	1	1	1	4		Tidak Terkait		
Sistem Teknologi yang Belum Optimal dalam Menunjang Pengadaan Barang dan Jasa	Meningkatnya Optimalisasi Penggunaan Sistem Teknologi Informasi dalam Menunjang Proses Pengadaan Barang dan Jasa	Tingkat Kepatuhan Pelaporan Melalui Sistem		Melakukan peningkatan pada SIRUP	Kegiatan	Peningkatan pemanfaatan SIRUP	1	1	1	1	4		Terkait		
				Melakukan peningkatan pada e-Tendering	Kegiatan	Peningkatan pemanfaatan e-Tendering	1	1	1	1	4		Terkait		
				Melakukan peningkatan pada e-Purchasing	Kegiatan	Peningkatan pemanfaatan e-Purchasing							Terkait		
				Melakukan peningkatan pada Non e- Tendering dan Non e-Purchasing	Kegiatan	Peningkatan pada pemanfaatan Non e- Tendering dan Non e- Purchasing	1	1	1	1	4		Terkait		

PERMASALAHAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN 2023	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN (TRIWULAN)					JUMLAH ANGGARAN	KETERKAITAN DENGAN MASYARAKAT	PERANGKAT DAERAH / UNIT KERJA PELAKSANA	
					SATUAN	INDIKATOR	I	II	III	IV	TOTAL			KOORDINATOR	PELAKSANA
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]
				Melakukan peningkatan pada e-Kontrak	Kegiatan	Peningkatan pada e-Kontrak	1	1	1	1	4		Terkait		
Pembayaran termin yang tidak tepat waktu	Terwujudnya iklim perijinan pelaku usaha lokal yang mudah dan ramah pelaku usaha	Persentase ketepatan pembayaran termin		Melakukan pembayaran termin pelaku usaha sesuai SLA xx hari	Kegiatan	Pembayaran termin pelaku usaha tepat waktu	1	1	1	1	4		Terkait	Kepala Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan Serta Ketenegakerjaan Kabupaten Nias	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan Serta Ketenegakerjaan Kabupaten Nias
proses sertifikasi yang sulit		Sertifikasi TKDN bagi UMKM sesuai SLA xx hari		Proses sertifikasi TKDN bagi UMKM lokal sesuai SLA xx hari	Kegiatan	Jumlah UMKM tersertifikasi TKDN	-	-	-	1	1		Terkait		
regulasi daerah yang tidak mendukung		Jumlah regulasi yang mendukung P3DN		Penerbitan regulasi daerah yang mendukung P3DN dan UMKM	Kegiatan	Jumlah regulasi daerah yang mendukung P3DN dan UMKM	-	1	-	-	1		Terkait		
Pelaku Usaha yang Belum Memahami terkait e-tendering, epurchasaing , dll	Meningkatnya pemahaman pelaku usaha terkait etendering, e-purchasing, dll	Jumlah pelaku usaha dan UMKM yang paham dengan proses e-tendering, P3DN dst		Melakukan Sosialisasi dan Pendampingan kepada Pelaku Usaha dan UMKM lokal	Kegiatan	Jumlah sosialisasi terhadap pelaku usaha	-	-	1	-	1		Terkait		
		Peningkatan Jumlah MoU yang dibuat dengan pelaku usaha PDN		Melakukan MOU dengan UMKM dan pelaku usaha PDN	Kegiatan	Pelaksanaan MOU dengan pelaku usaha dan UMKM	-	-	1	-	1		Terkait		
Jumlah barang/jasa yang dibutuhkan tidak dapat dipenuhi oleh penyedia	Tersedianya produk/ barang g PDN yang sesuai kebutuhan	Persentase barang/jasa PDN pada RUP terpenuhi		Melakukan <i>business matching</i> antara UKPBJ, OPD, dan dengan pelaku usaha (penyedia)	Kegiatan	Peta kebutuhan barang pada pengadaan barang/jasa tersusun tepat waktu	1	1	1	1	4		Terkait		
Kualitas barang/jasa yang masuk dalam e-katalog belum memenuhi standar yang dibutuhkan PD				Membuat MoU dengan Perusahaan Swata/BUMN untuk memberikan program pelatihan keahlian kepada pelaku usaha UMKM	Kegiatan	Jumlah kegiatan pelatihan keahlian dari Perusahaan Swasta/ BUMN terselenggara	-	-	1	-	1		Terkait		
Harga yang tercantum belum merupakan harga final				Melakukan monev e-katalog terkait harga (telah mencantumkan biaya tambahan seperti biaya kirim, biaya instalasi, dll) dan aktifitas penyedia (aktif	Kegiatan	Laporan monev berkala ketersediaan jumlah, kesesuaian kualitas barang/jasa, dan kepastian harga dalam e katalog tersusun tepat waktu	-	1	-	1	2		Tidak Terkait		

4. RENCANA AKSI PENINGKATAN INVESTASI

Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik “Peningkatan Inflasi” Pemerintah Kabupaten Nias Tahun 2023-2024

PERMASALAHAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN 2023	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN (TRIWULAN)					JUMLAH ANGGARAN	KETERKAITAN DENGAN MASYARAKAT	PERANGKAT DAERAH/ UNIT KERJA PELAKSANA	
					SATUAN	INDIKATOR	I	II	III	IV	TOTAL			KOORDINATOR	PELAKSANA
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]
Belum optimalnya Pengembangan Investasi yang ada di Kabupaten Nias	Meningkatnya Investasi	Realisasi InvestasiPMDN/ PMA	22,5	Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota	Kegiatan	Terlaksananya sosialisasi implemementasi perizinan berusaha berbasis risiko	-	1	-	1	2	386.578.000	Terkait	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Nias	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nias
						Rapat penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha	-	1	-	1	2		Terkait		
		Persentase Kegiatan Promosi Penanaman Modal	40	Penyusunan Dokumen Potensi dan Peluang Investasi Daerah	Dokumen	Tersedianya dan terpublikasikannya Dokumen Potensi dan Peluang Investasi Daerah	-	-	-	1	1	10.000.000	Terkait		
		Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	100	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Kegiatan	Kegiatan usaha yang mendapat pengawasan/ inspeksi lapangan	1	1	1	1	4	72.522.000	Terkait		
Rendahnya kemampuan Pemda dalam mengidentifikasi dan menjual potensi investasi daerah	Meningkatnya Kemampuan Pemerintah Daerah dalam Mengidentifikasi dan Memasarkan Potensi Investasi Daerah	Jumlah Peta Pontensi Investasi Daerah yang diupdate dan tersedia di website DPMPTSP dan Pemerintah Daerah	Database	Tersedianya peta potensi investasi yang faktual dan mudah diakses	Database	Tersedianya IPRO (<i>Investment Project Ready to Offer</i>)	-	-	-	1	1		Tidak Terkait	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Nias	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias
						Terbangunya Sistem Informasi Hasil Pemetaan Potensi	-	-	-	1	1		Tidak Terkait		
						Jumlah SDM Kompeten yang melaksanakan pemetaan peta potensi investasi daerah	-	-	1	-	1		Tidak Terkait		
		Persentase investor yang berkomiten untuk melakukan investasi		Pemasaran Investasi Daerah yang Efektif		Letter of Intent (LoI) ke peminatan investasi	-	-	1	-	1		Tidak Terkait		
Rendahnya kualitas penyelenggaraan pelayanan perizinan	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan	Hasil Penilaian Mandiri Kinerja PTSP		Meningkatnya Kepatuhan Pemenuhan Kriteria Penilaian Kinerja Layanan Investasi (Pemenuhan Kriteria Berdasarkan Permen Investasi/ Kepala BKPM No. 2 Tahun 2022	%	Pemenuhan kriteria kinerja PTSP	-	-	1	-	1		Terkait		
		Hasil Penilaian Mandiri Kinerja PPB Pemda			%										

PERMASALAHAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN 2023	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN (TRIWULAN)					JUMLAH ANGGARAN	KETERKAITAN DENGAN MASYARAKAT	PERANGKAT DAERAH/ UNIT KERJA PELAKSANA	
					SATUAN	INDIKATOR	I	II	III	IV	TOTAL			KOORDINATOR	PELAKSANA
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]
				tentang Penilaian Kinerja PTSP dan Kinerja PPB Pemda dan K/L											
		Ketepatan waktu layanan		Meningkatnya Hasil Implementasi	%	Laporan monitoring dan evaluasi	1	1	1	1	4		Tidak Terkait		
		Survei Persepsi Anti Korupsi		Kebijakan Pelayanan Perizinan	Skor	ketepatan waktu layanan	1	1	1	1	4		Tidak Terkait		
		Survei Kepuasan Masyarakat			Skor		1	1	1	1	4		Terkait		
Iklim investasi yang tidak kondusif untuk meningkatkan realisasi investasi	Terciptanya Iklim Investasi yang kondusif untuk meningkatkan realisasi investasi	Iklim Usaha Industri*		Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan Usaha		Monitoring dan evaluasi pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kegiatan usaha yang sesuai dengan rencana kebutuhan	1	1	1	1	4		Terkait		
				Tata ruang yang selaras dengan kebutuhan berusaha	Laporan	Analisis kesesuaian tata ruang yang dengan kebutuhan berusaha	1	1	1	1	4		Terkait		
				Kompetensi dan Kualifikasi tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan	Dokumen	Jumlah tenaga kerja yang memenuhi Kompetensi dan Kualifikasi Usaha/Industri	-	-	-	1	1		Terkait		
				Meningkatnya Stabilitas Kemanan	Tenaga Kerja	Monitoring dan evaluasi koordinasi formal dengan pemangku kepentingan (APH, Organisasi Kemasyarakatan, Pelaku usaha)	1	1	1	1	4		Terkait		
				Kemudahan Aksesibilitas Pemodal	Laporan	MoU terkait dukungan permodalan pelaku usaha	-	-	1	-	1		Terkait		
Rendahnya Kepatuhan Pelaporan LKPM	Meningkatnya Kepatuhan Pelaporan Kegiatan Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Kepatuhan Pelaporan LKPM		Meningkatnya Jumlah Pengusaha yang melaporkan kegiatan penanaman modal	%	Laporan tingkat kepatuhan Pengusaha atas LKPM	1	1	1	1	4		Tidak Terkait		
						Pemanfaatan forum pengusaha untuk mendorong kepatuhan pelaporan LKPM	1	1	1	1	4		Terkait		
				Meningkatnya Ketepatan Informasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal	Laporan	Monitoring dan evaluasi tingkat verifikasi LKPM	1	1	1	1	4		Terkait		

5. RENCANA AKSI PENGENDALIAN INFLASI

Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik “Pengendalian Inflasi” Pemerintah Kabupaten Nias Tahun 2023-2024

PERMASALAHAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN 2023-2024	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN (TRIWULAN)					JUMLAH ANGGARAN	KETERKAITAN DENGAN MASYARAKAT	PERANGKAT DAERAH/ UNIT KERJA PELAKSANA	
					SATUAN	INDIKATOR	I	II	III	IV	TOTAL			KOORDINATOR	SATUAN
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[3]	[4]	[5]	[6]
Rendahnya konektivitas jaringan distribusi pangan, kesenjangan informasi dan distorsi struktur pasar dan produktivitas pangan	Terkendalnya Inflasi	Indeks Harga Konsumen (IHK)	80	Mengukur dan menghitung harga keseluruhan dari barang/jasa yang dikonsumsi dalam suatu periode		Terlaksananya pengukuran IHK	1	1	1	1	4	50.000.000	Terkait	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Nias	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan Serta Ketenagakerjaan Kabupaten Nias
Belum optimalnya peran SDM penyuluh petani, perkebunan dan perikanan yang berkualitas	Meningkatnya produksi Perikanan, Pertanian dan Perkebunan	Tingkat Produktivitas Perikanan, Pertanian dan Perkebunan		Melakukan evaluasi jabatan (evjab) SDM penyuluh	Orang	Jumlah SDM Penyuluh	-	1	-	-	2		Terkait	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Nias	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Nias
				Melakukan pelatihan kepada SDM penyuluh	Orang	Jumlah SDM Penyuluh yang tersertifikasi	-	1	-	-	2		Terkait	Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Nias	
				Melakukan penyuluhan dan melakukan move pasca penyuluhan	%	Presentase penyuluhan yang berdampak pada tingkat produksi	-	1	-	-	2		Terkait		
	Masih rendahnya jumlah petani yang bergabung didalam kelompok formal sehingga menyulitkan untuk pemberian bantuan pemerintah/ pembiayaan			Membentuk lembaga usaha Pangan masyarakat (LUPM) yang mewadahi kelompok petani dan nelayan	Lembaga	Jumlah LUPM	-	-	-	1	1		Terkait		
				Melakukan sosialisasi terhadap petani dan nelayan tentang pentingnya tergabung didalam LUPM	Kegiatan	Jumlah sosialisasi terhadap petani dan nelayan dengan tema LUPM	-	1	-	-	2		Terkait		
				Memfasilitasi kelembagaan LUPM untuk mendapatkan bantuan dan pembiayaan pemerintah	Program	Jumlah bantuan program	-	1	-	-	2		Terkait		
Masih panjangnya rantai distribusi dan Masih minimnya Kerjasama Antar Daerah (KAD)	Meningkatnya Kerjasama Antar Daerah	Nilai Transaksi Kerjasama antar Daerah		Melakukan pemetaan dan analisa kebutuhan komoditas pangan daerah yang disandingkan dengan persebaran di daerah lainnya	Dokumen	Jumlah dokumen analisa kebutuhan komoditas	-	1	-	-	2		Terkait	Asisten Peerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Nias	Seluruh Perangkat Daerah terkait
Belum optimalnya peran TPID dalam melakukan pemantauan	Meningkatnya Peran TPID	TPID Award		Menyusun TPID yang melibatkan stakeholder terkait sesuai dengan Kepres 23 tahun 2017	Dokumen	SK Pembentukan Tim TPID	-	1	-	-	2		Tidak Terkait	Kabupaten Nias	

4.4 PELAKSANAAN RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI

Pelaksanaan reformasi birokrasi tematik didasarkan pada rencana aksi yang telah disusun. Tahapan ini merupakan inti dari pelaksanaan reformasi birokrasi tematik yang perlu didukung oleh kolaborasi dan keterlibatan unsur-unsur penting yang terkait.

Tim Reformasi Birokrasi Tematik terdiri atas seluruh perangkat daerah yang terlibat dalam pelaksanaan rencana aksi, baik secara langsung maupun bersifat dukungan. Perangkat daerah yang ditunjuk sebagai Ketua Tim Reformasi Birokrasi Tematik berperan untuk mengkoordinasikan seluruh kegiatan aksi yang telah ditetapkan pada rencana aksi. Kunci Keberhasilan Pelaksanaan Rencana Aksi adalah sebagai berikut :

1. Komitmen Pimpinan dan seluruh Anggota.
2. Kolaborasi lintas unit kerja maupun seluruh *stakeholders*.
3. Menyelesaikan akar masalah bukan hanya fokus pada masalah tapi pada akar masalah.
4. Adanya Inovatif yang *out of the box* bukan *business as usual*.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General didasarkan pada perencanaan Reformasi Birokrasi yang telah ditetapkan. Tahapan ini merupakan hal strategis yang perlu didukung oleh kolaborasi dan keterlibatan unsur terkait. Adapun kunci keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi General meliputi:

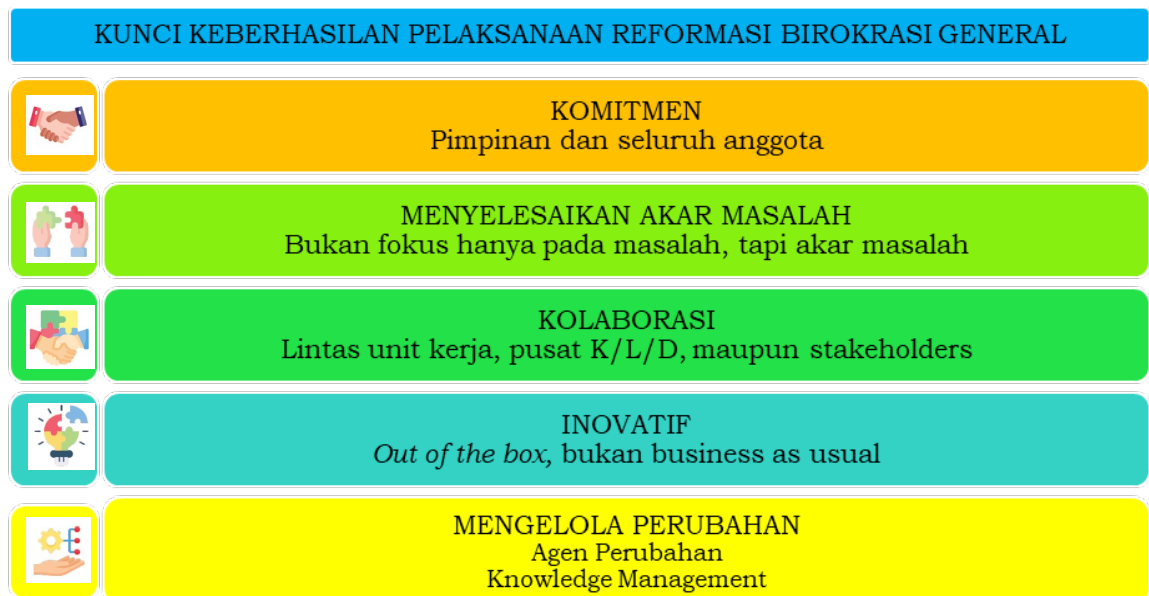
1. Komitmen pimpinan dan seluruh anggota.
Komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh jajaran untuk berubah (*commitment to change*) merupakan faktor penting dalam mencapai tujuan Reformasi Birokrasi General. Dengan adanya komitmen kuat yang ditandai munculnya keterlibatan aktif dari pimpinan maupun seluruh jajaran, maka ide-ide luar biasa dan inovatif akan lebih mudah muncul. Saat ini baik pimpinan maupun jajaran dituntut semakin cepat tanggap agar mampu menangkap pesan dari masyarakat untuk membawa organisasi ke arah yang tepat dan lebih maju. Komitmen dalam hal ini adalah berorientasi hasil dan fokus pada akar masalah; inovatif dan terbuka atas ide baru; pengalaman dan pengetahuan; adaptif dan memanfaatkan teknologi; mengedepankan *public value*; serta kolaboratif dan partisipatif.
2. Menyelesaikan akar masalah.
Seringkali dalam menyelesaikan sebuah permasalahan tidak berupaya mencari akar permasalahan, sehingga masalah yang sama muncul kembali. Dalam pelaksanaan RB perlu untuk menyelesaikan akar masalah sehingga tidak hanya fokus pada permasalahan yang terjadi, namun mengetahui dengan jelas penyebab yang signifikan untuk diintervensi sesuai Rencana Aksi yang telah disusun.
3. Kolaborasi.
Kolaborasi diperlukan untuk mempercepat tercapainya tujuan RB, baik kolaborasi internal, lintas unit kerja, maupun dengan *stakeholders* terkait. Pada satu sisi, permasalahan RB semakin kompleks, namun di sisi lain pemerintah memiliki berbagai keterbatasan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Untuk mengatasi hal tersebut, isu strategis Reformasi Birokrasi juga dapat berkolaborasi dengan berbagai unsur di luar pemerintah mulai dari swasta, akademisi, masyarakat, *Non-Governmental Organization* (NGO), dan lain sebagainya.

4. Inovatif.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang semakin tinggi tuntutananya perlu dilakukan dengan cara-cara inovatif, tidak dengan cara-cara yang prosedural dan terlampau birokratis. Pemerintah Kabupaten Nias diharapkan dapat terbuka dengan hal-hal baru, berpikir ke depan dan *out of the box*.

5. Mengelola perubahan melalui Agen Perubahan dan penerapan *Knowledge management*.

Agar resistensi dapat dikurangi dan keberhasilan Reformasi Birokrasi dapat dipercepat, maka dalam pengelolaan perubahan dapat dilakukan dengan strategi Agen Perubahan dan *Knowledge management* yang tepat. Agen perubahan merupakan perorangan/tim yang berperan sebagai katalis, penggerak perubahan, pemberi masukan alternatif solusi, dan penghubung komunikasi dalam proses pembangunan Reformasi Birokrasi. Adapun penerapan *Knowledge management* diharapkan efektif meningkatkan kualitas pemahaman dan persepsi seluruh entitas internal maupun eksternal yang terkait dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.



4.5 MEKANISME MONITORING DAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI

Agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Nias dapat berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan pengelolaan yang baik pula. Untuk itu perlu dibentuk tim yang berperan untuk melakukan pengelolaan Reformasi Birokrasi agar seluruh rencana aksi dapat dilaksanakan sesuai dengan target dan jadwal yang telah ditentukan. Organisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Nias sesuai dengan level pelaksanaan kebijakan Reformasi Birokrasi itu sendiri, yaitu Makro, Meso, dan Mikro.

**Pelaksana Reformasi Birokrasi
Pemerintah Kabupaten Nias**

LEVEL PELAKSANAAN	RUANG LINGKUP PELAKSANAAN PERAN	PELAKSANA
[1]	[2]	[3]
MAKRO	Menetapkan strategi dan arah kebijakan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias serta melakukan monitoring dan evaluasi pencapaian hasil Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias	1. Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Nias (KPRBPKN) 2. Sekretariat Eksekutif KPRBPKN 3. Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Nias (TRBPKN)
MESO	Menetapkan kebijakan turunan dari strategi dan arah kebijakan level makro, serta memastikan pelaksanaan kebijakan tersebut oleh seluruh Perangkat Daerah	1. Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Nias (UPRBPN) 2. Tim Independen Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Nias (TIRBPKN) 3. Tim Penjamin Kualitas Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Nias (TPKTBPKN) 4. Kementerian/lembaga <i>Leading Institution</i> 5. Kementerian/lembaga <i>Leading Sector</i>
MIKRO	Mengimplementasikan seluruh kebijakan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias yang telah ditetapkan pada tingkat makro dan meso, serta mengelola pelaksanaan setiap program dan kegiatan mikro Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias agar dapat terlaksana dengan masif dan komprehensif pada setiap unit kerja	Masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja

A. PELAKSANA LEVEL MAKRO

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Nias pada level makro adalah untuk memastikan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Nias mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui penetapan arah kebijakan Reformasi Birokrasi, penetapan kebijakan prioritas Reformasi Birokrasi, serta penyempurnaan regulasi nasional yang terkait dengan upaya pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Bupati Nias/Wakil Bupati Nias sebagai Ketua Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Nias (KPRBPKN) berhak menetapkan arah kebijakan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Nias sesuai dengan prioritas pembangunan yang hendak dicapai. Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua KPRBPKN dibantu oleh Sekretariat Eksekutif KPRBPKN yang bertugas atas nama Ketua KPRBPKN untuk mengorkestrasi, mengkoordinasikan, mengkonsolidasikan, serta mengevaluasi berbagai kebijakan yang terkait dengan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Nias kepada kementerian/lembaga.

- 1) Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Nias (KPRBPKN) bertugas untuk:
 - a. Menetapkan arah kebijakan nasional sebagai landasan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Nias untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
 - b. Menetapkan kebijakan dan program strategis pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Nias;
 - c. Menyelesaikan permasalahan dan hambatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Nias yang tidak dapat

diselesaikan oleh Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Nias (TRBPKN); dan

- d. Menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu waktu apabila diperlukan kepada Bupati Nias.
- 2) Sekretariat Eksekutif KPRBPKN bertugas untuk menyiapkan dukungan administrasi, teknis dan substansi kepada ketua KPRBPKN.
- 3) Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Nias (TRBPKN) bertugas untuk:
 - a. Merumuskan kebijakan dan strategi operasional Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Nias;
 - b. Memantau dan mengevaluasi kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Nias;
 - c. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk menegakkan kepatuhan atas standar-standar bagi pelaksanaan program Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Nias;
 - d. Melaksanakan komunikasi secara berkala dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*); dan
 - e. Melaporkan Kemajuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Nias kepada KPRBPKN.

B. PELAKSANA LEVEL MESO

- 1) Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Nias (UPRBPN) sebagai koordinator dalam gabungan *Leading Institution* bertugas untuk:
 - a. Membantu TRBPKN dalam mengkoordinasikan perumusan kebijakan operasional Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Nias;
 - b. Membantu TRBPKN dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Nias, baik bersifat Makro, Meso maupun Mikro;
 - c. Memantau perkembangan kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Nias;
 - d. Memberikan saran dan masukan atas hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia; dan
 - e. Melaporkan kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi nasional setiap triwulan kepada TRBPKN.
- 2) Tim Independen Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Nias (TIRBPKN) berfungsi memberikan saran dan masukan secara independen kepada TRBPKN dan KPRBPKN tentang pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias.
- 3) Tim Penjamin Kualitas Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Nias (TPKRBPN) merupakan tim yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan tugas TRBPKN, yang memiliki tugas untuk:
 - a. Memastikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai dengan *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;
 - b. Memberikan saran pemecahan masalah terkait dengan penjamin Kualitas Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias kepada KPRBPKN;
 - c. Melakukan identifikasi dan analisis terhadap kemungkinan/risiko kegagalan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan

- Pemerintah Kabupaten Nias dan mengusulkan rencana mitigasi risiko;
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pada beberapa Perangkat Daerah/Unit Kerja tertentu terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi; dan
 - e. Perumusan rekomendasi terhadap hasil penjamin kualitas, monitoring dan evaluasi dalam rangka pemberian rekomendasi kepada komite pengarah.
- 4) Kementerian/Lembaga yang ditunjuk sebagai *Leading Institution* adalah pihak yang ikut mengawal pelaksanaan Reformasi Birokrasi bertugas untuk merumuskan dan mengkoordinasi pelaksanaan kebijakan, melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, memberikan pembinaan dan pelatihan perumusan kebijakan, dan melaporkan pelaksanaan kebijakan kepada TRBPKN.

Leading Institution dalam Reformasi Birokrasi
Pemerintah Kabupaten Nias

NO	INSTANSI PEMERINTAH	PERAN
[1]	[2]	[3]
1.	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	1. Perumusan kebijakan aparatur negara yang berkualitas; 2. Perumusan kebijakan dan strategi operasional Reformasi Birokrasi Nasional; 3. Pembinaan dan Pengawasan kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam pelaksanaan kebijakan Reformasi Birokrasi nasional; 4. Perumusan kebijakan kelembagaan dan tata laksana nasional; 5. Perumusan kebijakan pelayanan publik nasional.
2.	Sekretariat Daerah Kabupaten Nias	Pembinaan dan Pengawasan pemerintah daerah dalam pelaksanaan kebijakan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias
3.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias	1. Merumuskan dan mengawasi penganggaran dalam perencanaan serta pelaksanaan pembangunan Daerah 2. Pelaksanaan integrasi perencanaan dan penganggaran. 3. Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).
4.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nias	1. Sinkronisasi dan kolaborasi perencanaan, serta pelaksanaan pembangunan nasional. 2. Pelaksanaan integrasi perencanaan dan penganggaran.
5.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias	1. Penerapan layanan internal pemerintah berbasis elektronik yaitu implementasi aplikasi umum SPBE dan pengembangan inovasi internal. 2. Penguatan kualitas infrastruktur SPBE. 3. Integrasi layanan publik berbasis elektronik (<i>e-service</i>).
6.	Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Nias dan Badan Pusat Statistik (BPS)	Penguatan penyelenggaraan data statistik sektoral.
7.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nias	1. Peningkatan kompetensi ASN sesuai kebutuhan pembangunan nasional. 2. Peningkatan pelaksanaan <i>Evidence based policy</i> .

NO	INSTANSI PEMERINTAH	PERAN
[1]	[2]	[3]
		3. Koordinasi implementasi kebijakan terkait manajemen ASN. 4. Pemutakhiran data PNS. 5. Mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, serta penerapan sistem merit dalam kebijakan dan manajemen ASN pada instansi pemerintah.
8.	Badan Pemeriksa Keuangan / Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias/Inspektorat Daerah Kabupaten Nias	Mengawal kualitas pertanggungjawaban penggunaan APBD dan tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan.
9.	Inspektorat Daerah Kabupaten Nias	1. Penguatan pengawasan internal pemerintah dan program pembangunan nasional. 2. Penguatan penerapan manajemen risiko. 3. Mereview celah-celah korupsi setiap peraturan perundang-undangan. 4. Penguatan upaya pencegahan korupsi
10.	Dinas Perpustakaan dan Arsip kabupaten Nias	Penguatan pengelolaan arsip digital
11.	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nias	Sinergitas regulasi berbasis simplifikasi. Partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
12.	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Nias	Kepatuhan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

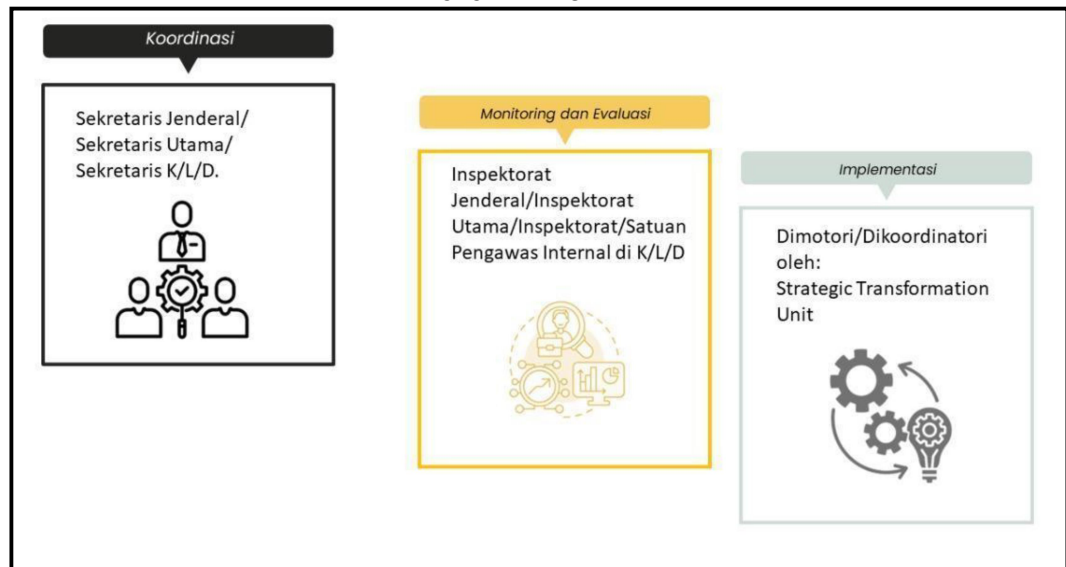
- 5) Perangkat Daerah/Unit Kerja yang merupakan *leading sector* yang memiliki peran, kewenangan, dan tanggung jawab untuk menjadi koordinator secara nasional dalam pelaksanaan tema yang ditetapkan dalam Reformasi Birokrasi Tematik.

A. PELAKSANA LEVEL MIKRO

Pelaksana Reformasi Birokrasi di level mikro merupakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi oleh instansi kementerian/ lembaga/pemerintah daerah masing-masing. Pada implementasinya setiap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah kabupaten Nias pada level mikro dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. Hal ini untuk memastikan bahwa program-program Meso dan Mikro Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah kabupaten Nias telah dilaksanakan secara sistemik, komprehensif, dan berkelanjutan oleh semua Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias. Dalam rangka untuk memastikan implementasi tersebut, Sekretaris Daerah dapat membentuk Tim atau Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Internal (*Strategic Transformation Unit (STU)*). Struktur STU bersifat fungsional dan tidak harus dibentuk baru, melainkan bisa dengan memberikan kewenangan yang lebih kuat kepada struktur yang ada atau dilekatkan kepada staf ahli di masing-masing instansi. STU bertugas untuk menggerakkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi, termasuk memastikan bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi berdampak pada pencapaian sasaran strategis program pembangunan.

Selanjutnya untuk monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di internal dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Nias.

Pelaksana Reformasi Birokrasi Level Mikro



Tim atau unit pengelola Reformasi Birokrasi tersebut akan berperan sebagai penggerak, pelaksana, dan pengawal pelaksanaan Reformasi Birokrasi di masing-masing pemerintah daerah beserta jajaran unit kerja di dalamnya. Tugas dari tim atau unit pengelola Reformasi Birokrasi instansi ini adalah:

1. Merumuskan *Road Map* pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias;
2. Melaksanakan *Road Map* Reformasi Birokrasi dan program-program prioritas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias serta perangkat daerah/unit kerja;
3. Menjaga kesinambungan program-program yang telah berjalan dengan baik;
4. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias; dan
5. Melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan *stakeholders*.

Selain itu, untuk memastikan bahwa program Reformasi Birokrasi Internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias berjalan secara sistemik dan berkelanjutan dapat dilaksanakan sampai unit-unit kerja, maka diperlukan keterlibatan aktif dari setiap pimpinan unit kerja sehingga program Reformasi Birokrasi internal dilaksanakan secara bersama-sama dan kolaboratif.

BAB V

PENUTUP

Reformasi Birokrasi dilakukan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif dan berdaya saing dan mampu mendorong capaian pembangunan nasional, daya saing global dan peningkatan pelayanan publik, sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktik KKN. Mengingat bahwa Reformasi Birokrasi termasuk ke dalam agenda prioritas nasional, maka melalui penajaman Reformasi Birokrasi yang dilakukan, hal tersebut dapat mendukung percepatan pembangunan nasional. Sehingga dengan strategi Reformasi Birokrasi yang baru diharapkan juga dapat mendorong percepatan capaian sasaran strategis Reformasi Birokrasi dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

Dinamika lingkungan yang selalu berubah dan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi juga memicu pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk semakin adaptif dan lincah. Adanya penajaman *Road Map* Reformasi Birokrasi pun bertujuan untuk menjawab hal tersebut dengan terfokus pada empat aspek, yaitu, penajaman tujuan dan sasaran, penajaman kegiatan utama yang fokus dan berdampak, fokus kepada isu hulu dan hilir, dan penajaman indikator Reformasi Birokrasi. Adapun aspek penajaman Reformasi Birokrasi tersebut dapat membantu menciptakan kesuksesan Reformasi Birokrasi yang merupakan tanggung jawab segenap elemen pemerintahan, sehingga kesadaran dan komitmen yang kuat harus dibangun bersama seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah di Indonesia, sebagaimana yang diharapkan dalam *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010–2025 dan diharapkan mampu mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif dan berdaya saing, serta mampu mendorong capaian pembangunan nasional, daya saing global dan peningkatan pelayanan publik, sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat secara cepat, tangkas, tanggap, tepat, profesional, dan bersih dari praktik KKN.

BUPATI NIAS,

ttd

YAATULO GULO



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,

SAMSON PERDAMAIAN ZAI

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI NIAS

NOMOR : 23 TAHUN 2023

TANGGAL : 26 JULI 2023

TENTANG : ROAD MAP REFORMASI
BIROKRASI PEMERINTAH
KABUPATEN NIAS TAHUN 2023-
2024

SISTEMATIKA PENYUSUNAN MODUL
REFORMASI BIROKRASI TEMATIK

I. JUDUL

Contoh judul :

MODUL
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI TEMATIK
DINAS/BADAN/KECAMATAN
..... (diisi dengan Tema Reformasi Birokrasi Tematik)
TAHUN

II. LATAR BELAKANG

Menguraikan latar belakang dan hal-hal yang melandasi pemilihan tema reformasi birokrasi tematik pada perangkat daerah.

III. GAMBARAN UMUM

Menguraikan gambaran umum pelaksanaan reformasi birokrasi tematik dan aspek tata kelola yang perlu diintervensi melalui tema yang dipilih serta tahapan pelaksanaan pembangunan reformasi birokrasi tematik pada perangkat daerah.

IV. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN

Menguraikan Identifikasi permasalahan Reformasi Birokrasi Tematik yang difokuskan pada permasalahan birokrasi yang dapat diintervensi, yaitu terkait tema reformasi birokrasi tematik pada perangkat daerah.

V. PENYUSUNAN *LOGICAL FRAMEWORK* (KERANGKA LOGIS)

Membuat *Logical framework (logframe)* ini dikembangkan dari tema reformasi birokrasi tematik pada perangkat daerah dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah.

Logframe ini disusun berdasarkan analisis dan permasalahan tema reformasi birokrasi tematik yang dipilih dan berfokus pada permasalahan yang dihadapi. Penyusunan ini dapat disesuaikan dengan potensi, kebutuhan, hingga karakteristik masing-masing perangkat daerah.

VI. PENYUSUNAN RENCANA AKSI

Menyusun rencana aksi pelaksanaan reformasi birokrasi tematik perangkat daerah sesuai dengan tema yang dipilih.

VII. PELAKSANAAN RENCANA AKSI

Menguraikan langkah-langkah dalam pelaksanaan rencana aksi. Tahapan ini merupakan inti dari pelaksanaan reformasi birokrasi tematik yang perlu didukung oleh kolaborasi dan keterlibatan unsur-unsur penting yang terkait. Rencana Aksi disusun oleh Tim reformasi birokrasi tematik yang terlibat dalam pelaksanaan rencana aksi baik secara langsung maupun bersifat dukungan.

VIII. MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA AKSI

Menguraikan sistem atau cara dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi terhadap tema reformasi birokrasi tematik pada perangkat daerah.

IX. PENUTUP

BUPATI NIAS,

ttd

YAATULO GULO



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,

SAMSON PERDAMAIAN ZAI

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI NIAS

NOMOR : 23 TAHUN 2023

TANGGAL : 26 JULI 2023

TENTANG : ROAD MAP REFORMASI
BIROKRASI PEMERINTAH
KABUPATEN NIAS TAHUN 2023-
2024

SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAPORAN
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI TEMATIK

I. JUDUL

Contoh judul :

LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI TEMATIK
DINAS/BADAN/KECAMATAN
..... (diisi dengan Tema Reformasi Birokrasi Tematik)
TAHUN

II. LATAR BELAKANG

Menguraikan latar belakang dan hal-hal yang melandasi pelaksanaan reformasi birokrasi tematik pada perangkat daerah.

III. GAMBARAN UMUM

Menguraikan gambaran umum pelaksanaan reformasi birokrasi tematik dan aspek tata kelola yang perlu diintervensi melalui tema yang dipilih serta tahapan pelaksanaan pembangunan reformasi birokrasi tematik pada perangkat daerah.

IV. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN

Menguraikan Identifikasi permasalahan Reformasi Birokrasi Tematik yang difokuskan pada permasalahan birokrasi yang dapat diintervensi, yaitu terkait tema reformasi birokrasi tematik pada perangkat daerah.

V. LOGICAL FRAMEWORK (KERANGKA LOGIS)

Membuat *Logical framework (logframe)* ini dikembangkan dari tema reformasi birokrasi tematik pada perangkat daerah dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah.

Logframe ini disusun berdasarkan analisis dan permasalahan tema reformasi birokrasi tematik yang dipilih dan berfokus pada permasalahan yang dihadapi. Penyusunan ini dapat disesuaikan dengan potensi, kebutuhan, hingga karakteristik masing-masing perangkat daerah.

VI. PRENCANA AKSI

Menyusun rencana aksi pelaksanaan reformasi birokrasi tematik perangkat daerah sesuai dengan tema yang dipilih.

VII. LAPORAN PELAKSANAAN RENCANA AKSI

Menguraikan langkah-langkah dalam pelaksanaan rencana aksi. Tahapan ini merupakan inti dari pelaksanaan reformasi birokrasi tematik yang perlu didukung oleh kolaborasi dan keterlibatan unsur-unsur penting yang terkait. Laporan Pelaksanaan Rencana Aksi disusun oleh Tim reformasi birokrasi tematik yang terlibat dalam pelaksanaan rencana aksi baik secara langsung maupun bersifat dukungan.

VIII. PERMASALAHAN DAN SOLUSI DALAM PELAKSANAAN RENCANA AKSI

Menguraikan permasalahan atau kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana aksi dan menjelaskan solusi yang akan dilakukan pelaksanaan rencana aksi terhadap tema reformasi birokrasi tematik pada perangkat daerah.

IX. PENUTUP

BUPATI NIAS,

ttd

YAATULO GULO



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,

SAMSON PERDAMAIAN ZAI